

PERENCANAAN PARTISIPATIF DENGAN MENGUNAKAN MODEL *CLEAR* DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

(Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan
Serang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

Vevi Martina

NIM 6661132247

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, SEPTEMBER 2017**

ABSTRAK

Vevi Martina. 6661132247. PERENCANAAN PARTISIPATIF DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CLEAR DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Dr Gandung Ismanto,S.Sos.,MM. Dosen Pembimbing II : Maulana Yusuf, S.Ip.,M.Si.

Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilakukan secara partisipatif di Kelurahan Serang dalam rangka penataan permukiman kumuh. Permasalahan yang terjadi yakni masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan permukiman layak huni, minimnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di kawasan kumuh Kelurahan Serang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan partisipatif dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang menggunakan Model Partisipasi *CLEAR*. Penelitian ini menggunakan Teori Model Partisipasi *CLEAR* menurut Pratchett, Stoker dan Lowndes dalam Karianga (2011:233). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Perencanaan Partisipatif di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program KOTAKU di Kelurahan Serang) belum berjalan dengan baik, karena tidak terpenuhinya ke lima indikator model partisipasi *CLEAR*. Sehingga perlu perbaikan terkait pengembangan kapasitas masyarakat, penggunaan media informasi yang efektif dan juga sosialisasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Saran yang dapat diberikan yaitu agar segera dilakukan pengembangan kapasitas masyarakat, alternatif-alternatif bentuk diskusi, upaya pendekatan kepada masyarakat, penggunaan media sosial dan papan media informasi yang di *up to date* serta menjalin komunikasi secara terus menerus.

Kata kunci : Model *CLEAR*, Perencanaan Partisipatif, Program KOTAKU

ABSTRACT

Vevi Martina. 6661132247. The PARTICIPATORY PLANNING USING MODEL CLEAR in SERANG-BANTEN (A case study Program Kota Tanpa Kumuh in urban village Serang). The State administration of science courses, the Faculty of social science and political science. The 1st advisor : Dr. Gandung Ismanto, S. Sos., MM. The 2st advisor: Maulana Yusuf, S. Ip., M. Si.

Program planning of Cities Without Slums (KOTAKU) done in a participatory in Kelurahan Serang in order to setup the slums. Problems occurred namely the still low level of community participation in terms of development neighborhood livable, lack of community participation in terms of utilization and maintenance of the environment and the still low level of public education in Slum Kelurahan Serang. The purpose of this research was to find out how participatory planning in the city without Slums Programmes in Kelurahan Serang using CLEAR Participation Model. This research using Model theory CLEAR Participation according to Pratchett, Stoker and Lowndes in Karianga (2011:233). Data collection techniques used are interviews, observation, study of the literature and documentation. The results showed that Participatory Planning Analysis in Serang Banten Province (case study Program KOTAKU in urban village Serang) has not gone well, because it does not satisfy the CLEAR participation model indicators. So it needs improvement-related capacity development society, the effective use of information media and also socialization to society as a whole. Advice can be given i.e. so soon done, community capacity development alternatives form discussions, the approach to community efforts, the use of social media and media information on the Board up to date as well as establish continuous communication.

Keywords: Model CLEAR, Participatory Planning, Program KOTAKU

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Vevi Martina
NIM : 6661132247
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 20 Februari 1995
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CLEAR DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (STUDI KASUS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN SERANG)** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, September 2017



Vevi Martina

LEMBAR PESETUJUAN

Nama : Vevi Martina

NTM : 6661132247


Judul Skripsi : **ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CLEAR DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (STUDI KASUS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN SERANG)**

Serang, September 2017

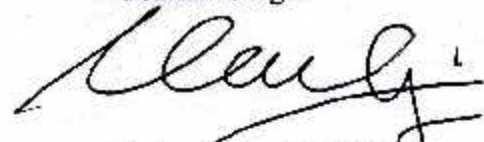
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Gandung Ismanto, S.Sos., MM
NIP. 197408072005011001

Pembimbing II


Maulana Yusuf, M.Si
NIP. 197603192005011004



Dr. Agus Sjafran, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

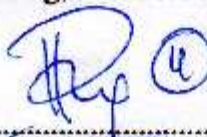
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : VEVI MARTINA
NIM : 6661132247
Judul Skripsi : **PERENCANAAN PARTISIPATIF DENGAN
MENGUNAKAN MODEL *CLEAR* DI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN (STUDI KASUS PROGRAM KOTA
TANPA KUMUH DI KELURAHAN SERANG)**

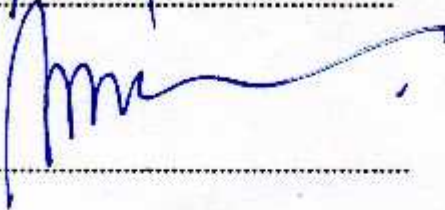
Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 02
Oktober 2017 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 02 Oktober 2017

Ketua Penguji
(Riny Handayani, M.Si)
NIP. 197601062006042007
Anggota :
(Titi Stiawati, M.Si)
NIP. 197011252005012001
Anggota :
(Dr. Gandung Ismanto, M.M)
NIP. 197408072005011001

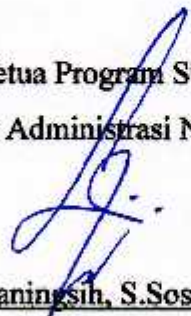






Mengetahui,


Dekan Fislip Untirta
Dr. Agus Sjaferi, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

MOTTO :

*“Laayukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa
... Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai kesanggupannya”
(QS. Al- Baqarah : 286)*

PERSEMBAHAN:

“Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku dan adikku yang tak lelah dalam memberikan dukungan moril dan doa selama aku berproses meraih gelar sarjanaku”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi kemudian solawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah mengiringi doa dan harapan penulis untuk mewujudkan terselesaikannya proposal penelitian skripsi ini yang berjudul **Perencanaan Partisipatif Dengan Model CLEAR Di Kota Serang (Studi Kasus Program Kotaku di Kelurahan Serang) Pengelolaan Pasar Kabupaten Serang.** Proposal penelitian skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program studi Ilmu Administrasi Negara. Sekalipun penulis menemukan hambatan dan kesulitan dalam memperoleh informasi akurasi data dari para narasumber namun disisi lain penulis juga sangat bersyukur karena banyak mendapat masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada bidang yang sedang diteliti oleh penulis. Untuk terwujudnya penulisan penelitian skripsi ini banyak pihak yang membantu penulis dalam memberikan motivasi baik waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuannya. Maka dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta atas curahan perhatian dan kasih sayangnya dan juga doa yang tak henti serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga suatu kebanggaan bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos.,M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, Ph.D., Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Rini Handayani, S.Sos.,M.Si., Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos.,M.M., sebagai dosen pembimbing I yang telah senantiasa memberikan arahan dan bimbingan secara sabar dan juga dukungan selama proses penyusunan skripsi.
10. Bapak Maulana Yusuf, S.Sos.,M.Si., sebagai dosen pembimbing II yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

11. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
12. Para staff Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan.
13. Bapak H. Tata selaku Ketua BKM Singandaru Kelurahan Serang, Bapak Entang, Bapak Wahab dan Bapak Boim selaku Koordinator Kota Program Kotaku Kota Serang, Bapak Lukman selaku staff Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Serang dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi, data dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data untuk penulis.
14. Kepada orang tua, adikku dan Muhamad Adi yang selalu memberi kasih sayang serta motivasi.
15. Kepada Kabinet Tokek (Galuh, Cici, Maria, Epi, Uci, Asep, Wildan, Fathoni) telah memberikan dukungan serta keceriaan dan kebahagiaan.
16. Teman-teman angkatan 2013 Ilmu Administrasi Negara selama menuntut ilmu. Terimakasih atas semua kenangan selama empat tahun perkuliahan kalian luar biasa
17. Kawan-kawan KKM Kependudukan 18 yang memberikan kenangan dan pengalaman atas waktu sebulannya bersama penulis.
18. Teman-Teman HIMANE 2014 dan BEM Fisip Untirta 2015 memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis.

19. Teman-Teman UKM Olahraga Untirta (Melinda, Hana, Natty, Faras, Ipong, Anisah,dll) yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Dengan ini penelitian skripsi telah selesai disusun.Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran saya harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi berikutnya. Penulis pun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti sendiri.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatu,

Serang, September 2017

Penulis

Vevi Martina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	24
1.3 Rumusan Masalah.....	25
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	26
1.4.1 Tujuan.....	26

1.4.2 Manfaat.....	26
1.5 Sistematika Penulisan	27

**BAB II. TINJAUAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

2.1 Teori Perencanaan	29
2.1.1 Jenis Perencanaan	31
2.2 Teori Pembangunan.....	33
2.3 Teori Perencanaan Pembangunan.....	37
2.3.1 Unsur Pokok Dalam perencanaan Pembangunan	39
2.3.2 Tahap – Tahap Perencanaan Pembangunan	41
2.4 Teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif.....	44
2.4.1 Prinsip – Prinsip Perencanaan Prtisipatif.....	47
2.5 Partisipasi.....	51
2.5.1 Tingkat Partisipasi.....	55
2.5.2 Model Partisipasi.....	58
2.6 Pemukiman Kumuh.....	63
2.7 Program Kotaku	65
2.7.1 Tujuan Program.....	66
2.7.2 Strategi Dasar dan Strategi Operasional Program Kotaku ..	68
2.7.3 Prinsip – Prinsip Dasar Program kotaku	69
2.7.4 Komponen Program	69

2.7.5 Penanganan Pemukiman Kumuh.....	75
2.7.6 Lokasi.....	76
2.7.7 Tahapan Penyelenggaraan Program	77
2.7.8 Pembiayaan Penyelenggaraan program.....	82
2.7.9 Proses Penganggaran.....	82
2.7.10 Struktur Organisasi Pengelola Program Kotaku.....	84
2.7.11 Perencanaan Partisipatif Dalam Program Kotaku	84
2.8 Penelitian Terdahulu	89
2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian	94
2.10 Asumsi Dasar	96

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	97
3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian	98
3.3 Lokasi Penelitian	98
3.4 Variabel Penelitian / Fenomena Yang Diamati	99
3.4.1 Definisi Konsep	99
3.4.2 Definisi Operasional.....	101
3.5 Instrumen Penelitian	103
3.6 Informan Penelitian	104
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	106

3.7.1 Teknik Pengolahan Data.....	106
3.7.2 Analisis Data.....	111
3.7.3 Uji Keabsahan Data.....	115
3.8 Jadwal Penelitian	117

BAB IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelian	119
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Serang.....	119
4.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Serang	143
4.1.3 Deskripsi Data Penelitian	151
4.1.4 Daftar Informan Penelitian	154
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	155
4.2.1 Indikator <i>Can do (Have The Resources and Knowledge To Participate)</i>	157
4.2.2 Indikator <i>Like Do (Have a Sense of Attachment That Reinforces Participation)</i>	163
4.2.3 Indikator <i>Enable (To are Provided with The Opportunity for Participation)</i>	170
4.2.4 Indikator <i>Asked To (are Mobilized Through Public Agency and Civil Chennels)</i>	177

4.2.5 Indikator <i>Responded To (See Evidence That Their Views Have Been Considered)</i>	183
4.3 Pembahasan	188

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	217
5.2 Saran	220

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Informan	
Lampiran 2 <i>Membercheck</i>	
Lampiran 3. Dokumentasi.....	
Lampiran 4. Peta rencana penanganan kumuh program KOTAKU Kelurahan Serang.....	
Lampiran 5. Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016.....	
Lampiran 6. Indikasi Program Kegiatan Ekonomi	
Lampiran 7. Indikasi Program Kegiatan Sosial.....	
Lampiran 8. Catatan Bimbingan.....	
Lampiran 9. Petunjuk pelaksanaan pogram KOTAKU Tingkat Kelurahan..	
Lampiran 10. Proposal Penguatan Media Warga Kelurahan Serang.....	
Lampiran 11. PP Nomor 69 Tahun 1996.....	
Lampiran 12. Kepadatan Penduduk Kelurahan Serang Tahun 2016.....	
Lampiran 13. Proses Penetapan Kawasan prioritas kumuh.....	
Lampiran 14. Riwayat Hidup.....	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Ilustrasi Penanganan Permukiman Kumuh Multi Sektor dan Multi Aktor	2
Gambar 1.2 Alur Organisasi Pengendali Pelaksanaan Program KOTAKU	3
Gambar 1.3 Persebaran Permukiman Kumuh di Indonesia Tahun 2016	9
Gambar 1.4 Kondisi drainase di Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang Tahun 2016.....	20
Gambar 1.5 Kondisi salah satu Tempat Pembuangan Sampah di Kam- pung Tirtalaya Kelurahan Serang.....	21
Gambar 1.6 Presentase Jumlah Penduduk Kampung Tirtalaya Kelurahan Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	23
Gambar 2.1 Langkah-langkah Perencanaan Partisipatif	42
Gambar 2.2 Integrasi Perencanaan Penanganan Kumuh	71
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengelolaan Program KOTAKU	84
Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran	95
Gambar 3.1 Proses Analisis Data.....	111
Gambar 4.1 Letak geografis dan Batas administrasi wilayah Kelurahan Serang	118

Gambar 4.2 Peta Kontur Kelurahan Serang.....	120
Gambar 4.3 Peta Persebaran Kepadatan Penduduk Kelurahan Serang Tahun 2016.....	122
Gambar 4.4 Kondisi drainase di Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang Tahun 2016.....	124
Gambar 4.5 Kondisi Pembuangan Sampah Kelurahan Serang Tahun 2016.....	127
Gambar 4.6 Kondisi Jalan Lingkungan di Kelurahan Serang Tahun 2016.....	132
Gambar 4.7 Salah satu Pusat Perbelanjaan di Kelurahan Serang	137
Gambar 4.8 Kegiatan Swadaya masyarakat pembangunan Jembatan dan pemugaran makam di Lingkungan Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang Tahun 2017	196

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2015	12
Tabel 1.2 Luasan Kawasan Kumuh di Kota Serang Tahun 2016	13
Tabel 1.3 Luasan Kawasan Kumuh di Kecamatan Serang 2016	14
Tabel 1.4 Lokasi Kawasan Kumuh tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Kota Serang Tahun 2016.....	14
Tabel 1.5 Kepadatan Penduduk, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Kelurahan Serang Tahun 2016	15
Tabel 1.6 Jumlah dan Tipe Bangunan Kelurahan Serang Tahun 2015...	18
Tabel 1.7 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kelurahan Serang, Tahun 2015	19
Tabel 1.8 Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Serang Tahun 2016	22
Tabel 3.1 Deskripsi Informan	104
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Penelitian.....	106
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	117
Tabel 4.1 Kesesuaian Peruntukan Lahan Perkotaan berdasarkan Kemi ringan (<i>Skala Mabbery</i>).....	121

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2015.....	124
Tabel 4.3 Jumlah Pemanfaat dan Sumber Air di Kelurahan Serang Tahun 2016	131
Tabel 4.4 Struktur Penduduk Kampung TirtalayaKelurahan Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	133
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Serang Tahun 2016	134
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Serang Berdasarkan Mata Penc aharian Tahun 2016	135
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Serang berdasarkan Agama Tahun 2016.....	136
Tabel 4.8 Daftar susunan Pengurus BKM Singandaru Tahun 2016	140
Tabel 4.7 Daftar Informan.....	153
Tabel 4.9 Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Serang Tahun 2016	158
Tabel 4.10 Rekapitulasi Pembahasan.....	213

DAFTAR SINGKATAN

A	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah
	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
B	BBM	: Bahan Bakar Minyak
	BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
	Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
	BLM	: Bantuan Langsung Mandiri
	BPS	: Badan Pusat Statistik
C	CCMU	: <i>Central Collaboration Management Unit</i>
	CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
D	DAMAJA	: Daerah Manfaat Jalan
	DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
F	Faskel	: Fasilitator Kelurahan
	FGD	: <i>Focus group discussion</i>
H	Ha	: Hektar are
J	Jl.	: Jalan
K	Kab	: Kabupaten
	KEMENKEU	: Kementerian Keuangan
	KK	: Kepala Keluarga
	Km	: Kilometer
	KOTAKU	: Kota Tanpa Kumuh
	KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat

L	L	: Laki-laki
	LCMU	: <i>Local Collaboration Management Unit</i>
	LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat
	LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
M	M	: Meter
	M ²	: Meter Persegi
	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Mdpl	: Meter diatas permukaan Laut
	Mm	: Milimeter
	MOU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
	N	NGO
NUSP-2		: <i>Neighborhood Upgrading Action Plan-2</i>
U	UPK	: Unit Pelaksana Keuangan
	UPL	: Unit Pelaksana Lingkungan
	UPS	: Unit Pelaksana Sosial
	UU	: Undang-Undang
P	P	: Perempuan
	PAM	: Perusahan Air Minum
	Parpol	: Partai Politik
	PCMU	: <i>Provincial Collaboration Management</i>
	PDAM	: Perusahan Daerah Air minum
	Pemprov	: Pemerintah Provinsi
	Pemda	: Pemerintah Daerah
	PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

	Pimkol	:Pimpinan Kolektif
	PIP	: Pembangunan Infrastruktur Permukiman
	PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
	PNPM-MP	: Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Masyarakat Perkotaan
	Pokja PKP	:Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pokja PS	: Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya
	PSU	:Prasarana Umum
	PUPR	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
R	RAB	: Rencana Anggaran Biaya
	Rencana O & P	: Rencana
	RKM	: Rembuk Kesiapan Masyarakat
	RPJM	: Rencana Jangka Menengah
	RPK	: Refleksi Perkara Kritis
	RP2KPKP	:Rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas permukiman kumuh perkotaan
	RT	:Rukun Tetangga
	RW	:Rukun Warga
S	SDGs	: <i>Sustainable Developments Goals</i>
	SDM	: Sumber Daya Manusia
	SK	: Surat Keputusan
	SKPD	:Satuan Kerja Perangkat Daerah
	SLTP	:Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
	SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
	SLTU	: Sekolah Lanjutan Tingkat Umum

	SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
	SMU	: Sekolah Menengah Umum
T	TAPD	: Tim Anggaran Pembangunan Daerah
	TPA	: Tempat Pengajian Anak
	TPS	: Tempat pembuangan sampah sementara
	TIPP	: Tim Inti Perencanaan Partisipatif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

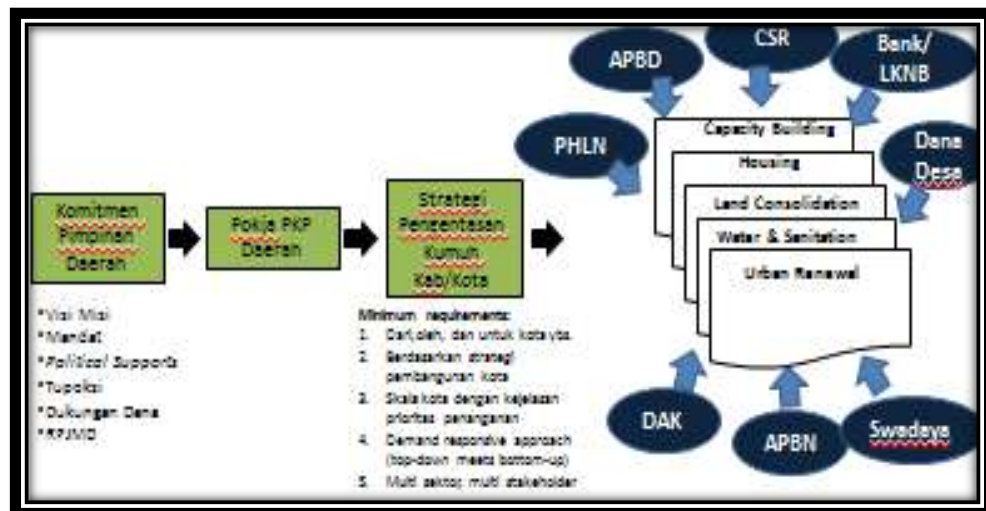
Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur bagian dari proses pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan sistem perencanaan pembangunan yang mana dalam tujuannya, salah satunya adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan *top-down* menjadi pembangunan berbasis masyarakat (*bottom-up*). Pendekatan utama model pembangunan *bottom-up* adalah model partisipatoris, yaitu model yang melibatkan rakyat dalam rangkaian proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri, sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus di laksanakan oleh pelaku pembangunan.

Kebijakan pemerintah dalam menempatkan masyarakat sebagai salah satu instrumen perencanaan, salah satunya adalah Program Kota Tanpa

Kumuh (Program KOTAKU). Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi basis penanganan permukiman kumuh, dimana dalam pelaksanaannya mengusung konsep Kolaboratif multi aktor dan multi sektor. Berikut ilustrasi penanganan permukiman kumuh dalam multi sektor dan multi aktor dalam program KOTAKU. ¹

Gambar 1.1
Ilustrasi Penanganan Permukiman Kumuh Multi Sektor dan Multi Aktor



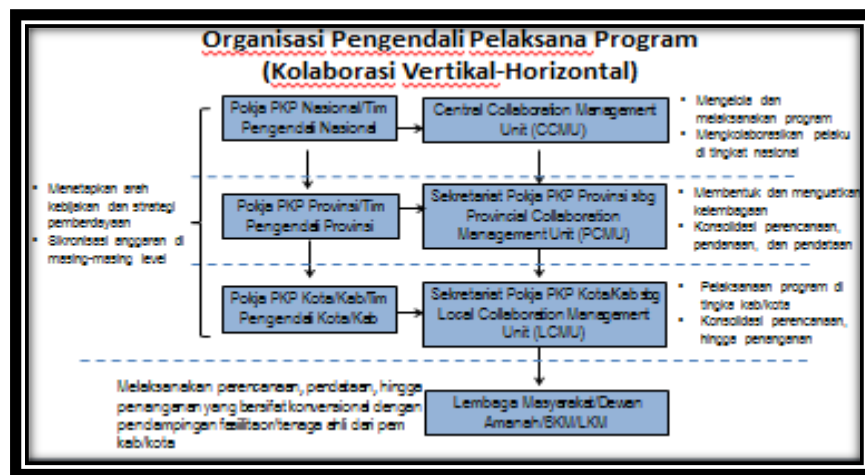
Sumber : Bappenas Tahun 2016

Gambar 1.1 di atas terlihat bagaimana kolaborasi multi aktor dan sektor tersebut dalam penanganan permukiman kumuh Program KOTAKU. Kolaborasi Vertikal-Horizontal dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Masyarakat untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Organisasi Pengendali

¹ Draft Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan berkelanjutan (Bappenas 2016)

Pelaksanaan Program, dimana alurnya dapat dilihat dalam Gambar 1.2 berikut.²

Gambar 1.2
Alur Organisasi Pengendali Pelaksanaan Program KOTAKU



Sumber : Bappenas Tahun 2016

Gambar 1.2 di atas menggambarkan alur organisasi pengendali pelaksanaan program yang dimulai dari Tingkat Nasional sampai kepada Masyarakat/BKM. Dari tingkat Nasional, Tim Pengendali Nasional (Pokja PKP Nasional) dan *Central Collaboration Management Unit (CCMU)* yang berperan untuk mengelola dan melaksanakan program serta mengkolaborasi pelaku di tingkat nasional. Di tingkat Provinsi, Tim Pengendali Provinsi/Pokja PKP Provinsi dan Sekretariat Pokja PKP Provinsi sebagai *Provincial Collaboration Management (PCMU)* yang berperan untuk membentuk dan menguatkan kelembagaan serta konsolidasi

² Draft Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan berkelanjutan (Bappenas 2016)

perencanaan, pendanaan dan pendataan. Di tingkat Kab/ Kota. Tim Pengendali Kota/Kab/ Pokja PKP Kota dan Sekretariat Pokja PKP Kota/Kab sebagai *Local Collaboration Management Unit* (LCMU) yang berperan untuk pelaksanaan program di tingkat Kab/Kota serta Konsolidasi perencanaan hingga penanganan. Ketiga tingkatan tersebut, selain peran di atas, memiliki peran lain yakni menetapkan arah kebijakan dan strategi pemberdayaan dan sinkronisasi anggaran di masing-masing level. Di tingkat masyarakat, Lembaga Masyarakat/Dewan Amanah/BKM/LKM sebagai wadah atau organisasi representasi masyarakat, dikatakan representatif karena keanggotaannya dari seluruh lapisan masyarakat dan kepemimpinan bersifat kolektif artinya sukarela dan tanpa adanya pencaloan didalamnya. BKM memiliki peran melaksanakan perencanaan, pendataan, hingga penanganan yang bersifat konvensional dengan pendampingan fasilitator/tenaga ahli dari pemerintah Kab/Kota.³

Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) memiliki peran strategis dalam percepatan penanganan kumuh. Dilakukannya revitalisasi peran BKM guna mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan penanganan kumuh di wilayahnya. Revitalisasi adalah sesuatu yang pernah hidup dan dihidupkan kembali, namun revitalisasi disini, membangun sesuatu yang baru dengan lembaga (BKM) yang pernah ada dan fungsinya bergeser dari penanggulangan kemiskinan menjadi penanganan kumuh. Peralihan fungsi tersebut, *berimbas* pada keragaman tugas BKM saat ini. Tugas tersebut meliputi; (1) menyusun

³ Draft Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan berkelanjutan (Bappenas 2016)

baseline kumuh, Profil Kumuh dan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP); (2) membuat rencana tindak (*action plan*); (3) menjalankan *chanelling* rencana penganggaran dengan Pemda; (4) membangun infrastruktur untuk pengelolaan dan penanganan kumuh baru di sekitar lingkungannya serta memonitor evaluasi pelaksanaannya.

BKM adalah salah satu peninggalan program sebelumnya (PNPM-MP), dimana rancangan Program KOTAKU berpijak dari pengembangan program tersebut. Perbedaannya, apabila PNPM-MP berfokus pada pengentasan kemiskinan (sasaran hanya orang miskin) lain halnya dengan Program KOTAKU yang berfokus pada pengentasan permukiman kumuh. Perilaku kumuh tidak hanya ada di masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) namun masyarakat berpenghasilan tinggipun bisa termasuk di dalamnya. Contohnya pelanggaran terhadap aturan garis sepadan bangunan dalam mendirikan bangunan yang dapat dikategorikan kumuh. Maka sasaran Program KOTAKU bukan hanya berfokus pada masyarakat miskin melainkan berimbang/ menyeluruh. Selain itu, perbedaannya terletak pada kegiatan, apabila dahulu masyarakat menunggu dana BLM (Bantuan Langsung Mandiri) cair, lain halnya dengan sekarang. Kegiatan masyarakat beralih menjadi keterlibatannya dalam perencanaan-perencanaan program.

Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan diantaranya : (1) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dalam rangka perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta Revitalisasi BKM guna mendukung partisipasi aktif dalam percepatan penanganan kumuh di wilayahnya; (2)

Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda, dimana Pemda berperan sebagai *regulator, fasilitator, enabler* dan *steering* dalam penanganan kumuh dan gerakan 100-0-100 di wilayahnya; (3) Kolaborasi sinergis terutama membangun kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan swasta (CSR) termasuk penguatan Pokja permukiman kota; serta (4) Tridaya merupakan kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan meluasnya kumuh di Perkotaan dilakukan secara komprehensif, antara penanganan fisik/infrastruktur, pengembangan ekonomi (*Local economic development*) dan kegiatan sosial (aturan bersama, perubahan sikap dan perilaku, PHBS, dll). Melalui sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Terdapat 7+1 indikator perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi :

1. Keteraturan Bangunan
2. Jalan Lingkungan
3. Drainase Lingkungan
4. Penyediaan Air Bersih
5. Pengelolaan Persampahan
6. Pengelolaan Air Limbah
7. Pengamanan Kebakaran
8. Ruang Terbuka Publik

Dasar pelaksanaan program KOTAKU adalah amanat Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Penjabarannya yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Berangkat dari dasar pelaksanaan tersebut , Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Selain itu, Penanganan Permukiman Kumuh tertuang pula dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dengan *baseline* Kota Tanpa Kumuh 2025 yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien“

Hal tersebut dilakukan guna mencapai Target *Sustainable Developments Goals* yakni : (1) layak, aman, dan terjangkau untuk semua, termasuk

peningkatan kualitas permukiman kumuh; (2) Manajemen perencanaan permukiman yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat; (3) Akses universal dan pemerataan terhadap air minum yang terjangkau; dan (4) Akses universal dan pemerataan terhadap sanitasi layak, bebas BABS, dengan memperhatikan kesetaraan gender. Selain pencapaian target SDGs di atas, pengentasan kumuh dalam Program KOTAKU bermuara pada pencapaian target 100-0-100 seperti yang tertera dalam RPJMN 2015-2019. Target 100-0-100 tersebut meliputi : 100 untuk akses air minum, 0% untuk permukiman kumuh dan 100% untuk akses sanitasi layak. Target yang perlu ditangani diantaranya 95,6 Juta jiwa untuk akses air minum, 117 Juta Jiwa untuk sanitasi layak, 38.431 Ha untuk kawasan kumuh dan Rumah Tangga Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3,4 Juta Jiwa.⁴ Sedangkan di Tahun 2016 luasan kawasan kumuh seluas 35.291 Ha. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.⁵

Data di atas menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan dasar perkotaan yang merupakan indikator kekumuhan, seperti jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase, masih rendah. Sedangkan populasi perkotaan di Indonesia meningkat tajam antara Tahun 2000-2010, dari 7400 orang/km² menjadi 9400 orang/km². Diestimasikan 68% penduduk

⁴ Sumber Data: BPS 2014, MDGs 2015, dan berbagai publikasi

⁵ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015

Program KOTAKU dilaksanakan di 271 Kab/Kota di 34 Provinsi⁷. Provinsi Banten merupakan satu dari 34 Provinsi, dimana Program Kotaku dilaksanakan. Untuk mengurangi permukiman yang tidak layak huni, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas PUPR & Permukiman Provinsi Banten akan membenahi permasalahan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Provinsi Banten terdiri atas 4 (empat) kabupaten dan 4 kota, yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan, untuk lokasi daerah kumuh terbesar berada di Kota Serang, yang *notabene* sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.⁸

Kota Serang mempunyai kedudukan strategis, berada di jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera juga dilintasi jalan Negara lintas Jakarta-Merak serta dilintasi jalur kereta api lintas Jakarta-Merak. Selain itu pula Kota Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdasarkan kecenderungan tersebut struktur tata ruang Kota Serang adalah sebagai berikut : (1) Wilayah Serang bagian tengah cenderung berkembang sebagai pusat pemerintahan, permukiman perkotaan pelayanan perdagangan dan jasa, pusat koleksi dan distribusi terpusat di Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya dengan wilayah pendukungnya adalah

⁷ Surat Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016

⁸ diungkap Kepala Satker Penataan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Banten, Muju Tahid disadur dari <http://www.kabar6.com/banten/serang/14403-400-hektare-wilayah-kota-di-banten-kumuh> diakses pada tanggal 8 Oktober 2017 pukul 15.39 WIB

Kecamatan Kasemen; (2) Wilayah Serang bagian Selatan cenderung berkembang membentuk pusat pertumbuhan baru terutama pada wilayah yang berdekatan dengan kawasan KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten), selain itu kegiatan permukiman baik yang dibangun oleh masyarakat secara pribadi maupun oleh pengembang diperkirakan akan semakin pesat, keberadaan permukiman di wilayah selatan dapat menarik kegiatan perdagangan dan jasa untuk melayani segala kebutuhan masyarakat. Simpul utama bagi pertumbuhan di wilayah Serang Bagian Selatan diperkirakan berada di Kecamatan Curug dan sekitarnya; (3) Wilayah Serang bagian barat cenderung berkembang dengan kegiatan utama, pusat permukiman, perdagangan dan jasa, potensi pertanian lahan kering, kawasan lindung, kawasan pariwisata. Simpul pertumbuhan Serang Barat adalah Kecamatan Taktakan; (4) Wilayah Serang bagian timur cenderung berkembang dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan. Pusat pertumbuhannya adalah Cipocok Jaya. Sebagai wilayah pendukungnya adalah Kecamatan Walantaka; (5) Wilayah Serang Bagian Utara cenderung berkembang dengan dominasi kegiatan permukiman sekaligus pula berfungsi sebagai daerah penyangga dari kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah tengah Kota Serang dengan kegiatan perdagangan skala kecil.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dinilai bahwa kecenderungan permukiman Kota Serang lebih banyak dipengaruhi kegiatan industri, pemerintah, maupun perdagangan. Perkembangan Kota Serang cukup pesat

diiringi dengan tingginya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota, tidak terkecuali dengan perumahan dan permukiman. Selain itu sebaran penduduk yang tidak merata, dilihat dari kepadatan penduduk yang tidak sama dengan perwilayah.

Tabel 1.1
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)
1.	Curug	39,4	1.272
2.	Walantaka	40,99	2.139
3.	Cipocok Jaya	31,54	3.211
4.	Serang	25,88	8.595
5.	Taktakan	57,98	1.511
6.	Kasemen	56,36	1.669

Sumber : BPS Kota Serang, 2016

Kawasan permukiman kumuh sebagian besar terdapat di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan pada umumnya menempati kawasan-kawasan yang strategis seperti dekat dengan pusat kota, dekat dengan pusat perdagangan dan jasa namun ada juga kawasan kumuh di sekitar pesisir pantai dan pedesaan, pada umumnya penduduk yang mendiami kawasan kumuh bermata pencaharian sebagai pedagang kecil, nelayan dan buruh tani dengan tingkat pendapatan relatif kecil. Berdasarkan lokasi kawasan kumuh yang masuk dalam wilayah pusat Kota Serang terdapat di Kecamatan Taktakan, Serang dan Cipocok Jaya. Sedangkan sisanya menempati kawasan kumuh yang berada di sekitar pesisir pantai dan pedesaan.

Berdasarkan luas kawasan kumuh, di Kota Serang luasan tertinggi yakni Kecamatan Kasemen dengan 156,412 Ha Kawasan Kumuh. Sedangkan untuk luas terendah adalah Kecamatan Walantaka dengan 47,999 Ha. Luasan Kumuh di Kota Serang menurut Kecamatan tahun 2016 dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Luasan Kawasan Kumuh di Kota Serang 2016

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh (Ha.)	Baseline
1	CIPOCOK JAYA	56,56	56,56
2	CURUG	146,881	146,881
3	KASEMEN	156,412	156,412
4	SERANG	59,706	59,706
5	TAKTAKAN	144,52	144,52
6	WALANTAKA	47,999	47,999
		612,078	612,078

Sumber : RPLP Kelurahan Serang Tahun 2016

Kecamatan Serang masuk ke dalam kategori luasan kawasan kumuh terendah yakni 59,706 Ha, namun dengan luasan wilayah yang hanya 25,88 Km² memiliki kepadatan tertinggi 8.595 orang/Km². Selain itu Kecamatan Serang sebagai ibukota Kecamatan Kota Serang, berkembang menjadi pusat pemerintahan, permukiman perkotaan, pelayanan perdagangan dan jasa serta pusat distribusi terpusat di Kota Serang yang mendorong migrasi masyarakat pendatang sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk tinggi yang menimbulkan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Serang. luas kawasan kumuh di Kecamatan Serang dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Luasan Kawasan Kumuh di Kecamatan Serang 2016

No.	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Luas Wilayah (Km ²)	Persentasi Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	CIMUNCANG	10.93	1,54	5,95
2	CIPARE	3.60	1,27	4,91
3	KAGUNGAN	8.15	1,27	4,91
4	LONTAR BARU	3.70	1,00	3,86
5	LOPANG	13.03	1,17	4,52
6	SERANG	2.45	4,90	18,93
7	SUKAWANA	7.16	1,77	6,84
8	SUMURPECUNG	2.23	3,26	12,60
9	TERONDOL	1.57	1,80	6,96
10	UNYUR	6.89	4,39	16,96

Sumber : Kecamatan Serang Tahun 2016

Selain itu, Kecamatan Serang masuk ke dalam lokasi kawasan kumuh yang tidak sesuai dengan Rencana Tata ruang di Kota Serang Tahun 2016. Kawasan kumuh ini terletak di 4 (empat) kelurahan pada 2 (dua) kecamatan dalam Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Lokasi Kawasan Kumuh tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Kota Serang Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Serang	Serang	3	1
		Unyur	4	1 dan 2
		Cimuncang	2	3
2.	Kasemen	Margaluyu	3	9

Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Tabel 1.3 di atas menunjukkan daftar wilayah yang masuk ke dalam lokasi kawasan kumuh yang tidak sesuai dengan Rencana Tata ruang di Kota

Serang Tahun 2016. Dari ke lima Kelurahan di atas, Kelurahan Serang masuk sebagai salah satu lokasi kumuh yang tidak sesuai dengan Rencana Tata ruang di Kota Serang Tahun 2016. Ketidaksiuaian tersebut dikarenakan kawasan tersebut yang seharusnya diarahkan untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai *buffer zone* bantaran Rel Kereta Api dan sungai, namun pemanfaatannya digunakan untuk lahan permukiman. Penggunaan lahan permukiman yang tinggi, dikarenakan posisi wilayah berada di bagian tengah Kota Serang. Dimana wilayah tengah Kota Serang sendiri berkembang sebagai pusat pemerintahan, permukiman perkotaan serta pelayanan perdagangan dan jasa. Hal tersebut berdampak pada perkembangan wilayah yang cukup pesat diiringi dengan tingginya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Kota. Selain itu Kelurahan Serang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Serang yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 8.595 penduduk/ km². Kepadatan penduduk di Kelurahan Serang sebesar 59 Ha/Jiwa. Di tunjukkan dalam Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
Jumlah Rukun Tetangga, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan
Kepadatan Penduduk, di Kelurahan Serang Tahun 2016

NO	Lokasi	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan penduduk (jiwa/Ha)
1.	RW 01	5	1666	25,38	66
2.	RW 02	5	1001	21,35	47
3.	RW 03	4	867	17,58	50
4.	RW 04	4	919	16,58	56
5.	RW 05	3	1103	13,81	80
6.	RW 06	6	1406	23,62	60
7.	RW 07	5	1964	21,35	92
8.	RW 08	3	709	14,01	51

9.	RW 09	6	1667	25,52	66
10.	RW 010	3	1134	11,81	97
11.	RW 011	4	1624	18,08	90
12.	RW 012	8	1608	30,59	53
13.	RW 013	3	667	12,81	53
14.	RW 014	2	487	9,54	52
15.	RW 015	5	1045	22,85	46
16.	RW 016	4	1149	18,58	62
17.	RW 017	6	1436	23,12	63
18.	RW 018	2	832	10,04	83
19.	RW 019	13	2531	49,73	51
20.	RW 020	4	1134	18,08	63
21.	RW 021	3	574	13,51	43
22.	RW 022	2	410	9,04	46
23.	RW 023	3	761	11,31	68
24.	RW 024	2	741	8,04	93
25.	RW 025	4	650	18,58	35
26.	RW 026	4	602	17,08	36

Sumber : diolah oleh peneliti ⁹

Kepadatan tersebut mendorong adanya pemanfaatan lahan yang besar untuk lahan permukiman yang berdampak pada timbulnya permasalahan penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah penumpukan sampah. walaupun luasan kumuh di Kelurahan Serang hanya sebesar 2.45 Ha namun dikarenakan luas wilayah Kelurahan Serang yang mendominasi luas Kecamatan Serang yakni 4,90 Km² dengan persentase 18,93% dan memiliki jumlah RW dan RT yang cukup besar yakni 26 RW dan 116 RT serta jumlah penduduk yang berjumlah 28687 jiwa, menjadikan Kelurahan Serang dijadikan sebagai Lokus Penelitian. Dari wilayah Kelurahan Serang yang terdiri dari 26 RW maka ditentukanlah kawasan yang menjadi prioritas penanganan kumuh dalam Program Kota Tanpa Kumuh. Penentuan tersebut dilakukan sesuai kriteria penetapan perumahan kumuh dan permukiman

⁹ bersumber dari RPLP Kelurahan Serang Tahun 2016

menurut Peraturan Menteri PUPR No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh maka yang masuk menjadi kawasan prioritas kumuh di Kelurahan Serang adalah kawasan RW.24 Kampung Tirtalaya. Dengan jumlah Penduduk 741 jiwa diantaranya Laki-laki 455 jiwa dan perempuan 286 jiwa sedangkan jumlah Kepala Keluarga 141 jiwa. Jumlah Penduduk Miskin/Masyarakat berpenghasilan Rendah 220 jiwa dengan luasan wilayah 8,04 Ha dengan kepadatan penduduk yakni 93 jiwa/Ha.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yang bersumber dari data dan informan terkait dalam hal partisipasi masyarakat dalam hal penanganan kawasan kumuh di wilayah prioritas kumuh di Kelurahan Serang yakni Kampung Tirtalaya RW 24, ditemukan permasalahan-permasalahan seperti berikut :

Pertama, Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan permukiman layak huni. Salah satu indikator kawasan permukiman yang kumuh yakni masih terdapat rumah tidak layak huni, begitupun di Kampung Tirtalaya Kelurahan Serang. Data terbaru menunjukkan terdapat 4.614 rumah penduduk yang terbagi atas Rumah dengan tipe Permanen dan Tidak Permanen. Jumlah tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.6 berikut.

¹⁰ Dapat dilihat dalam Tabel 1.5

Tabel 1.6
Jumlah dan Tipe Bangunan di Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan
Serang, Tahun 2015

NO	Kelurahan	Permanen	Tidak Permanen
1	Serang	4366	248

Sumber : RPLP Kelurahan Serang Tahun 2016

Dari 248 rumah tidak permanen, terdapat 3 rumah yang dikategorikan tidak layak huni di Kelurahan Serang. Rumah yang dikategorikan tidak layak huni yaitu material bangunan dari bahan papan, atap genteng, lantai masih tanah, sistem sanitasi yang buruk serta bercampurnya fungsi kamar tidur, ruang keluarga dan ruang makan bahkan dapur berjumlah 3 rumah. Rumah tidak layak huni masuk kedalam kategori rumah semi permanen. Dengan masih adanya rumah tidak layak huni di Kelurahan Serang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik permukiman layak huni masih rendah.

Kedua, Minimnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan. Kelurahan Serang memiliki luas lahan 472 Ha, dimana dalam peruntukkannya terbagi atas Permukiman, Persawahan dan Perindustrian. Untuk Permukiman seluas 300 Ha, Persawahan 20 Ha sedangkan untuk perindustrian seluas 70 Ha. Dengan luas 300 Ha, maka luas tersebut mendominasi luas dari total keseluruhan. Penggunaan lahan yang begitu besar memicu perluasan permukiman kumuh. Jenis dan Luas

penggunaan lahan di Kelurahan Serang Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kelurahan Serang, Tahun 2015

Jenis	Luas (Ha)
Permukiman	300
Persawahan	20
Perindustrian	170

Sumber : RPLP Kelurahan Serang Tahun 2016

Mendominasinya jumlah lahan untuk permukiman dibandingkan untuk lahan lainnya menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan/lingkungan masih rendah. Selain itu, di Kelurahan Serang masih terdapat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Begitu pula dengan Drainase yang ada. Drainase terbuka terdapat di sisi kanan dan kiri jalan dan di beberapa tempat melintas antara dinding rumah warga. Tetapi ada sebagian yang telah menyempit dan dangkal karena sedimentasi. Drainase yang tidak terintegrasi, rusak, terjadi sedimentasi dan tidak mengalir airnya adalah di lingkungan Tirtalaya RT01/RW24, dan Lingkungan Tirtalaya RT02/RW24. Kondisi saluran drainase seperti itu terjadi di sebagian wilayah permukiman penduduk di Kelurahan Serang.kondisi tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4
Kondisi drainase di Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang Tahun 2016



Sumber : RPLP Kelurahan Serang Tahun 2016

Selain permasalahan Drainase, Persoalan sampah merupakan permasalahan utama di Kelurahan Serang karna, setelah sampah diangkut dari rumah ke rumah, sampah kemudian dibuang ke suatu tempat untuk ditampung sementara. Lokasi pembuangan sementara itu sangat dekat dengan permukiman dan menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau tak sedap. Kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) dapat dilihat dalam gambar 1.5 berikut.

Gambar 1.5
Kondisi salah satu Tempat Pembuangan Sampah di Kampung
Tirtalaya Kelurahan Serang



Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Masyarakat saat ini belum melakukan pengelolaan sampah di lingkungannya. Sampah yang dihasilkan rumah tangga dikelola masing masing yang akan dibuang di TPA. Namun seringkali sampah di buang di beberapa tempat yang akhirnya menjadi TPS liar. Rata-rata sampah yang dihasilkan setiap rumah adalah 2 kantong plastik. Hampir di setiap RW terdapat satu lokasi yang dijadikan sebagai TPS, bahkan di sekitar aliran sungai yang terdapat di wilayah Kelurahan Serang khususnya di Kampung Tirtalaya yakni Sungai Cibanten, masih dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Sehingga dengan melihat kondisi drainase dan persoalan pengelolaan sampah diatas, menunjukkan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat akan pemeliharaan kesehatan lingkungan.

Ketiga, Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Tirtalaya Kelurahan Serang. Dimana masih terdapat penduduk yang tingkat pendidikannya tamat Sekolah Dasar yaitu berjumlah 3.400 atau sekitar 44,75%. Jumlah tersebut mendominasi jumlah tingkatan pendidikan lainnya. Penduduk yang Tamatan SMP jumlahnya yaitu 1.200 atau sekitar 15,80%. Adapun penduduk yang tingkat pendidikan Tamat SMA menempati posisi yaitu 2.700 atau sebesar 35,54% dari keseluruhan.

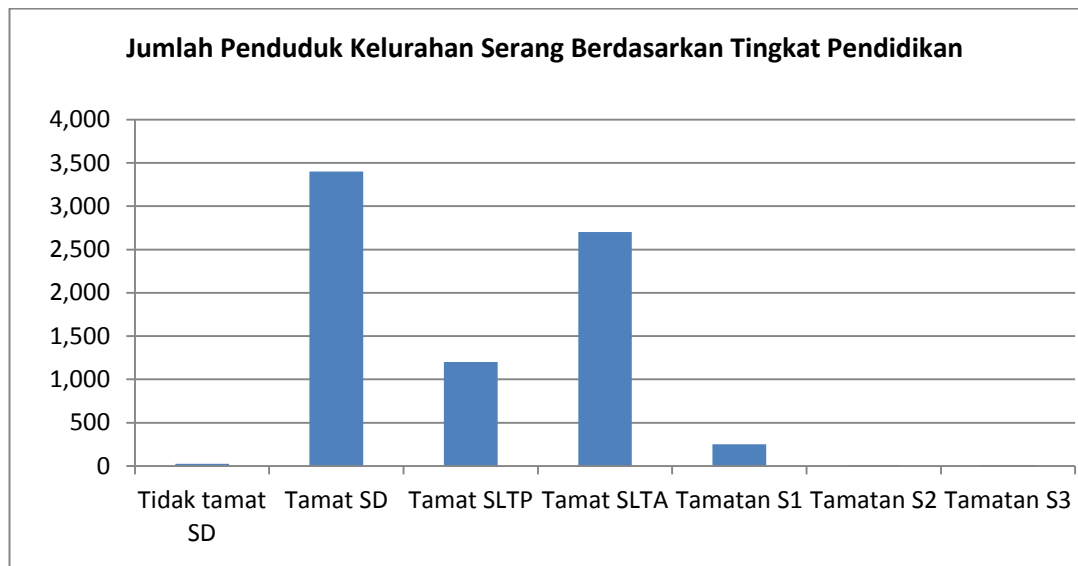
Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka dalam menilai suatu fenomena dimana pemahaman tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Dapat ditarik garis besarnya bahwa dengan pendidikan yang rendah maka partisipasinya pun akan rendah. Data mengenai struktur penduduk berdasarkan pendidikannya beserta persentasenya dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8
Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang Tahun 2016

Kategori	Jumlah	Presentase (%)
Tidak tamat SD	25	0,33
Tamat SD	3.400	44,75
Tamat SLTP	1.200	15,80
Tamat SLTA	2.700	35,54
Tamatan S1	250	3,29
Tamatan S2	12	0,16
Tamatan S3	10	0,13

Sumber : RPLP Kelurahan Serang Tahun 2016

Gambar 1.6
Presentase Jumlah Penduduk Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang
Berdasarkan Pendidikan 2016



Sumber : RPLP Kelurahan Serang Tahun 2016

Persoalan-persoalan diatas menjadi salah satu latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Serang. selain itu pemilihan *locus* di Kelurahan Serang dikarenakan : (1) Kelurahan atau tingkat dasar dari wilayah daerah merupakan *locus* yang tepat dipilih dalam penelitian ini dikarenakan dalam proses perencanaan partisipatif, Kelurahan merupakan Organisasi/ perangkat yang paling *lini* atau bawah bersentuhan langsung dengan masyarakat ; (2) memiliki jumlah Lokasi Kumuh terbanyak di Kota Serang ; (3) Kelurahan Serang merupakan salah satu wilayah yang terdapat program Kotaku; (4) Masih terdapatnya lingkungan kumuh dikarenakan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan masih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mendeskripsikannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: “Perencanaan Partisipatif Dengan Model *CLEAR* Di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan permukiman layak huni;
2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Tirtalaya RW 24 sebagai kawasan kumuh di Kelurahan Serang;

Dari identifikasi di atas, pembatasan masalahnya adalah Perencanaan Partisipatif Dengan Model *CLEAR* di Kota Serang (Studi Kasus Program Kotaku di Kelurahan Serang). Hal tersebut berkenaan karena dalam dalam penelitian ini yang ingin peneliti gali ialah perencanaan partisipatif di dalam Program KOTAKU, dapat diketahui dengan model *CLEAR* yang diajukan oleh Pratchett dan Stocker (dalam Karianga 2011:233) :

1. **Can Do** – have the resources and knowledge to participate;
2. **Like to** – have a sense of attachment that reinforces participation;
3. **Enable to** – are provided with the opportunity for participation;
4. **Asked to** – are mobilized through public agencies and civic channels;
5. **Responded to** – see evidence that their views have been considered.

Kerangka di atas dirangkum dengan singkatan *CLEAR*. Model *CLEAR* ini menunjukkan faktor mana dari kelima faktor tersebut yang diterapkan kemudian faktor mana yang belum mendapat cukup perhatian dan bagaimana hubungan antara kelima faktor tersebut dapat ditingkatkan dalam mengembangkan respon yang lebih strategis atas tantangan partisipasi masyarakat. Apabila kelima faktor di atas terpenuhi, maka partisipasi masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Serang dalam perencanaan partisipatif perencanaan program KOTAKU sudah berjalan dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis akan jauh lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena membantu memperjelas pengkajiannya, yakni “Bagaimanakah perencanaan partisipatif dengan menggunakan model *CLEAR* dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perencanaan partisipatif dalam program Kotaku di Kelurahan Serang.

1.4.2 Manfaat

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya. Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi perencanaan pembangunan daerah

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai saat ini. Selain itu, karya peneliti dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjaadi dasar penelitian, dinetifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis, serta sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Bab ini terdiri dari tiga *point*, yaitu deskripsi teori, kerangka berpikir, dan asumsi dasar penelitian. Dalam deskripsi teori akan dijelaskan tentang pendapat ahli mengenai teori-teori yang relevan terhadap masalah dan variable penelitian. Setelah memaprkan teori lalu peneliti membuat kerangka berpikir yang menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori. Kemudian dibuatlah asumsi dasar penelitian yang merupakan rumusan dari kajian teori serta kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, isntrumen penelitian, informan, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, lokasi, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik hasil wawancara maupun observasi lengkap dengan analisisnya

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan atas Perencanaan Partisipatif dengan Menggunakan Model *CLEAR* di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang) beserta paparan saran yang bisa disampaikan

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian skripsi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Bagian ini berisi lampiran hasil dokumentasi lapangan, matriks, wawancara, surat ijin penelitian, dan data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi

BAB II

TINJAUAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Teori Perencanaan

Pengertian Perencanaan menurut Garth dalam Isnadi (2007:27) menyatakan "*planning is the process of selecting and developing throw best course of action to acumplish on objective*" (perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik menguntungkan untuk mencapai tujuan). Menurut Siagian (1984), perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam bahasa yang masih sangat abstrak Waterston dalam Conyers (1994) mengatakan bahwa perencanaan adalah penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang bertindak sebagai dasar perilaku manusia. Rasionalitas pengetahuan yang dimaksud Waterston adalah ketika usaha tersebut secara sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini memberikan pengertian kepada kita bahwa perencanaan berkaitan dengan soal pilihan yang terbaik yang dicapai melalui sejumlah

tahapan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Pilihan inilah yang selanjutnya menjadi dasar operasionalisasi kegiatan selanjutnya.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2005, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Minzberg (1998) mengidentifikasi 5 pengertian tentang Perencanaan, yaitu (1) *planning is future thinking*, (2) *planning is controlling the future*, (3) *planning is decision making*, (4) *planning is integrated decision making*, (5) *planning is a formalized procedure to produce an articulated result, in the form of an integrated system of decisions*. Persoalan perencanaan sebagai persoalan pengambilan keputusan juga disinggung oleh Schaffer seperti dikutip oleh Conyers (1994). Apabila pengambilan keputusan akan menghasilkan output yang lebih baik, Schaffer mempersyaratkan adanya dukungan data yang lebih banyak, dan dari sini akan bisa diprediksi kemampuannya menciptakan hasil-hasil yang mungkin dicapai di masa datang. Data yang dimaksud disini adalah juga rasionalitas pengetahuan sebagaimana dinyatakan oleh Waterston. Kegunaannya adalah sebagai *backup* informasi yang menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dan bagaimana implikasinya di masa datang.

Sejalan dengan pendapat di atas Abe (2002) menguraikan beberapa dimensi perencanaan : *pertama*, dimensi waktu, yaitu suatu perencanaan sesungguhnya berbicara tentang masa depan. *Kedua*, dimensi tujuan, suatu

perencanaan pada dasarnya adalah rumusan mengenai pencapaian terhadap suatu tujuan. *Ketiga*, dimensi pengaturan, alokasi; suatu perencanaan memuat maksud-maksud untuk mengatur atau membuat alokasi termasuk menyusun suatu skala prioritas. *Keempat*, dimensi tindakan, inti dari perencanaan adalah tindakan apa yang akan dilakukan.

Dari beberapa definisi diatas, maka perencanaan dapat disimpulkan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan pengambilan keputusan secara rasional dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang dikerjakan dimasa mendatang.

2.1.1 Jenis Perencanaan

Perencanaan dapat dikelompokkan berdasarkan : (1) jangka waktu, (2) sifat perencanaan, (3) alokasi sumber daya, (4) tingkat keluwesan, (5) sistem ekonomi, (6) arus informasi dan (7) dimensi pendekatan (Arsyad, 1999, Kunarjo, 2002 dan Munir, 2002). Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu *pertama*, perencanaan jangka panjang di dalamnya ditetapkan nilai-nilai, target dan sasaran yang biasanya dirumuskan dalam bentuk visi dan misi serta strategi jangka panjang. *Kedua*, jangka menengah, merupakan kebijakan sebagai proyeksi dari target dan sasaran menengah sebagai arah dan pedoman penyusunan rencana jangka pendek. *Ketiga*, perencanaan jangka pendek, yang berisi rencana teknis yang di dalamnya telah ditetapkan target sasaran masing-masing sektor sekaligus

sumber daya yang harus disediakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan sifatnya, terdapat perencanaan komando (*planning by direction*) yaitu perencanaan yang mengedepankan instruksi dari atas ke bawah dan perencanaan dengan rangsangan (*planning by inducement*) yaitu perencanaan yang mengandalkan partisipasi dari bawahan atau dari warga masyarakat. Sedangkan berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama* perencanaan keuangan yaitu perencanaan yang bertujuan untuk memastikan apakah sumber keuangan yang ada benar-benar cukup untuk mendukung pelaksanaan perencanaan fisik. *Kedua*, perencanaan fisik yaitu perencanaan yang bertujuan untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan tingkat keluwesan terdapat perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara terdapat perencanaan dalam kapitalisme, perencanaan dalam sosialisme dan perencanaan dalam ekonomi campuran. Dilihat dari sudut pandang pelaksanaannya (arus informal), terdapat perencanaan sentralistik (*centralized*) atau *top-down planning* dan perencanaan desentralistik (*decentralized*) atau *bottom-up planning*. Berdasarkan dimensi pendekatan terdapat perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional dan perencanaan mikro.

2.2 Teori Pembangunan

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ndraha (1985), menyatakan bahwa pembangunan (*development*) adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran menuju suatu keadaan yang lebih baik. Sedangkan Korten (1998), mendefinisikan pembangunan sebagai proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Siagian (2003), pembangunan adalah suatu usaha atau merangkaikan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nations building*).

Lebih lanjut Bryan dan White (1989) menyatakan bahwa pembangunan yang *people centered* merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menentukan nasib dan masa depannya, ini berarti melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan. Dari pengertian tersebut pembangunan berwawasan *people centered* dalam implikasinya akan mencakup beberapa pengertian, antara lain (1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*); (2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan

(*equity*); (3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*); (4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan (*sustainability*); (5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualis*) dan saling menghormati (*interdependensi*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan yang berwawasan manusia (*community development*) terdapat dua pandangan yaitu : *pertama, production centered development*, yang lebih menempatkan manusia sebagai instrument atau obyek dalam pembangunan. Hal ini berorientasi pada produktivitas yang berhubungan dengan kemakmuran yang metimpah atau manusia dipandang sebagai faktor produksi. *Kedua, People centered development*, yang lebih menekankan pada pentingnya kemampuan (*empowerment*) manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia (Korten, 1998).

Selanjutnya Sumodiningrat (1999) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai suatu proses transformasi yang pada dasarnya akan menghasilkan surplus yang menjadi sumber peningkatan kesejahteraan secara merata. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal tersebut akan terjadi apabila tiga asumsi dasar terpenuhi, yaitu :

- a. *full employment*, yaitu masyarakat diikutsertakan dalam semua sektor kegiatan pembangunan;
- b. *homogenitas*, artinya semua masyarakat mempunyai kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya;
- c. adanya efisiensi yang rasional, yaitu bekerjanya mekanisme pembangunan atau tanggung rasa, artinya interaksi antar pelaku pembangunan terjadi dalam keseimbangan sehingga imbalan yang diterima oleh pelaku pembangunan seimbang dengan pengorbanan yang telah dilakukannya.

Pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat dinamis dan multidimensional yang menyangkut sistem sosial secara keseluruhan. Pembangunan yang tidak dilaksanakan sesuai rencana akan menciptakan masalah-masalah sosial dan ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004), pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan, dalam artian bahwa pembangunan dapat menyebabkan pertumbuhan dan pertumbuhan akan dapat terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktifitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Keraf dalam Susanto (2003) mengatakan bahwa ada tiga prinsip utama menuju keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu: *pertama*, prinsip demokrasi, prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat. *Kedua*, prinsip Keadilan, prinsip ini menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil pembangunan. *Ketiga*, prinsip berkelanjutan, prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner, melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek.

Dari berbagai pernyataan dan pendapat tersebut di atas, paling tidak dapat ditarik suatu gambaran secara umum bahwa pada dasarnya pembangunan adalah:

- a. Merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam komunitas masyarakat suatu bangsa yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana;
- c. Berorientasi pada perubahan (*change*) dan pertumbuhan (*growth*);
- d. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (kapasitas) individu, sekelompok individu dan atau masyarakat dalam kerangka pembinaan bangsa (*nations building*) menuju perwujudan kesejahteraan rakyat.

2.3 Teori Perencanaan Pembangunan

Tjokroamidjojo (1996) mengemukakan pengertian perencanaan pembangunan sebagai suatu pengerahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Sedangkan Waterson sebagaimana dikutip Tjokroamidjojo (1996) mengemukakan bahwa Perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Pandangan lain yang lebih condong ke aspek ekonomis dikemukakan oleh Soegijoko et.al. (1997) bahwa pada dasarnya proses pembangunan merupakan perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan, usaha pemupukan modal dan penyusunan program investasi di berbagai sektor dengan mempertimbangkan aspek-aspek regional, pengembangan dan pembinaan institusional.

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penetapan rencana-rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih obyektif yang memuat strategi dasar, perkiraan sumber-sumber pembangunan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut Abe (2002) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan pergulatan daerah untuk merumuskan apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi cita-cita masyarakatnya, yang dipadukan dengan ketersediaan sumberdaya atau potensi yang dimiliki daerah. Perencanaan pembangunan daerah dengan sendirinya bukan sebagai penjabaran perencanaan nasional, melainkan konsep yang secara ideal dikembangkan dari aspirasi lokal, melalui proses yang partisipatif.

Dalam bahasanya Conyers (1994), menjelaskan bahwa konsep perencanaan memiliki tiga pengertian khusus yakni: *Pertama*, perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekedar membuat suatu dokumen rencana. Ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa dokumen perencanaan sebagai hal yang tidak berguna. Maksudnya adalah rencana seharusnya dianggap sebagai alat pelengkap dan bukan sekedar hasil akhir suatu kerja perencanaan. Selain itu, persiapan yang dibuat janganlah dianggap hanya sebagai satu-satunya kegiatan para perencana dan bahkan mungkin dianggap sebagai satu-satunya bentuk kegiatan mereka yang paling penting. *Kedua*, perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, bukan sekedar sesuatu yang dikerjakan sesekali saja. *Ketiga*, konsep perencanaan ini memiliki implikasi penting yang bertalian dengan konsep dan peran si perencana (*planner*). Seorang perencana haruslah bekerja erat dengan orang-orang lain yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk di dalamnya politisi, administrator dan masyarakat pada umumnya.

Abe (2002) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan daerah menurut Syahroni (2002) adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), secara terus menerus menganalisis kondisi, merumuskan tujuan, kebijakan, menyusun konsep strategi, menggunakan sumber daya yang tersedia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan. Kuncoro (2004) mengemukakan perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu menyasikan dan menyelaraskan keinginan dari berbagai komponen masyarakat di daerah yang bersangkutan.

2.3.1 Unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut Abe (2002), ada beberapa hal penting yang termuat dalam rumusan perencanaan, yaitu : gambaran mengenai situasi dan kondisi, serta kebutuhan dari masyarakat, tujuan dan target yang hendak dicapai, daya

dukung dan sumber daya yang dimiliki, detail langkah-langkah yang akan dilakukan dan anggaran. Dapat pula rumusan perencanaan dilengkapi dengan data mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu langkah, kendala-kendala dan upaya yang akan dilakukan (harus dilakukan) untuk mengatasi kendala tersebut.

Sedangkan Soekartawi (1990) mengemukakan bahwa dalam suatu perencanaan pembangunan terdapat beberapa unsur pokok yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar, sering juga disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan;
- b. Adanya kerangka rencana, seringkali disebut kerangka makro rencana;
- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan ini merupakan keterbatasan dalam usaha pembangunan, karena itu sangat perlu diperkirakan secara seksama;
- d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Berbagai kebijaksanaan harus dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Satu sama lain kebijakan tersebut harus serasi dan konsisten, terlebih lagi yang menyangkut kebijakan tentang fiskal dan penganggaran;
- e. Program investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral, misalnya di bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Penyusunan program ini secara

sektoral dilakukan berdasarkan suatu rencana yang bersifat lebih operasional;

- f. Administrasi negara yang dipergunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaannya. Penyempurnaan administrasi negara dan pembinaan sistem administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan sebagai kegiatan integral dari rencana pembangunan itu sendiri, termasuk pula didalamnya penelaahan terhadap mekanisme dan kelembagaan pelaksanaan pembangunan.

2.3.2 Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan

Menurut Abe (2005), perencanaan pembangunan mempunyai tahapan-tahapan antara lain: penyelidikan, perumusan permasalahan, menentukan tujuan dan target, mengidentifikasi sumberdaya (daya dukung), merumuskan rencana kerja, dan menentukan anggaran (*budget*) yang hendak digunakan dalam realisasi rencana. Dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Langkah-langkah Perencanaan Partisipatif



Langkah-langkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
4. Rumusan Tujuan, dimana tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.
5. Langkah rinci, dimana penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.

6. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

Sedangkan Blakely dalam Arsyad (2004) menyatakan bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam perencanaan adalah pengumpulan dan analisis data. Hal ini sangat logis karena data merupakan input yang sangat penting dan sangat mempengaruhi output yang dihasilkan. Jika kualitas inputnya jelek, maka pasti jelek pula outputnya. Jika kualitas inputnya baik, maka outputnya tergantung prosesnya.

Sedangkan Tjokroamidjojo (1994) mengemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan adalah sebagai berikut :

1. **Penyusunan rencana** yang terdiri dari: (1) Tinjauan keadaan, merupakan kegiatan berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya; (2) *Forecasting* (peramalan), yaitu merupakan perkiraan keadaan masa yang akan datang; (3) Penetapan tujuan dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan tersebut; (4) Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana; (5) Persetujuan Rencana.

2. **Penyusunan program rencana**

Merupakan tahap perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan-tujuan atau sasaran, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan tersebut.

3. Pelaksanaan rencana

Dalam tahap ini merupakan tahap untuk melaksanakan rencana dimana perlu dipertimbangkan juga kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kebijakan-kebijaksanaanpun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus perlu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

4. Pengawasan

Diperlukan suatu sistem monitoring dengan pelaporan dan *feedback* daripada pelaksanaan rencana.

5. Evaluasi

Tahap ini dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.

2.4 Teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Seiring dengan perkembangan demokrasi, maka faktor keterlibatan multi *stakeholders* dalam proses perencanaan semakin menguat. Tjokroamidjojo (1988) mengemukakan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat.

Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut Islamy (2001) karena dengan partisipasi masyarakat berarti:

1. Memberi kesempatan yang nyata kepada mereka untuk mempengaruhi pembuatan keputusan tentang masalah kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari dan mempersempit jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat.

2. Memperluas peluang pendidikan politik bagi masyarakat sebagai landasan bagi pendidikan demokrasi, sehingga rakyat menjadi terlatih dalam menyusun prioritas kebutuhan dan kepentingan yang berbeda.
3. Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam menangani urusan-urusan publik akan memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal.

Mengenai pendidikan kepada masyarakat, Conyers (1994) mengemukakan bahwa sangatlah penting dan diperlukan adanya komponen pendidikan dalam setiap bentuk perencanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat harus faham bagaimana sistem pengambilan keputusan bekerja, dan pilihan-pilihan apa saja yang ada bagi mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif. Sejalan dengan hal ini Suprajogo (2003) menyatakan bahwa dalam konteks otonomi daerah, masyarakat lokal yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi harus diberdayakan ataupun ditingkatkan kapasitasnya agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya.

Lebih lanjut Abe (2002) mengemukakan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yaitu ;

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat;
- b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik;
- c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Di sisi lain peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memerlukan beberapa prasyarat antara lain dalam bentuk kesiapan dari masyarakat. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Namun jika tidak dilakukan serangkaian upaya untuk mengembangkan pendidikan politik, maka keterlibatan rakyat secara langsung tidak akan memberi banyak arti, bahkan bisa jadi malah menjadi sumber masalah.

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu pendekatan perencanaan yang tujuannya berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sedangkan prosesnya melibatkan peran serta secara langsung atau tidak langsung segenap elemen masyarakat. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, yang bila dirumuskan dengan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusannya akan berpihak kepada rakyat. Suatu perencanaan yang ingin melibatkan kepentingan masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan di bawah permukaan dan menggantinya secara seksama, serta merumuskannya dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan masyarakat.

Hal tersebut di atas berarti, bahwa menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi untuk mentransformasikan kapasitas kesadaran dan ketrampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi diam, apatis, pasrah dan cenderung menyembunyikan maksud di bawah permukaan. Selama hal ini tidak terjadi, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai

fomalitas partisipatif, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi (Tjokroamidjojo, 2002).

2.4.1 Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif

Model-model perencanaan sebagaimana terungkap pada bagian sebelumnya pada garis besarnya mengabaikan posisi rakyat sebagai pihak yang seharusnya memiliki kedaulatan. Pengabaian posisi rakyat ini bertentangan dengan konsep pemberdayaan (*empowerment*) yang seharusnya adalah bagian dari proses dan definisi pembangunan itu sendiri. Dalam pandangan Bryan dan White (1989) mengelola peran serta (pemberdayaan) bukanlah semata-mata melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan atau dalam evaluasi proyek belaka. Dalam peran serta tersirat makna dan integritas keseluruhan proyek itu. Peran serta merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain, peran serta berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat, peran serta adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan.

Proses perencanaan sesungguhnya adalah perpaduan antara kebenaran ilmu pengetahuan yang menjadi landasan berpikir dengan kekuasaan (*power*) yang menjadi landasan legitimasi politik. Kondisi ini bisa menciptakan ketegangan di antara keduanya yang antara lain terlihat dari manajemen proses

perencanaan yang berkepanjangan dengan struktur kelembagaan yang terlampau rumit. Ini adalah harga yang memang harus dibayar untuk mendemokratiskan perencanaan, tetapi masyarakat bahkan aparat dan politisi kadang menjadi tidak sabar terhadap *output* dan *outcome* perencanaan. Terjadilah intervensi di luar proses perencanaan formal yang mendistorsi perencanaan yang dianggap sudah demokratis tersebut. Atas dasar itu, perencanaan partisipatif perlu memiliki prinsip organisasi dan manajemen yang efisien dan produktif, dengan tetap memperhitungkan nilai-nilai demokratis dalam perencanaan.

Prinsip lain yang patut diperhatikan adalah adanya jaringan kerja kebijakan (*policy network*). *Policy network* ini merupakan pola hubungan diantara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konsep ini interdependensi adalah kata kunci yang harus dipahami. Aktor-aktor saling berinterdependensi karena mereka tidak akan mampu mencapai tujuannya tanpa melibatkan sumberdaya yang dimiliki aktor lain. Interdependensi didasarkan pada distribusi sumberdaya di antara aktor-aktor tersebut, tujuan yang dicapai dan persepsi mereka terhadap ketergantungan sumberdaya. Informasi, tujuan dan sumber daya saling dipertukarkan dalam interaksi. Oleh karena proses interaksi sering berulang, maka proses pelembagaan akan terjadi, muncul penyamaan persepsi, pola partisipasi dan aturan interaksi berkembang dan ditetapkan secara resmi.

Konsep di atas tentang *policy network* membutuhkan prinsip transparansi, yakni keterbukaan di antara para aktor untuk secara jujur

mengungkap segala informasi dan resources yang dibutuhkan dalam proses perencanaan. Transparansi juga diperlukan pada tahap pengambilan keputusan karena pada tahap ini harus ada kejelasan argumen terhadap pemilihan alternatif kebijakan dengan berbagai macam implikasinya. Dengan kata lain, transparansi adalah persoalan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.

Sedangkan Abe (2002), untuk mengorganisasikan model ini (perencanaan partisipatif) perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan yakni :

1. Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa di antara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama. Sebab yang hendak disusun adalah rencana aksi bersama, dengan demikian sejak awal perlu mempunyai dukungan nyata, saling percaya dibutuhkan agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka, tidak merupakan ajang siasat.
2. Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara *fair* dan bebas, maka di antara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam kedudukan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun suatu suasana dan kondisi setara. Tujuan dasarnya adalah agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan.
3. Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (mereka peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Keputusan yang diambil

harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil.

4. Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada dusta dan kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi. Hal yang dipentingkan dalam soal ini adalah agar yang diungkapkan benar-benar sesuatu yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hasil rekayasa (cerita palsu).
5. Berproses dengan berdasarkan fakta, dengan sendirinya menuntut cara berpikir yang obyektif. Maksud dari berpikir obyektif adalah agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah dalam menggunakan pijakan.
6. Prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat yakni berfokus pada masalah-masalah masyarakat. Jika perencanaan dilakukan di tingkat desa, maka dengan sendirinya masalah yang dibahas berorientasi ke desa.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perencanaan partisipatif memiliki prinsip sebagai berikut: (1) berorientasi pada pemberdayaan (*empowerment*); (2) mengenal adanya desentralisasi sesuai fungsi kewenangan masing-masing; (3) diselenggarakan melalui organisasi dan manajemen perencanaan yang efisien dan produktif; (4) menjamin proses membangun *networking* berlangsung efektif; (5) mengakui transparansi.

Sedangkan dalam pelaksanaan proses perencanaan partisipatif harus memperhatikan prinsip sebagai berikut : (1) antar peserta harus saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama; (2) tiap peserta berkedudukan sama dalam forum; (3) tiap peserta bisa menyetujui hasil yang diperoleh; (4) Hasil keputusan tidak didasarkan atas dusta dan kebohongan; (5) proses berdasarkan fakta dan berpikir yang obyektif; (6) berfokus pada masalah-masalah kehidupan keseharian (masalah lokal).

2.5 Partisipasi

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *cepere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Huntington dan Nelson berpendapat sama bahwa partisipasi mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Karianga, 2011:213).

Partisipasi menurut Mikkelsen (dalam Adi) adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, dan diri mereka sendiri. Selain itu, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.

Partisipasi tidak hanya terbatas pada kegiatan politik di suatu negara saja. Partisipasi juga ada dalam kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosial,

hukum, keagamaan, lingkungan dan kegiatan lainnya. Setiap kegiatan memerlukan partisipasi untuk dapat dijalankan, baik itu partisipasi yang sifatnya sukarela atau dipaksa untuk ikut berpartisipasi. Tidak adanya keterlibatan individu ataupun partisipasi kolektif masyarakat, kegiatan tidak akan berarti apa-apa karena tidak ada yang menggerakkan Rumusan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriyahnya saja (Sastropetro, 1988: 11).

Davis mengemukakan definisi partisipasi sebagai berikut: *“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”*. Selanjutnya ia mengemukakan pula : *“there are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of participation, most of them do agree on the importance of these three ideas”*.

Pendapat tersebut dapat diterjemahkan bahwa Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat

dengan tiga buah gagasan tersebut. Adapun tiga buah gagasan yang penting yang dimaksud Davis adalah:

- a. Bahwa partisipasi, keikutsertaan, keterlibatan dan peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.
- c. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut menjadi segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*” (Sastropetro, 1988:13).

Tinjauan kedua pengertian partisipasi menurut WHO dan Davis bertentangan, ketika WHO mengatakan partisipasi hanya keterlibatan lahiriyah (fisik) saja. Sementara Davis menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan bukan hanya keterlibatan fisik saja. Bila seseorang dalam suatu lingkungan tidak dapat menghadiri kerjabakti di daerahnya, bukan berarti orang tersebut tidak berpartisipasi. Partisipasi yang bisa disumbangkan dapat saja berupa sumbangan lain seperti, menyumbangkan sejumlah uang untuk membeli makanan kecil untuk warga lain yang sedang kerja bakti atau langsung menyumbangkan makanan untuk warga yang bekerja bakti. Partisipasi menjadi berkembang bukan hanya mengenai keterlibatan fisik, pikiran dan perasaan saja. Bentuk keterlibatan menjadi lebih bervariasi seperti yang

disebutkan oleh Davis dalam jenis-jenis partisipasi sebagai berikut (Sastropetro, 1988: 16)

1. Pikiran (*Psychological Participation*);
2. Tenaga (*Physical Participation*);
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological and Physical Participation*);
4. Keahlian (*Participation with skill*);
5. Barang (*Material Participation*) dan;
6. Uang (*Money Participation*).

Menurut kamus Inggris, *participation* adalah pengambilan bagian, pengikutsertaan. Dengan demikian partisipatif adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) sampai kepada *monitoring* dan evaluasi (*Controlling*) selanjutnya disingkat dengan POAC.

Pengertian partisipasi dari beberapa ahli yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan mengambil bagian atau peranan secara langsung dalam seluruh tahapan proses kegiatan dengan menyumbangkan berupa pikiran, tenaga, uang, keahlian barang secara sukarela ataupun dipaksa agar mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Masyarakat sendiri yang mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi dan yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Setiap tahap proses penyelesaian masalah yang mereka hadapi akan berjalan sesuai yang mereka inginkan apabila mereka sendiri

yang terlibat dalam dalam proses penyelesaiannya, dimulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir yaitu evaluasi.

2.5.1 Tingkat Partisipasi

Menurut Pretty, J., ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal (tingkat partisipasi), yaitu (Karianga, 2011: 223):

1. **Partisipasi Pasif dan Manipulatif**, ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitaan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.
2. **Partisipasi Informatif**, disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.
3. **Partisipasi komunikatif**, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk mengajukan pandangan masyarakat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti.
4. **Partisipasi insentif**, masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukannya. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

5. **Partisipasi fungsional**, masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat bergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
6. **Partisipasi interaktif**, masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. **Partisipasi mandiri (*self mobilization*)**, masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan, yang terpenting masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan.

Sedangkan tingkat partisipasi disederhanakan oleh Arnstein (Karianga, 2011:244), ada tiga derajat partisipasi masyarakat, yaitu: (1) Tidak partisipatif (*nonparticipation*); (2) Derajat semu (*degrees of tokenism*) dan; (3) Kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*).

White mengemukakan 10 buah alasan tentang pentingnya partisipasi sebagai berikut (Sastropetro, 1988:33):

1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.
2. Dengan partisipasi pelayanan atau *service* dapat diberikan dengan biaya murah.

3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.
6. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan.
7. Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
9. Partisipasi membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian orang lain.
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Sastropetro mengatakan sehubungan dengan partisipasi agar efektif, masyarakat akan dapat bergerak untuk lebih berpartisipasi apabila: 1) partisipasi itu dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, 2) partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, 3) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu memenuhi keinginan masyarakat setempat, 4) dalam proses partisipasi masyarakat menjamin adanya kontrol yang dilakukan masyarakat (Karinga,2011:244).

Partisipasi yang ditawarkan oleh Sastropetro akan menjadi partisipasi yang lebih efektif apabila ada akses untuk berpartisipasi atau terbukanya kesempatan seluas- luasnya pada langkah awal, masyarakat yang akan

berpartisipasi memiliki kemampuan untuk terlibat, walaupun belum memiliki kemampuan terdapatnya kemauan yang nantinya kemampuan akan dilatih secara perlahan-lahan. Partisipasi juga harus difasilitasi sehingga ada kemauan atau keinginan masyarakat untuk terlibat. Namun karena tidak semua pemerintah, lembaga swadaya belum memiliki kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan partisipasi yang efektif maka munculah adanya ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi.

2.5.2 Model Partisipasi

Model CLEAR yang ditawarkan Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011:233), digunakan untuk mengidentifikasi lima faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi. Model ini didasarkan pada argumentasi bahwa keterlibatan masyarakat tergantung pada sumber daya dan akses yang dimiliki, sejauh mana mereka merasa terlibat dalam masyarakat yang lebih luas dan apakah mereka dibantu untuk berpartisipasi oleh organisasi-organisasi yang mendukung. Model ini menempatkan penekanan pada pemahaman partisipasi dari sudut pandang warga, apa yang diperlukan untuk berpartisipasi. Model ini adalah model *bottom-up*. Dimana penting bagi para pembuat kebijakan untuk memahami apa yang warga pikirkan tentang inisiatif partisipasi mereka dan bagaimana mereka mungkin dikembangkan atau ditingkatkan. Dengan demikian bertujuan untuk memungkinkan para pembuat kebijakan dan praktisi untuk memahami faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat keterlibatan masyarakat dan memahami mana kekuatan dan kelemahan yang ada pada sarana partisipasi serta membantu untuk mengidentifikasi kebijakan tanggapan yang mungkin dapat ditempuh. Model ini mengambil sikap diagnostik daripada menghakimi.

Model CLEAR berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dimana masyarakat :

1. ***Can Do*** – *have the resources and knowledge to participate;*
2. ***Like to*** – *have a sense of attachment that reinforces participation;*
3. ***Enable to*** – *are provided with the opportunity for participation;*
4. ***Asked to*** – *are mobilized through public agencies and civic channels;*
5. ***Responded to*** – *see evidence that their views have been considered*

Model *CLEAR* ini menunjukkan faktor mana dari kelima faktor tersebut yang diterapkan kemudian faktor mana yang belum mendapat cukup perhatian dan bagaimana hubungan antara kelima faktor tersebut dapat ditingkatkan dalam mengembangkan respon yang lebih strategis atas tantangan partisipasi masyarakat.

1. *Can Do*

Sebagian besar merujuk pada argumen mengenai status sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap partisipasi. Seseorang yang memiliki keterampilan yang sesuai dan sumber daya adalah mereka yang

lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi. Keterampilan ini berkisar pada kemampuan dan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum atau menulis surat sampai pada kemampuan mengatur kegiatan dan aktifitas menulis surat juga kegiatan yang penting. Keterampilan dan sumber daya lebih sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pekerja yang status sosial ekonominya juga tinggi. Tetapi, tidak satupun ketrampilan dan sumber daya harus berasal dari orang yang memiliki status sosial dan ekonominya tinggi. Hal tersebut juga dimungkinkan untuk umum, relawan ataupun komunitas untuk menembus keterbatasan status sosial ekonomi yang dimiliki untuk berpartisipasi. *Can do* dapat disampaikan sebagai upaya peningkatan kemampuan yang ditujukan bahwa masyarakat juga diberi dukungan untuk meningkatkan ketrampilan dan sumber daya yang dibutuhkan mereka untuk terlibat.

2. *Like To*

Bersandar pada gagasan bahwa orang-orang menjadi bagian dari sesuatu yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi. Apabila seseorang merasa menjadi bagian dari sesuatu maka mereka akan mau terlibat. Tetapi jika ia merasa dikecualikan atau dengan perasaan tidak diterima, maka ia dapat memutuskan untuk tidak terlibat atau tidak berpartisipasi. Jika keterlibatan hanya untuk orang tua atau untuk pria yang menyebabkan ketidaknyaman dan memutuskan untuk tidak mau ikut terlibat. Rasa kepercayaan, koneksi dan jaringan yang dapat

terhubung menjadi modal sosial untuk dapat berkerjasama secara efektif. Rasa kemasyarakatan dapat menjadi motivator yang kuat untuk berpartisipasi. Namun, mengingat banyaknya keragaman dalam masyarakat dan terdapatnya komunitas-komunitas apabila seseorang merasa tidak memiliki identitas dan memiliki perasaan menjadi orang luar dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi.

3. *Enable To*

Pada saat seseorang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kelompok, organisasi ataupun kegiatan. Kemudian apakah seseorang itu dimungkinkan oleh kelompok, organisasi ataupun kegiatan tersebut untuk dapat berpartisipasi dan terlibat di dalamnya. Kemampuan dan keinginan tersebut haruslah mendapat umpan balik dari kelompok, organisasi atau kegiatan yang ingin diikuti. Seseorang yang ingin dan mempunyai kemampuan berpartisipasi dalam sebuah partai politik, tetapi partai politik tersebut tidak membuka akses untuk orang tersebut untuk terlibat artinya tidak akan ada partisipasi apabila keduanya tidak saling membuka akses untuk berpartisipasi. Rendahnya partisipasi di Kelurahan Serang bisa saja dipengaruhi oleh penyedia program kurang memberi akses terhadap masyarakatnya untuk berpartisipasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan.

4. *Asked To*

Orang-orang cenderung menjadi terlibat secara teratur ketika masyarakat diminta untuk terlibat. Kesiapan masyarakat untuk

berpartisipasi seringkali bergantung pada apakah mereka didekati atau tidak dan bagaimana mereka didekati. Berbagai pilihan untuk keterlibatan partisipasi adalah penting karena beberapa orang lebih nyaman dengan beberapa bentuk keterlibatan seperti rapat umum, sementara yang lain lebih suka terlibat melalui diskusi online. Beberapa orang berpartisipasi untuk berbicara mengenai pengalaman dari masyarakatnya atau lingkungannya sementara yang lain ingin terlibat berdasarkan pengetahuan mereka tentang layanan tertentu sebagai pengguna. Partisipasi dapat dimobilisasi dengan menggunakan insentif (misal honorarium), melalui pembentukan rasa kewajiban atau dengan menawarkan bargaining/pertukaran.

5. *Responded To*

Orang-orang akan berpartisipasi secara berkelanjutan apabila mereka percaya bahwa keterlibatan mereka membuat sesuatu yang berbeda dan mencapai manfaat positif. Selain itu bagi orang-orang yang memutuskan untuk berpartisipasi mereka harus percaya bahwa mereka akan didengarkan dan tidak selalu setuju dengan suatu keputusan paling tidak pandangan-pandangan dari mereka telah diperhitungkan. Bagaimana para pemegang otoritas menimbang gagasan-gagasan atau pesan dari berbagai konsultasi sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan. Bagaimana perbedaan gagasan atau pendapat dari berbagai peserta yang terlebih dahulu di prioritaskan. Daya tanggap (*Responsiveness*) adalah tentang memastikan *feedback* yang mungkin

tidak selamanya positif. Masyarakat harus belajar untuk hidup dalam kekecewaan. Kepastian respon tergantung pada peran dari kualitas wakil terpilih dan pimpinan, musyawarah dan akuntabilitas untuk strategi pemberdayaan yang efektif.

2.6 Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Keteraturan bangunan

- b. Jalan Lingkungan;
- c. Drainase Lingkungan,
- d. Penyediaan Air Bersih/Minum;
- e. Pengelolaan Persampahan;
- f. Pengelolaan Air Limbah;
- g. Pengamanan Kebakaran;
- h. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

Permukiman kumuh merupakan gejala dari : (1) Ketimpangan desa dan kota, mengakibatkan terjadinya urbanisasi dari *Unskilled Labor*; (2) Kurangnya akses MBR terhadap ruang/lahan/rumah yang layak & terjangkau (sewa/milik); (3) Ketidakmampuan penyediaan infrastruktur dasar; (4) Lemahnya Perilaku Hidup Bersih & Sehat; (5) Lemahnya penegakan hukum; serta (6) Pemiaraan dalam jangka waktu lama. Kekumuhan berarti akumulasi faktor-faktor di atas, selain persoalan fisik.

Kunci keberhasilan penanganan kumuh diantaranya : (1) Memberdayakan partisipasi multi-stakeholder dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) Mengatasi kondisi eksisting seperti penanganan permukiman kumuh eksisting dan penguatan perencanaan yang dapat merespon kebutuhan pembangunan; (3) Mencegah permukiman kumuh dengan memperkuat integrasi pembangunan spasial dan

sosial-ekonomi; (4) Mengidentifikasi dan menangani persoalan lahan yang menjadi penghambat dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan; (5) Menguatkan institusi terkait penanganan permukiman kumuh untuk menjamin keberlanjutan penanganan.(UN-Habitat)¹

2.7 Program Kotaku

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atau disebut sebagai konsep kolaboratif.

Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU diharapkan menjadi *platform* kolaborasi yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di

¹ *United Nations Human Settlements Programme*

tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Pendekatan Program Kotaku diantaranya : (1) Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat, dalam rangka Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan Revitalisasi Peran BKM yang mendukung partisipasi aktif dalam percepatan penanganan kumuh di wilayahnya; (2).Pemda sebagai Nakhoda, untuk berperan sebagai *regulator, fasilitator, enabler* dan *steering* dalam penanganan kumuh dan gerakan 100-0-100 (100% untuk akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak) di wilayahnya; (3) Kolaborasi Sinergis, terutama membangun kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda dan swasta (*CSR*), termasuk penguatan Pokja Permukiman Kota; (4) Tridaya, kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan meluasnya kumuh di perkotaan dilakukan secara komprehensif, antara penanganan fisik/infrastruktur, pengembangan ekonomi (*Local Economic Development*) dan kegiatan sosial (aturan bersama, perubahan sikap & perilaku, PHBS, dll);

2.7.1 Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan

berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator *outcome* sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka

Publik);

2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

2.7.2 Strategi Dasar dan Strategi Operasional Program KOTAKU

1. Strategi Dasar

Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

2. Strategi Operasional

- 1) Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
- 3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
- 4) Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- 5) Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
- 6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;

- 7) Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- 8) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
- 9) Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan

2.7.3 Prinsip Prinsip dasar Program KOTAKU

1. Pemda sebagai Nakhoda
2. Perencanaan Yang Komprehensif
3. Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran
4. Partisipatif, Kreatif dan Inovatif
5. Pengelolaan Lingkungan Sosial yang menjamin keberlanjutan
6. Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik
7. Investasi Penanganan Permukiman Kumuh
8. Revitalisasi Peran BKM/LKM

2.7.4 Komponen Program

1. Pengembangan Kelembagaan, strategi dan Kebijakan

a. Pengembangan Kelembagaan

1. Penguatan manajemen program dengan memberi dukungan kepada lembaga koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU
2. Penguatan peran masing-masing lembaga terkait program di tingkat nasional maupun daerah selama persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan;
3. Kajian kelembagaan dan kapasitas di tingkat pusat & beberapa sampel Kab/Kota;

4. Penyusunan metode peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan dan materi advokasi yang dibutuhkan;
5. Sinkronisasi target RPJMN 2015-2019 terkait penanganan permukiman kumuh terhadap RPJM Daerah;
6. Pengembangan database nasional dan profil permukiman kumuh; Berbagi informasi dan pembelajaran melalui studi banding, workshop nasional/international dan kegiatan lainnya
7. Studi-studi strategis lainnya.

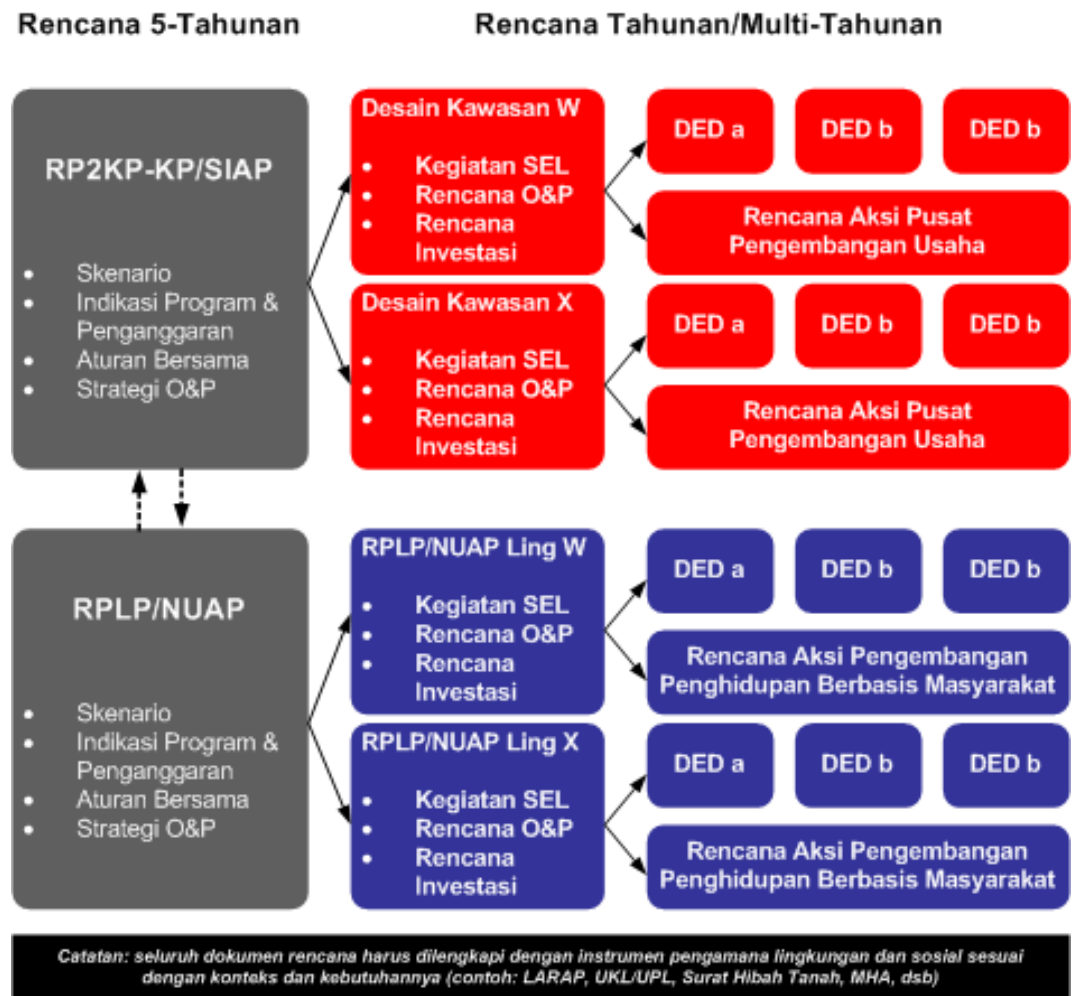
b. Pengembangan Strategi dan Kebijakan

1. Studi kebijakan strategis nasional untuk memfasilitasi pengembangan strategi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung keberlanjutan penanganan kumuh;
2. Pendampingan teknis tambahan untuk pengembangan strategi dan kebijakan nasional apabila ditemukan kasus-kasus di Kab/Kota yang tidak dapat dirumuskan solusinya dengan kerangka nasional yang ada.

2. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat,

termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi. Dimana integrasi perencanaan penanganan kumuh akan dijelaskan dalam gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2
Integrasi Perencanaan Penanganan Kumuh



Sumber : SE DJCK No.40 Tahun 2016 Tentang Program KOTAKU

Gambar diatas digunakan untuk :

- Mengakomodir seluruh program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya baik yang melalui pendekatan berbasis masyarakat maupun program reguler.
- Berkolaborasi dengan program pemerintah daerah/sector baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota

3. Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan

a. Infrastruktur Primer dan Sekunder termasuk Pengembangan Pusat Usaha di Kab/Kota Terpilih

1. peningkatan kualitas infrastruktur primer, sekunder, serta pembangunan infrastruktur penyambung antara sistem rumah tangga dan infrastruktur tersier dengan sistem sekunder dan primer yang mengacu pada indikator kumuh program KOTAKU
2. kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di kabupaten/kota terpilih

Fasilitasi Program KOTAKU untuk Pusat Pengembangan Usaha (PPU) :

1. Studi kelayakan untuk PPU;
2. Pembangunan PPU, mengadopsi skema program pilot BDC;
3. Dukungan pelatihan keterampilan khusus/*vocational* dalam pengembangan produk usaha unggulan oleh PPU yang telah dibangun.

b. Pembangunan kawasan permukiman baru bagi MBR²

Pembangunan kawasan permukiman baru (*New Sites Development/NSD*) bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (*developer*) dan lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian yang layak dan

² Khusus untuk Lokasi NSUP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan *New Site Development (NSD)*

terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di perkotaan. Dalam hal ini, NUSP-2 akan mengambil peran sebagai katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada 20 (lima) kota sasaran. Pembangunan kawasan permukiman baru tersebut melalui langkah-langkah :

1. Pemerintah daerah menyediakan lahan pengembangan permukiman baru dan memproses sertifikasi kavling lahan yang akan dihibahkan kepada keluarga tidak mampu (hibah sebagian atau seluruhnya) yang akan dijadikan sebagai jaminan/agunan kredit kepemilikan rumah;
2. Pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga keuangan lokal (bank) dan developer lokal terkait dengan pembiayaan dan pembangunan unit rumah serta penyaluran kredit kepemilikan rumah yang akan disediakan bagi keluarga miskin sasaran;
3. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan proses seleksi warga tidak mampu calon penerima manfaat secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan lembaga keswadayaan masyarakat lokal dibantu tim konsultan;
4. Pemerintah daerah mengajukan usulan program ke pemerintah pusat tentang pengembangan kawasan permukiman baru yang dilengkapi dengan : (i) surat bukti kepemilikan dan sertifikasi lahan; (ii) nota persetujuan DPRD Kota/Kabupaten tentang penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman baru; (iii) desain teknis rencana pembangunan; (iv) dokumentasi proses seleksi warga masyarakat penerima manfaat; dan (v) usulan skema pembiayaan pembangunan rumah dan fasilitasi kredit kepemilikan rumah

5. Pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan permukiman baru sesuai usulan program pemerintah daerah dengan menggunakan alokasi dana pinjaman NUSP-2

c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan skala lingkungan, yang dilaksanakan berbasis masyarakat;
2. Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di lokasi terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat dan RPLP/RTPLP.

Bentuk Kegiatan:

1. kegiatan pelayanan sosial (pelatihan, sosialisasi, pemasaran, dll);
2. kegiatan pelayanan infrastruktur produktif (showroom, pasar tradisional, pengelolaan sampah, dll);
3. kegiatan pelayanan ekonomi melalui dana bergulir KSM.

4. Dukungan pelaksanaan dan Bantuan Teknis

1. Pengadaan Konsultan Pendamping
2. Pengadaan konsultan individual : Korkot, Fasilitator
3. Pembiayaan kegiatan manajemen (audit, SIM, M&E, GIS, *Drone*, dll)
4. Evaluasi : Penyiapan data baseline dan survey lanjutan tentang kemampuan kelembagaan, akses ke prasarana dan pelayanan di lokasi sasaran program, serta kepuasan pemanfaat

Hal di atas dilakukan untuk memperkuat Kapasitas PMU dan Satker Pusat.

5. Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

Dukungan tersebut yakni memberikan keleluasaan kepada pemerintah melalui program KOTAKU apabila terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan seperti adanya kegiatan tambahan dari kebijakan kompensasi BBM dengan kegiatan infrastruktur padat karya, mengantisipasi bencana baik sebelum terjadi bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) dan/atau setelah bencana (rehabilitasi/rekonstruksi).

2.7.5 Penanganan Permukiman Kumuh

1. Pencegahan

1. Pengawasan dan Pengendalian

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2. Peningkatan Kualitas

Pola penanganannya yakni:

1. Pemugaran

Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.

2. Peremajaan

Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat.

3. Permukiman Kembali

Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia.

3. Pengelolaan

1. Pemeliharaan

Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/setiap orang.

2. Perbaikan

Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/setiap orang.

2.7.6 Lokasi

Dilaksanakan di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman** dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.

2. **Kegiatan pencegahan kumuh** dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan perkotaan di luar kel/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
3. **Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan** dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.

Khusus DKI Jakarta pelaksanaan KOTAKU yang melibatkan unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

2.7.7 Tahapan Penyelenggaraan Program

Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini beserta keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan detail metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat.

1. Tahap Persiapan

Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh. Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari:

a. Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan

1. Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat
2. Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional;
3. Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

b. Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran

1. Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program
2. Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU

c. Pengembangan Kebijakan dan PenguatanKelembagaan

1. Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapanganpendukung;
2. Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU (*Central Collaboration Management Unit*), Pokja PKP nasional dan daerah serta kelembagaanmasyarakat;
3. Pengembangan sistem informasi terpadu; dan
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan nasional.

Di tingkat kota/kabupaten tahap persiapan meliputi:

1. Penyepakatan MOU antara pemerintah daerah dengan dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Program KOTAKU.

MOU menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk apakah akan menggunakan rencana penanganan kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum dan tercantum dalam RPJM), merevisi, atau menyusun yang baru.

2. Lokakarya Sosialisasi Kabupaten/kota
3. Penggalangan Komitmen Para Pemangku Kepentingan
4. Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh
5. Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP

2. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rancangan penanganan dan pencegahan kumuh atau RP2KP-KP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP dan Rencana/desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Tahap perencanaan meliputi:

1. Persiapan perencanaan
2. Penyusunan RP2KP-KP dan RPLP
3. Penyusunan Rencana Detail/Teknis

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh kota/kabupaten dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Pelaksanaan mencakup:

1. Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervisi kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
3. Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P

4. Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka regulasi
2. Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, bangunan, dsb
3. Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.
4. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan system informasi dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh di tingkat kota/kabupaten, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KP-KP dan RPLP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun pencegahan, hasil2 kegiatan infrastruktur, capaian indikator kinerja, maupun informasi kelembagaan, pemrograman maupun penganggaran di tingkat kota/kabupaten. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu pada baseline data, hasil monitoring dan survey khusus untuk studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya.

2.7.8 Pembiayaan Penyelenggaraan Program

1. Pemerintah Pusat

1. Kementerian PUPR melalui APBN diperkirakan dapat memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan pendanaan
2. Ilustrasi awal menunjukkan potensi pendanaan dari pemerintah pusat untuk penanganan kumuh di kota-kota prioritas adalah sekitar Rp. 20-40 milyar/tahun/kota/kab

2. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)

1. Pemerintah Provinsi sekitar Rp. 5 Milyar per tahun atau sekitar 3-5% dari APBD Provinsi;
2. Pemerintah Kota/Kabupaten berkontribusi sekitar Rp. 2-15 milyar/tahun atau sekitar 2-5% dari APBD yang besarnya sekitar Rp. 120-300 milyar/tahun/kota/kab.

3. Swadaya Masyarakat dan Swasta

1. Masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk infrastruktur tersier dalam bentuk in cash maupun material dan tenaga
2. Swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat

2.7.9 Proses Penganggaran

1. Tingkat Nasional

1. Melalui APBN dengan mekanisme Musrenbang, dimana Pokja PKP Nasional berperan sebagai wadah koordinasi
2. Pokja PKP Nasional bersama-sama dengan KL untuk didanai oleh APBN serta melakukan koordinasi dengan KEMENKEU c.q DJA untuk memastikan usulan program dan kegiatan

3. Pokja PKP Nasional melalui CCMU memfasilitasi Pemda untuk dapat mengakses dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan non konvensional

2. Tingkat Provinsi

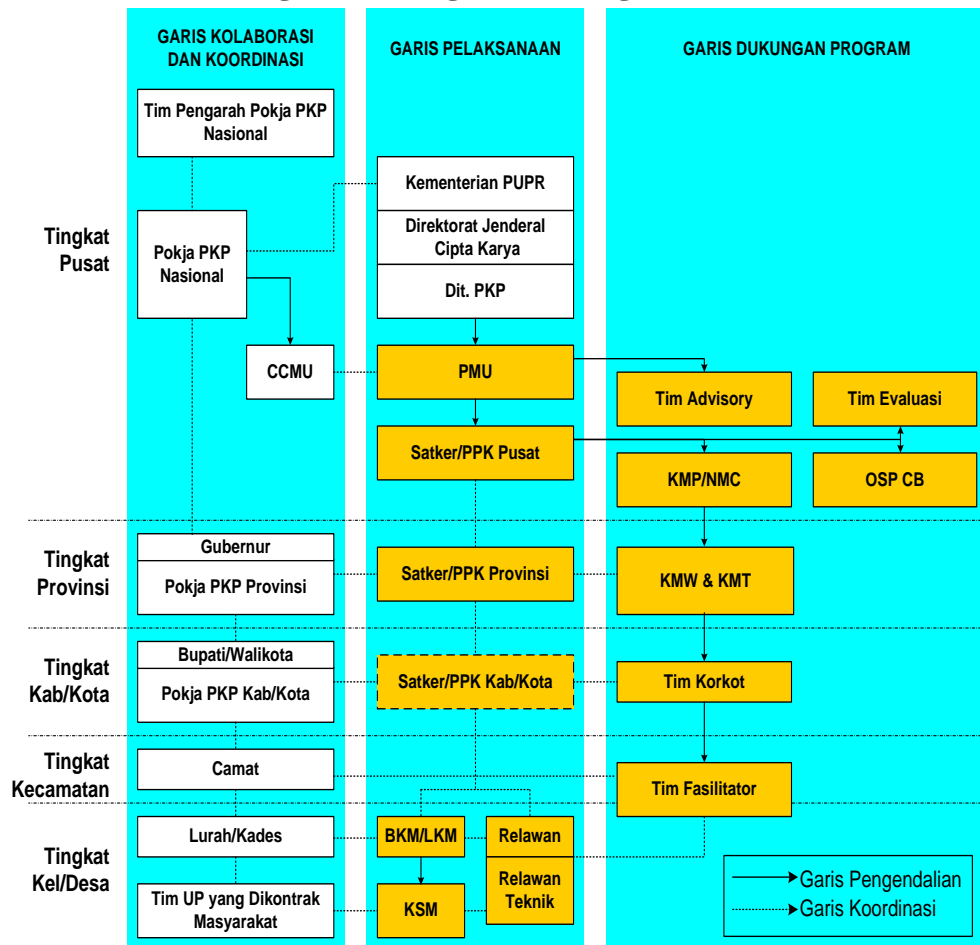
Pokja PKP Provinsi bersama-sama dengan SKPD Provinsi mereview daftar usulan kegiatan dari kab/kota dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD provinsi.

3. Tingkat Kab/Kota

Pokja PKP Kab/Kota bersama SKPD Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD kab/kota mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di kab/kota dan masuk ke DIPDA atau DIPDA perubahan

2.7.10 Struktur Organisasi Pengelolaan Program KOTAKU

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Pengelolaan Program KOTAKU



Sumber : SE DJCK No.40 Tahun 2016 Tentang Program KOTAKU

2.7.11 Perencanaan Partisipatif dalam Program KOTAKU

Perencanaan Partisipatif yang dimaksudkan disini adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama – sama (partisipatif) dan

terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan / permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan program/ kegiatan. Dimana dalam Program KOTAKU, langkah-langkah perencanaan partisipatif meliputi tiga tahapan, yakni :

1. Tahap Persiapan;

Yang dilakukan di dalam tahap persiapan terutama menyangkut penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan (baik di level kota/kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan) yang akan dipergunakan dalam proses pemetaan bersama masyarakat. Dalam tahapan ini juga dilakukan pembekalan kepada TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memfasilitasi proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat.

2. Tahap Pemetaan Swadaya;

Yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat dengan melihat masalah dan potensi terkait dengan 7 indikator kumuh, dilakukan dengan cara FGD (*Focus group discussion*) dengan masyarakat, transek (observasi lapangan), dan cara lain dengan prinsip-prinsip partisipatif dan juga triangulasi. Rumusan hasil pemetaan ini akan menjadi bahan dalam merumuskan Rencana Tahunan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) atau Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

3. Tahap Penyusunan Rencana Program/Kegiatan;

Bahan-bahan hasil Pemetaan Swadaya kemudian di analisis dan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan RPLP dan disepakati dengan Pokja PKP di tingkat kota/Kabupaten. RPLP akan dijadikan dasar untuk menentukan kegiatan yang akan *channeling*/dibiayai oleh

Direktorat Pengembangan Permukiman.³

Sedangkan dalam pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif itu sendiri, yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam perumusan masalah dan juga kegiatan. Oleh karena itu Beberapa hal prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan Perencanaan Partisipatif ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Mengutamakan Yang Terabaikan (Keberpihakan)

Pada umumnya, sebagian besar lapisan masyarakat tetap berada di pinggir arus pembangunan yang berjalan cepat. Karena itu, prinsip pertama Pemetaan Masyarakat (CSS) ialah mengutamakan masyarakat yang terabaikan tersebut agar memperoleh kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pembangunan. Fasilitator diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat kumuh dan terkumuh serta perempuan dalam pelaksanaan Perencanaan Partisipatif, tanpa harus mengurangi kesempatan belajar masyarakat. Keberpihakan Fasilitator tersebut bukan berarti bahwa golongan masyarakat lainnya (*elite*) perlu mendapatkan giliran untuk diabaikan. Tetapi keberpihakan ini lebih pada upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan yang terdapat di suatu masyarakat, dengan mengutamakan golongan paling lemah/kumuh agar kehidupannya meningkat.

2. Prinsip Pemberdayaan (Penguatan) Masyarakat

Pendekatan Perencanaan Partisipatif bermuatan peningkatan kemampuan masyarakat. Masyarakat memiliki akses (peluang) dan kontrol (kemampuan memberikan keputusan dan memilih) terhadap

³ Uraian Lengkap Langkah-Langkah Perencanaan Partisipatif dalam Program KOTAKU (Lampiran)

berbagai keadaan yang terjadi disepular kehidupannya yang pada gilirannya mereka akan mampu menjadi *programmer* bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, ketergantungan bantuan “orang luar” dapat dikurangi terutama bila bantuan bersifat merugikan (melemahkan posisi masyarakat).

3. Prinsip Saling Belajar Dan Menghargai Perbedaan

Salah satu prinsip dasar Program KOTAKU adalah pengakuan akan pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa pengalaman, pengetahuan dan nilai tradisional masyarakat tidak mampu mengejar perubahan yang terjadi dan tidak dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya telah terbukti pula bahwa pengetahuan *modern* yang diperkenalkan oleh ‘orang luar’ tidak juga memecahkan masalah masyarakat karena seringkali tidak cocok. Karenanya harus dilihat bahwa pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan orang luar saling melengkapi dan sama bernilainya.

4. Prinsip Triangulasi

Salah satu kegiatan *survey* adalah usaha mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis bersama masyarakat. Untuk mendapatkan informasi yang kedalaman dan keakuratannya bisa diandalkan, kita dapat menggunakan triangulasi yang biasa digunakan dalam *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (*check and recheck*) informasi. Triangulasi dilakukan antara lain melalui penganekaragaman sumber informasi (latar belakang, golongan masyarakat, keragaman tempat dan jenis kelamin) dan keragaman teknik yang dipakai

5. Prinsip Optimalisasi Hasil

Dalam upaya mengumpulkan informasi seringkali dilakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dan ternyata banyak dari informasi tersebut yang tidak diperlukan atau tidak dipergunakan. Oleh karena itu, Tim pemandu pada saat persiapan perlu merumuskan secara jelas jenis dan tingkat kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hanya jangan lupa bahwa kebutuhan informasi tersebut mesti menyerap juga pendapat masyarakat tentang informasi-informasi yang menurut masyarakat lebih penting.

6. Prinsip Orientasi Praktis dan Tepat Waktu

Perencanaan Partisipatif berorientasi praktis yakni untuk RPLP dan Rencana Kegiatan Prioritas Kumuh *Channeling* dengan Pengembangan Kawasan Permukiman (Bangkim). Karena itu, Pemetaan Masyarakat bukanlah kegiatan yang dilakukan demi memenuhi prosedur proyek KOTAKU melainkan sebagai alat atau metoda yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kemanfaatan KOTAKU bagi masyarakat setempat, khususnya dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat kumuh. Penerapan Pemetaan Masyarakat juga tidak hanya sekedar untuk menggali informasi, tetapi yang terpenting adalah menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menindaklanjuti hasil Pemetaan Masyarakat sebagai acuan bersama dalam upaya-upaya mereka untuk menanggulangi Kawasan Kumuh, secara sistematis, terarah, mandiri dan berkelanjutan.

7. Prinsip Keberlanjutan dan Selang Waktu

Perencanaan Partisipatif bukanlah suatu usaha yang sekali dilakukan kemudian selesai, namun merupakan kegiatan berlanjut, dia

merupakan metoda yang harus dijiwai dan dihayati oleh organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri, agar program-program yang mereka kembangkan secara terus menerus berlandaskan pada prinsip – prinsip dasar yang kontekstual dan yang mencoba menggerakkan potensi masyarakat. Prinsip Keberlanjutan ini juga akan terus disempurnakan melalui penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka menengah (RPI2JM) Masyarakat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang pertama yaitu dari Isnadi, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya yang membahas Proses Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen (Kajian Tentang Kemampuan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Model Perencanaan Partisipatif Dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen dan kemampuan perencanaan pembangunan partisipatif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat kedalam kebijakan pembangunan daerah serta kendala-kendala yang menghambat proses perencanaan pembangunan daerah. Dimana hasil menunjukkan bahwa proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh elit birokrasi, partisipasi masyarakat masih pasif (tahap konsultasi) dan musrenbang hanya sebatas formalitas belaka. Hasil dari musrenbang belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Musrebang memang mampu menyerap aspirasi masyarakat tetapi belum mampu mengakomodasi

aspirasi tersebut pada level realisasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Kendala-kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah antara lain : Ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat; ketidaktepatan dalam memahami perencanaan pembangunan daerah; tingkat keberdayaan warga yang lemah; perencanaan yang hirarkis; fungsi DPRD/partai politik yang tidak efektif; sektoralisme yang kuat pada tiap-tiap unit kerja (SKPD); kurang transparan dan tidak ada umpan balik.

Penelitian terdahulu kedua yaitu dari Irma Septiany mahasiswa Sarjana Administrasi Negara Universitas Indonesia mengenai : Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model *CLEAR* Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini atas nama Vevi Martina dengan judul Analisis Perencanaan Partisipatif di Kota Serang (Studi Kasus Program Kotaku di Kelurahan Serang). Hampir menyamai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnadi yaitu Proses Perencanaan Partisipatif, dan Irma Septiany yaitu mengenai partisipasi pada program sejenis namun ada beberapa perbedaan diantaranya:

- a. Pada penelitian terdahulu Isnadi tujuan dan sasaran penelitian adalah birokrasi dan masyarakat dalam hal proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen dan kemampuan perencanaan pembangunan partisipatif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat kedalam kebijakan pembangunan daerah serta kendala-kendala yang

menghambat proses perencanaan pembangunan daerah. , sedangkan pada penelitian saat ini tujuan dan sasaran adalah masyarakat yang terwakilkan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat dan pihak-pihak perencana pembangunan dalam Program Kotaku.

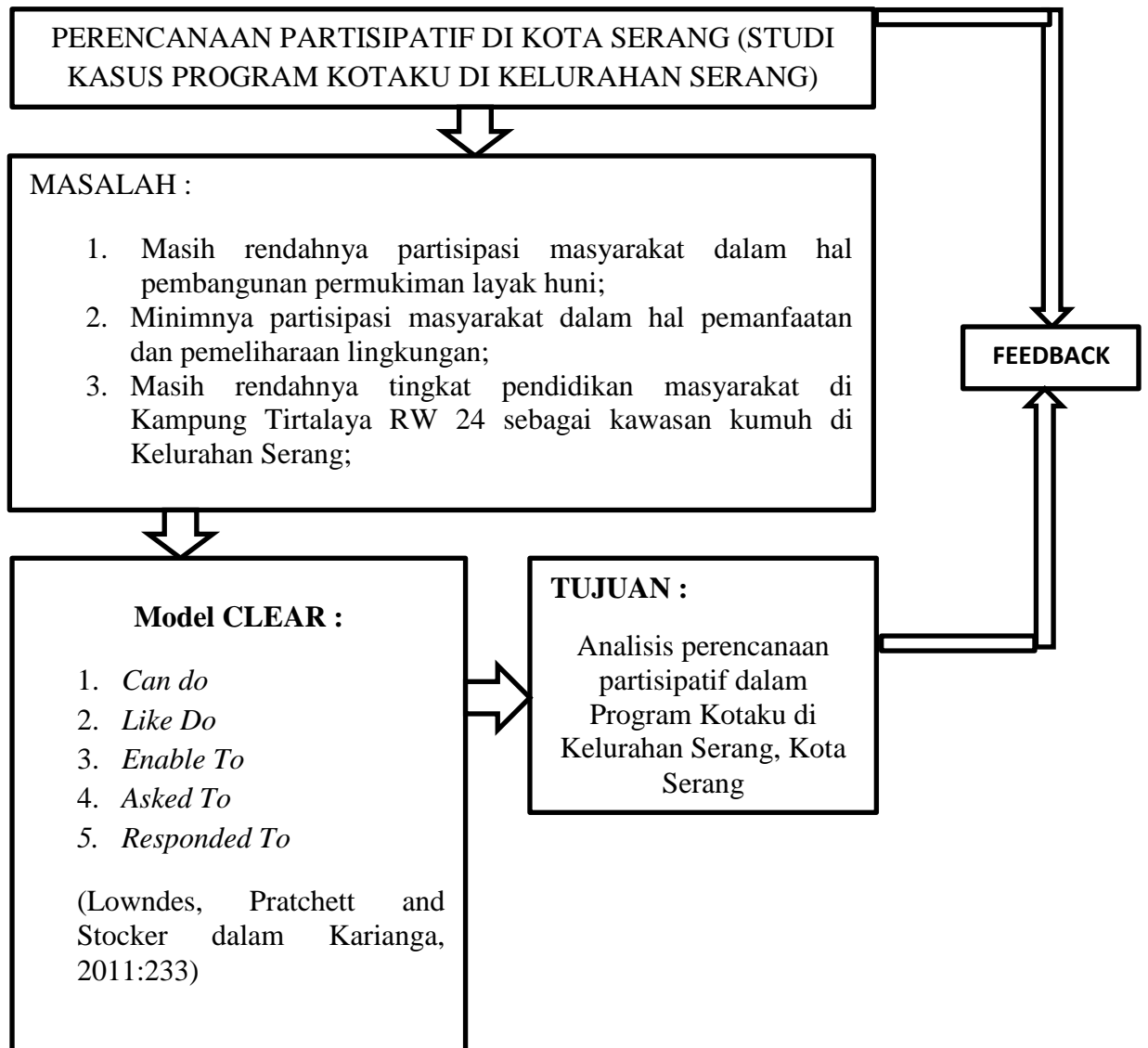
- b. Pada penelitian terdahulu Irma Septiany fokus pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi program PNPM-MP di Kecamatan Bekasi Utara, sedangkan peneliti saat ini lebih kepada program Kotaku dimana program tersebut adalah program lanjutan dari PNPM-MP. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses perencanaan partisipatif dalam program kotaku di Kelurahan Serang yang termasuk kedalam kawasan kumuh.

Dari identifikasi yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pada kajian yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya berfokus pada masyarakat, namun atas pembangunan yang ada, program baru dengan format yang sama dengan program sebelumnya akan menjadi salah satu objek penelitian selain daripada keterlibatan masyarakat didalamnya. Maka hal tersebut yang membuat penelitian ini lebih menarik untuk diteliti.

2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Menurut Sugiyono (2014: 60) mendefinisikan kerangka berfikir adalah sintesa hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini akan mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Berikut skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.4
Skema Kerangka Pemikiran



(Sumber : Peneliti 2017)

2.10 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan argumentasi awal yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil observasi awal. Penelitian ini memfokuskan diri pada Perencanaan Partisipatif menggunakan model *CLEAR* di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan perencanaan partisipatif program KOTAKU tersebut, apakah sudah efektif atau sudah optimal, sesuai dengan 5 dimensi partisipasi Model *CLEAR* atau belum dengan memperhatikan prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Serang belum berjalan dengan baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Meskipun prosesnya sama, prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau *natural setting*, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi yang wajar. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data karena penelitalah yang langsung terjun kelapangan mencari data dengan wawancara secara mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya.¹

¹ Creswell (2016: 245)

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif yang telah dijelaskan, penulis akan mengumpulkan data lapangan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif teori Partisipasi menggunakan model *CLEAR* , sehingga terbentuk gambaran mengenai partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang dalam perspektif perencanaan pembangunan partisipatif.

3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dibahas pada Bab I sebelumnya, peneliti membatasi ruang lingkup dan fokus penelitian hanya pada Perencanaan Partisipatif dengan Model *CLEAR* di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai locus penelitian yaitu Kelurahan Serang.. Kelurahan Serang dipilih sebagai lokasi penelitian saat ini karena : (1) Kelurahan atau tingkat dasar dari wilayah daerah merupakan *locus* yang tepat dipilih dalam penelitian ini dikarenakan dalam proses perencanaan partisipatif, Kelurahan merupakan Organisasi/ perangkat yang paling *lini* atau

bawah bersentuhan langsung dengan masyarakat ; (2) memiliki jumlah Lokasi Kumuh terbanyak di Kota Serang ; (3) Kelurahan Serang merupakan salah satu wilayah yang terdapat program Kotaku; (4) Masih terdapatnya lingkungan kumuh dikarenakan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan masih rendah.

3.4 Variabel Penelitian / Fenomena yang diamati

Variabel penelitian mengenai “Perencanaan Partisipatif Dengan Model *CLEAR* Di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Serang)” didefinisikan sebagai berikut:

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi konseptual yang digunakan peneliti untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Model Partisipasi *CLEAR*

Model *CLEAR* yang ditawarkan Pratchett, Stoker dan Lowndes dalam Karianga (2011:233), untuk mengidentifikasi lima faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi. Model *CLEAR* berpendapat bahwa partisipasi akan berjalan optimal atau efektif dimana masyarakat :

- 1) *Can Do* – have the resources and knowledge to participate;
- 2) *Like to* –have a sense of attachment that reinforces participation;
- 3) *Enable to* – are provided with the opportunity for participation;
- 4) *Asked to* –are mobilized through public agencies and civic channels;
- 5) *Responded to* – see evidence that their views have been considered

Model *CLEAR* digunakan untuk mengidentifikasi faktor penghambat ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi, sehingga dari kelima faktor Model *CLEAR* dapat diketahui faktor-faktor mana yang belum terpenuhi dalam mendorong partisipasi masyarakat di Kelurahan Serang secara optimal sehingga Program KOTAKU dapat berjalan dengan baik. Kerangka yang dirangkum dengan singkatan *CLEAR* ini, menunjukkan faktor mana dari kelima faktor tersebut yang diterapkan kemudian faktor mana yang belum mendapat cukup perhatian dan bagaimana hubungan antara kelima faktor tersebut dapat ditingkatkan dalam mengembangkan respon yang lebih strategis atas tantangan partisipasi masyarakat. Apabila kelima faktor di atas terpenuhi, maka perencanaan partisipatif

masyarakat di Kelurahan Serang dalam program KOTAKU sudah berjalan baik.

2. Program Kotaku

Program KOTAKU ialah Program yang bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. *Platform* kolaborasi tersebut dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Serang beserta pihak perencana yang terkait di Kelurahan Serang, dimana dalam pelaksanaan Program KOTAKU terdapat Perencanaan Partisipatif yang diartikan sebagai suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan /permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan program/ kegiatan.

3.4.2 Definisi Operasional

Analisis perencanaan partisipatif dengan menggunakan model *CLEAR* di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang), peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis perencanaan partisipatif dengan menggunakan model *CLEAR* dalam program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang.

Definisi operasional berdasarkan model *CLEAR* Lowndes, Pratchett dan Stoker dalam Karianga (2011:233) adalah:

1. *Can Do (have the resources and knowledge to participate)*

berhubungan dengan bagaimana sumberdaya diperlukan untuk membuat argumen mereka (masyarakat). Sehingga mereka harus dimobilisasi dan diorganisir. Dengan cara pembangunan kapasitas, pelatihan dan dukungan relawan, pendampingan dll.

2. *Like to – have a sense of attachment that reinforces participation;*

berhubungan dengan timbulnya rasa menjadi bagian dari sesuatu sehingga mereka (masyarakat) ingin berpartisipasi. Serta diperlukan sebuah pengenalan/identifikasi dengan badan publik yang terkait. Dilakukan dengan cara pembaruan sipil, pengembangan masyarakat, persatuan masyarakat dan lain-lain.

3. *Enable to – are provided with the opportunity for participation;*

berhubungan dengan diaktifkannya partisipasi masyarakat oleh badan-badan publik (infrastruktur jaringan sipil dan organisasi) untuk melakukannya.. Dengan cara berinvestasi dalam jaringan infrastruktur dan masyarakat sipil serta memperbaiki saluran komunikasi secara bersama

4. *Asked to – are mobilized through public agencies and civic channels;*

berhubungan dengan permintaan langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi, seperti diminta pendapat mereka melalui mobilisasi yang dilakukan oleh badan-badan publik dan jaringan masyarakat.

5. *Responded to – see evidence that their views have been considered.*

berhubungan dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat jika pendapat mereka didengarkan (walaupun tidak selalu setuju) dan dapat

dilihat respon atau tanggapan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan.

3.5 Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation* (Moleong, 2007:9). Jadi, peneliti mempunyai peran yang sangat penting dalam penentuan sukses atau tidaknya suatu penelitian dengan kesiapan peneliti dalam terjun langsung ke lapangan.

Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data lisan dan tulisan, oleh sebab itu untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan untuk mewawancarai informan dan *handphone*. *Handphone* digunakan untuk merekam wawancara dengan informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui peralatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data. Sedangkan dalam mencari sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber (informan) yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah

orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Selain wawancara mendalam, sumber data dalam penelitian ini juga di dapat dari hasil observasi, dimana sumber data dari hasil wawancara dan observasi merupakan sumber data primer. Selain itu, sumber data yang lainnya juga didapat dari hasil dokumentasi dan studi literatur/pustaka sebagai sumber data sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelima faktor partisipasi Model *CLEAR* sehingga menghasilkan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang secara deskriptif. Oleh karena itu dalam penentu narasumber atau yang dapat disebut dengan informan peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dari informan penelitian dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif di Program KOTAKU di Kelurahan Serang, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

3.6 Informan Penelitian

Peneliti pada mulanya menelusuri informan dari berbagai status yang terlibat dalam Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Serang, informan yang memiliki kaya informasi dipilih dan sub-sub unit dipilih untuk mengkaji kajian yang lebih dalam. Penentuan informan ini dengan memilih narasumber

yang secara langsung terlibat dan mengetahui partisipasi masyarakat di dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program KOTAKU di Kelurahan Serang. dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Deskripsi Informan

No	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan/ Pekerjaan	Keterangan
1.	I _{1.1}	Bapak H. Tata Winata	Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
2.	I _{1.2} -I _{1.3}	Bapak Edi Santosa dan bapak Hasani	Ketua RT I dan II Lingkungan Tirtalaya Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
3.	I _{1.4}	Ibu Maria	Anggota Unit Pelaksana Keuangan BKM Singandaru Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
4.	I _{1.5}	Bapak Nana Triana	Koordinator TIPP Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
5.	I _{1.6}	Bapak Moh. Nana Supriatna	Senior faskel Tim 6 Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
6.	I _{2.1}	Ibu Yana	Warga Masyarakat Kelurahan Serang RW 24	<i>Secondary Informan</i>
7.	I _{2.2}	Bapak Nanang Suryana	Kasi Ekbang Kelurahan Serang	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti, 2017

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan/pengolahan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.² Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait penelitian, dalam rangka memperoleh informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi. Pada penelitian Analisis Perencanaan

² Sugiyono (2014: 63)

Partisipatif Di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Serang), peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan tersebut dengan berpedoman pada indikator model partisipasi *CLEAR* yang digunakan, bentuk pernyataan akan lebih meluas dan bebas (tidak terstruktur) tanpa keluar dari indikator Model *CLEAR* yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan peneliti guna menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dan tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya akan bertambah. Wawancara yang dilakukan akan dibantu oleh alat rekam pada *handphone* sebagai bentuk dari dokumentasi wawancara yang dilakukan. Adapun pedoman wawancara pada penelitian Analisis Perencanaan Partisipatif Dengan Model *CLEAR* Di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Serang) dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara Penelitian

Dimensi	Kisi-Kisi Pertanyaan	Informan
<i>Can Do</i> (memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk berpartisipasi)	a) Syarat ikut serta dalam Program KOTAKU b) Pelatihan kelembagaan c) Dukungan relawan d) Pendampingan dalam Program KOTAKU e) Kondisi Sosial Ekonomi	1. Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang 2. Ketua RT 1 RW 24 3. Ketua RT 2 RW 24

		<p>4. Koordinator Tim Inti Perencanaan Partisipatif Kelurahan Serang</p> <p>5. Senior Fasilitator Kelurahan Serang</p> <p>6. Anggota UPK BKM Singandaru Kelurahan Serang</p>
<p><i>Like To</i></p> <p>(memiliki keinginan terlibat atau merasa menjadi bagian dari sesuatu yang memperkuat partisipasi)</p>	<p>a) Pentingnya Program KOTAKU</p> <p>b) Latar belakang mengikuti Program KOTAKU</p> <p>c) Pelatihan dan sosialisasi kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan di kelurahan Serang</p> <p>d) Keragaman sosial dalam keterlibatan masyarakat</p>	<p>1. Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang</p> <p>2. Ketua RT 1 RW 24</p> <p>3. Ketua RT 2 RW 24</p> <p>4. Anggota Unit Pelayanan Keuangan BKM Singandaru</p> <p>5. Koordinator Tim Inti Perencanaan Partisipatif Kelurahan Serang</p> <p>6. Senior Fasilitator Kelurahan Serang</p> <p>7. Masyarakat</p>
<p><i>Enabled To</i></p> <p>(Disediakan kesempatan untuk partisipasi)</p>	<p>a) Bentuk keterbukaan akses masyarakat di Program KOTAKU</p> <p>b) Sosialisasi awal dan lanjutan di Program KOTAKU di Kelurahan Serang</p>	<p>1. Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang</p>

	<p>c) Media yang digunakan untuk menarik partisipasi masyarakat</p> <p>d) Pengecualian golongan miskin, wanita, kelompok rentan dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua RT 1 RW 24 3. Ketua RT 2 RW 24 4. Anggota Unit Pelayanan Keuangan BKM Singandaru 5. Koordinator Tim Inti Perencanaan Partisipatif Kelurahan Serang 6. Senior Fasilitator Kelurahan Serang 7. Warga Masyarakat 8. Kasi Ekbang Kelurahan Serang
<p><i>Asked To</i> (dikerahkan atau di mobilisasi oleh badan resmi atau kelompok-kelompok sukarela)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Masyarakat Kelurahan Serang mengetahui program KOTAKU b) Masyarakat diminta terlibat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang c) Pendekatan yang dilakukan guna menjangkau partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang d) Badan yang memobilisasi partisipasi masyarakat di Kelurahan Serang dalam Program KOTAKU e) Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam Program KOTAKU f) Masyarakat dimintai pendapat langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam Program KOTAKU di Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang 2. Ketua RT 1 RW 24 3. Ketua RT 2 RW 24 4. Anggota Unit Pelayanan Keuangan BKM Singandaru 5. Koordinator Tim Inti Perencanaan Partisipatif Kelurahan Serang 6. Senior Fasilitator Kelurahan Serang

	Serang	7. Kasi Ekbang Kelurahan Serang 8. Warga Masyarakat
<i>Responded To</i> (melihat bukti bahwa pandangan mereka telah dipertimbangkan)	<p>a) Dasar pertimbangan gagasan yang dipilih dalam perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang</p> <p>b) Cara membangun rasa kemasyarakatan di kelurahan Serang</p> <p>c) <i>Feedback</i> yang didapat dalam keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU di Kelurahan Serang</p> <p>d) Upaya yang dilakukan agar partisipasi masyarakat terus berlanjut dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang</p>	<p>1. Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang</p> <p>2. Ketua RT 1 RW 24</p> <p>3. Ketua RT 2 RW 24</p> <p>4. Koordinator Tim Inti Perencanaan Partisipatif Kelurahan Serang</p> <p>5. Senior Fasilitator Kelurahan Serang</p>

Sumber : Peneliti, 2017

2. Observasi

Pada penelitian saat ini, teknik observasi partisipatif yang dipakai ialah observasi partisipasi pasif. Peneliti hanya sebagai pengamat saja tanpa menjadi anggota resmi organisasi pelaksana maupun objek program yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program KOTAKU guna menganalisis Perencanaan Partisipatif Di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program

Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang). Observasi yang dilakukan peneliti dengan mendatangi lingkungan terkait program Kotaku yakni lingkungan Kelurahan Serang.

3. Dokumentasi

Pada penelitian Analisis Perencanaan Partisipatif Dengan Model *CLEAR* Di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang), dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan foto yang menggunakan *handphone*, serta arsip lainnya yang bersumber dari informan.

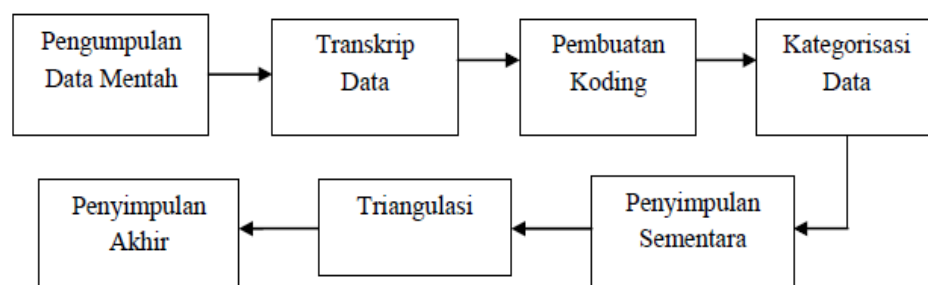
1.7.2 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknis analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan Irawan dalam bukunya *Metologi Penelitian Administrasi* (2005:27) yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, dan yang terakhir yaitu pengumpulan akhir.

Jadi, dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*) dapat diartikan bahwa kesimpulanya penelitian adalah dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut, karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data dan dianggap selesai manakala peneliti telah memiliki data sampai tingkat “titik jenuh” atau *reliable* (data yang didapat telah seragam dan telah menemukan pola aturan yang peneliti cari).

Dari penjelasan diatas maka proses analisis data terkait dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 s/d selesai. Pada proses Analisis data penelitian ini menggunakan model Prasetya Irawan, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.1
Proses Analisis Data



Sumber: Irawan, Prasetya. 2005:5

Dari gambar di atas maka dapat diuraikan kegiatan dalam proses analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan, seperti kamera dan *tape recorder*. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data yang apa adanya (*verbatim*) tanpa mencampurkannya dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti itu sendiri.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk tertulis. Yang ditulis oleh peneliti juga harus apa adanya tanpa mencampur adukan dengan pikiran peneliti.

3. Pembuatan Koding

Ditahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang telah ditranskrip. Hal-hal penting didalam transkrip dicatat dan diambil kata kuncinya. Kemudian kata kunci ini nantinya diberi kode.

4. Kategori Data

Dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) dalam satu besaran yang dinamakan "kategori".

5. Penyimpulan Sementara

Ditahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara. Kesimpulan ini harus berdasarkan data jangan dicampur aduk dengan pikiran dan penafsiran peneliti.

6. Triangulasi

Menurut Prasetya Irawan (2006:79), triangulasi adalah proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Bisa dilakuka dengan wawancara, observai, dan dokumentasi.
- b. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama tetapi pada berbagai kesempatan misalnya, pada waktu pagi, siang atau sore hari.

7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

3.7.3 Uji Keabsahan Data

Uji kredibilitas atau yang biasa disebut uji keabsahan dan reliabilitas data memiliki keterikatan antara deskripsi dan eksplanasi. Uji kredibilitas data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, *member check* dan menggunakan bahan referensi. Pada penelitian ini, dalam menguji kredibilitas data peneliti melakukan triangulasi dan *member check* untuk member kepercayaan terhadap penelitiannya.

1. Triangulasi

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Terdapat 3 macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan

triangulasi waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber melalui hasil wawancara atau disebut juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Pada observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut di ambil benang merah yang menghubungkan diantara keduanya.

2. *Member Check*

Selain itu peneliti pun melakukan *membercheck*, dalam Sugiyono *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, *membercheck* yang diperoleh akan

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah *membercheck* dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *membercheck*.

Peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang telah diperoleh dari informan penelitian dan bertujuan memvalidasi data dengan yang telah diberikan oleh informan, sehingga data yang didapat menjadi valid dan dapat dipercaya.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti Perencanaan Partisipatif Dengan Menggunakan Model *CLEAR* Di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang). Waktu penelitiannya dimulai dari bulan Oktober sampai Juni Tahun 2017. Jadwal penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		Oktober 2016 – April 2017															
		Oktober- November				Desember- Januari				Februari- Juni				Juli- September			
		Minggu Ke -															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi awal																
2	Penyusunan Proposal																
3	Bimbingan dan perbaikan proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Perbaikan Proposal																
6	Proses pencarian dan pengolahan data di lapangan																
7	Penyusunan laporan penelitian dan bimbingan																
8	Sidang skripsi																

Sumber : Peneliti 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Serang

Kelurahan Serang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Serang. Secara geografis, Kelurahan Serang berada di antara $6,12277777777778^0$ Bujur Timur dan $106,133333333333^0$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur : Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Cipare
- 2) Sebelah Barat : Kelurahan Kuranji
- 3) Sebelah Utara : Kelurahan Dalung
- 4) Sebelah Selatan : Kelurahan Lontar

Gambar 4.1

Letak geografis dan Batas administrasi wilayah Kelurahan Serang

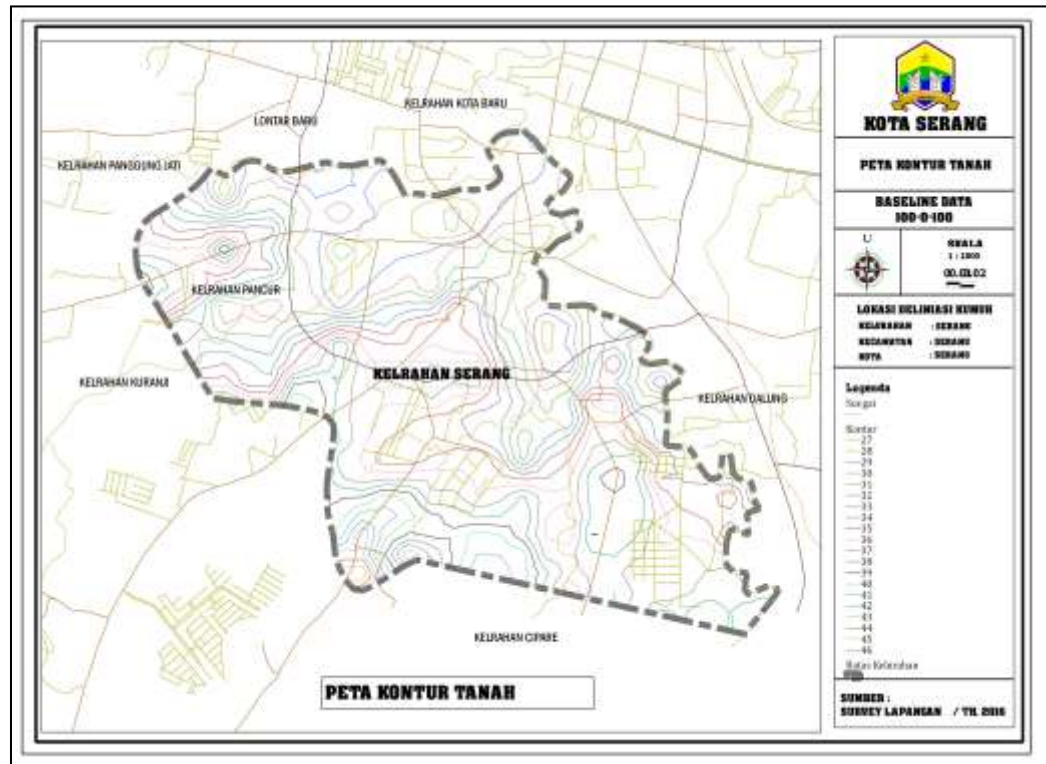


Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Kelurahan Serang berada di bagian tengah Kota Serang. Dimana wilayah tengah Kota Serang sendiri berkembang sebagai pusat pemerintahan, permukiman perkotaan serta pelayanan perdagangan dan jasa. Hal tersebut berdampak pada perkembangan wilayah yang cukup pesat diiringi dengan tingginya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Kota.

Secara topografi Kelurahan Serang pada umumnya berbentuk dataran, dengan hampir sebagian besar penggunaan lahannya digunakan untuk permukiman. Penggunaan lahan untuk permukiman seluas 300 Ha sedangkan luas wilayah Kelurahan Serang 490 Ha. Sisanya untuk persawahan dan perindustrian. Bentuk Kontur di Kelurahan Serang, digambarkan dengan garis-garis secara renggang menandakan bahwa kawasan tersebut landai. Sehingga wajar apabila penggunaan lahan didominasi untuk lahan permukiman. Peta kontur Kelurahan Serang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2
Peta Kontur Kelurahan Serang



Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Berdasarkan kemiringan lereng menurut Mabberly (1990), Kelurahan Serang yang memiliki kemiringan lereng 0–15%, sesuai digunakan sebagai kawasan pengembangan kegiatan perkotaan berupa : ruang terbuka hijau, bangunan terstruktur, perkotaan umum, perumahan, pusat perdagangan dan jasa, sistem *septik tank*, jalan umum dan jalan raya. Kesesuaian peruntukan lahan perkotaan berdasarkan kemiringan menurut skala Mabberly ditunjukkan dalam Tabel 4.1 berikut.

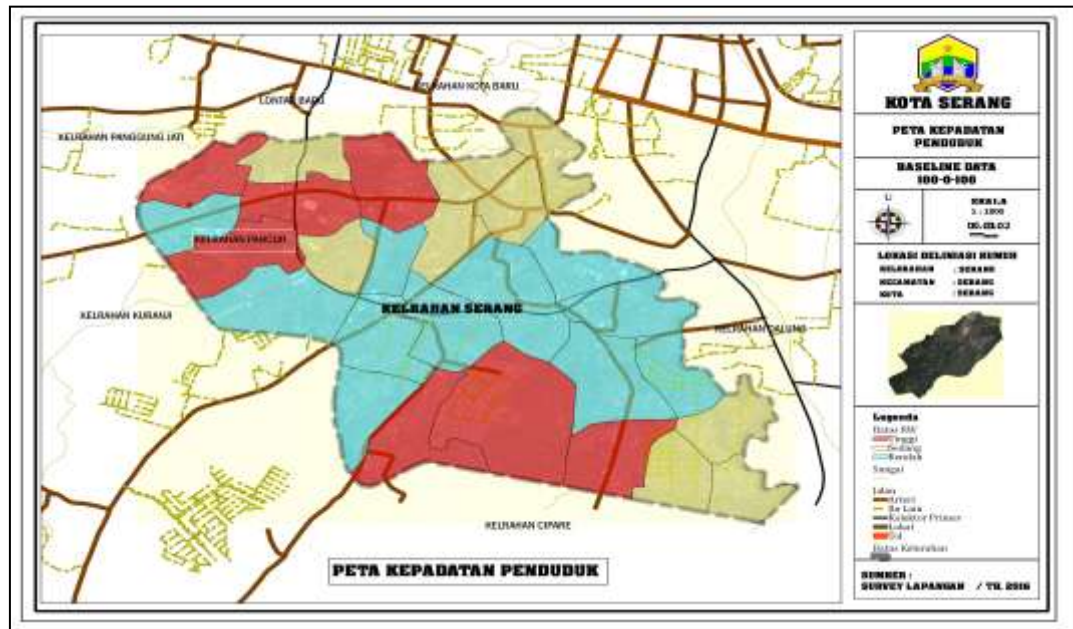
Tabel 4.1
Kesesuaian Peruntukan Lahan Perkotaan berdasarkan Kemiringan
(Skala Mabbery)

Kesesuaian Peruntukan Lahan Perkotaan	Kemiringan (%)						
	0 – 3	3 – 5	5 – 10	10 – 15	15 - 30	30 - 14	>40
RTH							
Bangunan Terstruktur					-	-	-
Perkotaan Umum					-	-	-
Perumahan					-	-	-
Pusat perdagangan/ Jasa			-	-	-	-	-
Industri			-	-	-	-	-
Sistem Septik			-	-	-	-	-
Jalan Umum			-	-	-	-	-
Jalan Raya			-	-	-	-	-
Jalan Kereta Api		-	-	-	-	-	-
Lapangan Terbang		-	-	-	-	-	-

Sumber : Draft RPLP Kelurahan Serang, 2016

Letak geografis yang strategis serta kondisi kontur wilayah dan kemiringan lahan Kelurahan Serang yang sesuai menjadi kawasan pengembangan sarana prasarana perkotaan menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Daerah dalam mengelola serta dukungan masyarakat yang turut serta berpengaruh dalam kelangsungan pengembangan tersebut. Namun seiring perkembangan waktu, Kelurahan Serang berkembang sebagai kawasan dengan kepadatan tinggi di beberapa titik di wilayahnya. Peta persebaran kepadatan penduduk kelurahan Serang pada tahun 2016 ditunjukkan oleh gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3
Peta Persebaran Kepadatan Penduduk Kelurahan Serang Tahun 2016



Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Dari gambar di atas menunjukkan daerah yang diwarnai merah menandakan kepadatan tinggi di Kelurahan Serang, sedangkan warna kuning untuk kepadatan sedang dan warna biru untuk kepadatan rendah. Daerah yang di arsir warna merah terdapat di bagian bawah dan atas yang berbatasan dengan Kelurahan Cipare, Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Kuranji. Di bagian tengah wilayah Kelurahan Serang didominasi oleh wilayah dengan kepadatan rendah sedangkan untuk kepadatan sedang berbatasan dengan Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Kota Baru dan diapit oleh dua Kelurahan yakni Kelurahan Cipare dan Kelurahan Dalung. Kepadatan penduduk dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)
1.	Curug	39,4	1.272
2.	Walantaka	40,99	2.139
3.	Cipocok Jaya	31,54	3.211
4.	Serang	25,88	8.595
5.	Taktakan	57,98	1.511
6.	Kasemen	56,36	1.669

Sumber : BPS Kota Serang, 2016

Kelurahan Serang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Serang yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 8.595 penduduk/ km². Kepadatan tersebut menimbulkan permasalahan penurunan kualitas lingkungan, selain itu peran serta masyarakat juga ikut andil dalam penurunan kualitas lingkungan tersebut. Penurunan kualitas lingkungan di Kelurahan Serang yang mana disini adalah Kampung Tirtalaya ditandai dengan adanya permasalahan lingkungan berupa banjir di beberapa titik, sampah yang menumpuk membuat kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat, sistem sanitasi yang buruk dan tidak adanya sarana prasarana lingkungan yang memadai.

Permasalahan banjir berupa genangan air yang di akibatkan oleh kondisi drainase yang sempit dan terdapat beberapa bagian yang kontruksinya sudah rusak. Selain itu persoalan sistem drainase yang tidak terpadu di jalan utama dengan jalan-jalan lingkungan yang mengakibatkan beban fungsi drainase jalan lingkungan bertambah. Sehingga air meluap

sampai kepada permukiman warga. Drainase jalan utama di Kelurahan Serang hanya berfungsi menyalurkan air yang jatuh ke daerah manfaat jalan (DAMAJA), sedangkan di jalan-jalan lingkungan drainase berfungsi untuk menyalurkan debit air hujan yang jatuh di seluruh permukiman maupun di DAMAJA. Sementara kondisi drainase yang sempit akan berakibat fatal apabila turun hujan dengan intensitas tinggi. Air akan mencari jalan ke permukiman warga dan mengakibatkan tergenangnya air di permukiman warga. Walaupun tidak mencapai ketinggian lutut orang dewasa, namun banjir tersebut mengganggu aktifitas masyarakat setempat. Kondisi drainase di Kelurahan Serang ditunjukkan dalam gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4
Kondisi drainase di Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang
Tahun 2016



Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Selain kondisi drainase yang buruk, terdapat penumpukan sampah di jaringan drainase di Kampung Tirtalaya Kelurahan Serang yang menjadi

kawasan prioritas penanganan kumuh, dalam pasal 29 UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan :

“Bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”.

Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang membuang sampah di jaringan drainase tersebut. Kesadaran dan pengetahuan yang masih minim di masyarakat disamping ketersediaan sarana prasarana penunjang yang belum memenuhi kebutuhan, membuat permasalahan sampah masih menjadi permasalahan utama di Kelurahan Serang. Selain membuang sampah tidak pada tempatnya, masih adanya pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana :

“Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan prosedur teknis pengelolaan sampah”

Teknis pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pemisahan antara sampah organik yang nantinya bisa dikubur dengan sampah anorganik yang sifatnya tidak bisa terurai sehingga bisa di daur ulang. Namun disamping pengelolaan sampah dengan teknis di atas, sampah dapat mempunyai nilai ekonomis apabila dalam pengolahannya memanfaatkan sampah yang ada, baik organik maupun anorganik menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Maka sebelumnya perlu dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Pemilahan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan menyediakan tempat untuk kegiatan tersebut. Namun pengolahan belum dilakukan secara optimal dikarenakan kemauan masyarakat dan

pengetahuan masyarakat yang masih minim terkait hal tersebut. Padahal apabila sampah tersebut dikelola secara baik akan menjadi potensi ekonomi masyarakat khususnya di wilayah kumuh Kelurahan Serang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos dan granul, sedangkan sampah anorganik dapat dibuat biji plastik dan kerajinan daur ulang. Pengolahan sampah dilakukan agar seminimal mungkin sampah dibuang pada tempat pembuangan akhir. Maka perlu adanya pengolahan sampah yang efektif serta adanya dorongan untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam pengentasan masalah sampah, disamping ketersediaan sarana prasarana penunjang.

Dalam hal sarana prasarana, tidak adanya sarana penunjang seperti mobil angkut sampah dan belum beroperasinya tempat pengolahan sampah terpadu sehingga pebuangan sampah hanya dibuang di tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Sedangkan dalam pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa:

“Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan khusus, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat pemilahan sampah”

Namun kondisi yang ada, di Kelurahan Serang lokasi tempat pembuangan sampah sementara belum tertata sebagaimana mestinya. Seperti di pinggir jalan, mengakibatkan adanya bau tidak sedap dan mengganggu aktifitas masyarakat di sekitarnya. Salah satu kondisi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di kawasan yang terindikasi kumuh Kelurahan Serang dapat dilihat dalam gambar 4.5 berikut.

Gambar 4.5
Kondisi Pembuangan Sampah Kelurahan Serang Tahun 2016



Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Tempat pembuangan sampah yang tidak memperhatikan lokasi yang tepat dan pengolahan sampah yang belum optimal akan berakibat kepada kesehatan masyarakat dimana akan timbul penyakit, baik penyakit kulit maupun penyakit lainnya seperti muntaber dan lain-lain. Maka apabila masyarakatnya tidak sehat, produktivitas mereka akan menurun dan berdampak pada tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain masalah sampah dan drainase, masalah sanitasi lingkungan juga menjadi masalah penting di Kelurahan Serang. Dimana sanitasi ikut berpengaruh kepada tingkat kesehatan masyarakat. Apabila sistem pembuangan air limbah lingkungan sudah baik maka dikatakan warga lingkungan kumuh Kelurahan Serang sudah peduli akan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan mereka.

Sistem pengelolaan air limbah di permukiman adalah menggunakan *septic tank* individual, namun ada pula di sebagian RW terutama di RW 24 Kampung Tirtalaya yang membuang langsung ke sungai Cibanten. Sungai Cibanten memiliki lebar sungai 5 meter, kedalaman 6 meter serta debit 10 liter/detik. Selain digunakan sebagai pembuangan limbah, sungai Cibanten digunakan sebagai sumber mata air yang digunakan beberapa warga sekitar aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan airnya. Selain sungai, beberapa rumah di Kampung Tirtalaya yang tidak memiliki WC sendiri, menggunakan WC umum untuk digunakan sebagai sarana pembuangan limbah. Rumah-rumah tersebut tidak mempunyai saluran air limbah rumah tangga dan membiarkan tergenang di pekarangan belakang rumah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 03-1733-2004 yang menyatakan bahwa :

“Setiap rumah harus dilengkapi jaringan air limbah atau apabila tidak memungkinkan harus di lengkapi sistem jaringan air limbah lingkungan”

Di lokasi prioritas kawasan kumuh Kelurahan Serang yakni Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang, masyarakat masih bercirikan masyarakat pedesaan atau tradisional. Sehingga pola pikir untuk hidup sehat masih minim. Maka wajar kiranya, mereka menggunakan alam untuk menunjang pemenuhan kebutuhan akan sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang ada di Kelurahan Serang yakni tidak adanya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Serang.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tidak ditemukannya data dan material yang diperuntukkan untuk penanganan terhadap masalah bencana kebakaran. Selain itu potensi kebakaran juga sangat besar, hal ini disebabkan karena faktor keberadaan permukiman yang berada di beberapa RW yang tidak teratur dan padat terutama dalam hal pemasangan kabel-kabel instalasi listrik yang tidak memenuhi standar. Serta kabel yang digunakannya juga tidak sesuai standar. Hal inilah yang menjadi penyebab kebakaran. Selain itu potensi kebakaran juga bisa disebabkan karena faktor kelalaian manusia disebabkan karena kompor gas yang meledak dan sebagainya. Di tahun 2016 pernah terjadi kebakaran di Kelurahan Serang, walaupun termasuk musibah kecil, namun penanganannya harus cepat dilakukan. Hanya masyarakat terdekatlah yang berjibaku bergotong royong untuk memadamkannya menggunakan peralatan seadanya. Tabung pemadam kebakaran, pompa hidran atau sumur-sumur terkait dengan penanggulangan kebakaran belum tersedia. Padahal jika kita mengacu kepada standarisasi keharusan, di tingkat kelurahan harus tersedia posko kebakaran dengan luas lahan yang dibutuhkan 200 M². Sedangkan hidran kebakaran, disediakan dalam setiap radius 200 Meter untuk perumahan dan 100 Meter untuk kawasan komersil. Jarak hidran kebakaran terhadap jalan minimum 3 Meter. Apabila tidak memungkinkan membuat hidran kebakaran, diharuskan membuat sumur – sumur kebakaran.

Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Serang keberadaannya kurang, ini disebabkan sebagian besar lahan di Kelurahan

Serang sudah dibangun permukiman warga. Menurut standar, idealnya dalam setiap RT dengan jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, terdapat 1 unit taman dengan luas 250 M² yang akan memberikan kesegaran pada kota sekaligus sebagai tempat bermain anak-anak. Ruang terbuka berupa taman dan lapangan olahraga dengan luas 1.250 M² dibutuhkan dalam skala pelayanan RW dengan penduduk pendukung 2.500 jiwa. Untuk skala kelurahan, taman dan lapangan olahraga memerlukan lahan seluas 9.000 M². Bahkan Taman yang berfungsi sebagai udara segar bagi kota keberadaannya masih sangat minim, khususnya bagi permukiman penduduk. Dengan demikian bahwa, masih sangat diperlukan ruang – ruang terbuka yang secara khusus di permukiman penduduk yang akan berfungsi ekologis dan sebagai sarana bagi warga masyarakat untuk bersosialisasi.

Pemenuhan kebutuhan air di Kelurahan Serang sudah tercukupi. Dari data hasil pengamatan lapangan penduduk yang bermukim di Kelurahan Serang menggunakan sumber mata air melalui perpipaan dari PDAM, Sumur gali dan Sumur Pompa mesin serta memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan airnya. Jumlah pemanfaat sumber air di Kelurahan Serang didominasi penggunaan sumur pompa dengan 2.492 unit dengan kondisi baik berjumlah 5.743 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah terkecil yakni pemanfaat sumur gali dengan 90 unit dengan kondisi baik berjumlah 270 Kepala Keluarga. Namun permasalahannya, masih adanya pemanfaat air sungai, yang mana air sungai dalam kondisi rusak. Jumlah pemanfaatnya 823 KK. Hal tersebut akan menimbulkan masalah kesehatan disamping

penurunan kualitas lingkungan yang ada. Jumlah Pemanfaat dan Sumber Air di Kelurahan Serang Tahun 2016 ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Jumlah Pemanfaat dan Sumber Air di Kelurahan Serang Tahun 2016

No.	Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi
1.	Sumur Gali	90	270	Baik
2.	Sumur Pompa	2.492	5.743	Baik
3.	PAM	550	1.519	Baik
4.	Sungai	1	823	Rusak

Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Selain air, jalan merupakan sarana lingkungan yang penting di Kelurahan Serang. Kondisi yang ada, terdapat jalan lingkungan dengan lebar hanya 1 meter , sedangkan minimal lebar jalan lingkungan 3,5 meter menurut PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Kondisi ideal jalan lokal dengan lebar perkerasan 6-7 meter mempunyai bahu jalan selebar 1,5 – 2 meter, trotoar lebar 1,5 meter dan drainase lebar 0,5 meter. Sedangkan jalan lingkungan dengan lebar perkerasan 1,2 – 2 meter mempunyai bahu jalan dan drainase yang masing-masing lebarnya adalah 0,5 meter. Kondisi yang ada, selain ada jalan yang hanya mempunyai lebar 1 meter, adapula jalan yang tidak dilengkapi jaringan drainase. Seperti dalam gambar 4.6 berikut.

Gambar 4.6
Kondisi Jalan Lingkungan di Kelurahan Serang Tahun 2016



Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Penurunan kualitas yang terjadi di Kelurahan Serang selain faktor ketersediaan sarana prasarana yang ada, lebih disebabkan oleh pola perilaku hidup sehat yang belum diterapkan di kawasan kumuh Kelurahan Serang. Pola perilaku tersebut bukan dikarenakan agama atau kepercayaan masyarakat namun karena kebiasaan dan masyarakat di Kelurahan Serang, khususnya di RW 24 yang bercirikan pedesaan. Masyarakat belum terbuka atas pola hidup masyarakat modern, yang sudah peduli akan kesehatan lingkungan. Ditunjang dengan faktor pendidikan yang masih minim khususnya di wilayah kumuh Kelurahan Serang. Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh maka yang masuk menjadi kawasan prioritas kumuh di Kelurahan Serang adalah kawasan RW.24 Kampung Tirtalaya. Dengan jumlah Penduduk 741 jiwa diantaranya Laki-laki 455 jiwa dan perempuan 286 jiwa sedangkan

jumlah Kepala Keluarga 141 jiwa. Jumlah Penduduk Miskin/Masyarakat berpenghasilan Rendah 220 jiwa dengan luasan wilayah 8,04 Ha dengan kepadatan penduduk yakni 93 jiwa/Ha. Maka apabila dilihat dari faktor pendidikan, masyarakat di Kampung Tirtalaya tingkat pendidikannya masih minim. Jumlah tamatan SD yakni 3.400 jiwa dengan presentase 44,75%. Meskipun sarana prasarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Serang sudah baik namun belum mampu mendorong masyarakat di wilayah yang terindikasi kumuh tingkat pendidikannya tinggi atau baik. Terdapat 48 sarana pendidikan, diantaranya : Taman kanak kanak (TK) ada 20 unit Swasta, TPA ada 5 unit dan Terdapat 7 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat 4 unit. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdapat 8 unit milik swasta dan Negeri, Perguruan Tinggi terdapat 1 unit, Madrasah 2 unit dan Pondok pesantren 1 unit. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Serang dan sarana prasarana pendidikan di Kelurahan Serang Tahun 2016 ditunjukkan dalam Tabel 4.4 dan 4.5 berikut.

Tabel 4.4
Struktur Penduduk Kampung Tirtalaya Kelurahan Serang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Kategori	Jumlah	Presentase (%)
Tidak tamat SD	25	0,33
Tamat SD	3.400	44,75
Tamat SLTP	1.200	15,80
Tamat SLTA	2.700	35,54
Tamatan S1	250	3,29
Tamatan S2	12	0,16
Tamatan S3	10	0,13

Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Serang Tahun 2016

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	TK	20
2.	TPA	5
3.	SEKOLAH DASAR	7
4.	SLTP	4
5.	SMU/SMK	8
6.	Perguruan Tinggi	1
7.	Madrasah	2
8.	Pondok Pesantren	1
9.	Kursus Keterampilan	0
Jumlah		48

Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Sedangkan Mata pencaharian penduduk Kelurahan Serang sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 3.425 jiwa atau sekitar 37,47%. Penduduk yang berprofesi sebagai Pedagang yaitu 1.155 jiwa atau sekitar 12,64%, sedangkan yang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) 30 jiwa atau 0,33%. Selain itu, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai Polisi Republik Indonesia (POLRI) yaitu 25 jiwa atau sekitar 0,27%. Penduduk yang berprofesi sebagai Petani yaitu 205 jiwa atau sekitar 2,24%, Penduduk yang berprofesi sebagai Buruh yaitu 2.800 jiwa atau sekitar 30,63%, Adapun Penduduk yang berprofesi sebagai Lainnya yaitu 1.500 jiwa atau sekitar 16,41%. Hal tersebut wajar dikarenakan Kelurahan Serang memiliki wilayah yang strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan Kota Serang maupun Provinsi Banten. Selain itu, dikarenakan Kelurahan Serang termasuk wilayah yang dekat dengan

pengembangan sektor industri maka tenaga penduduk yang terserap adalah buruh. Dapat dilihat dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Kelurahan Serang Berdasarkan Mata Pencapaian
Tahun 2016

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	PNS	3425
2.	Pedagang	1155
3.	TNI	30
4.	POLRI	25
5.	Petani	205
6.	Buruh	2800
7.	Lainnya	1.500
Jumlah		9.140

Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Berdasarkan kepercayaan atau agama, penduduk Kelurahan Serang sebagian besar adalah muslim, dimana 87,10% penduduk beragama islam. Agama lainnya yang dianut penduduk yaitu Kristen Katolik sebesar 6,10%, Protestan 6,19%, Hindu 0,36% dan Budha 0,25%. Seharusnya dengan jumlah muslim yang mendominasi, perilaku hidup sehat di Kelurahan Serang, khususnya Kampung Tirtalaya RW 24 dapat diterapkan dengan baik. Karena didalam ajaran agama Islam mewajibkan setiap muslim untuk berperilaku sehat dan bersih. Tidak menutup kemungkinan pula untuk kepercayaan lainnya. Namun nyatanya hal tersebut tidak mendorong masyarakat di Kelurahan Serang untuk membiasakan diri untuk hidup sehat. Jumlah penduduk Kelurahan Serang Tahun 2016 berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Kelurahan Serang berdasarkan Agama Tahun 2016

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	25182	87,10
2.	Katolik	1764	6,10
3.	Protestan	1789	6,19
4.	Hindu	105	0,36
5.	Budha	72	0,25

Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Penurunan kualitas permukiman, bukan hanya dilihat dari sektor Lingkungan dimana sektor sosial dan ekonomi turut andil didalamnya. Masyarakat yang mandiri secara finansial maka akan lebih bisa berkontribusi dengan maksimal dalam rangka peningkatan kualitas permukiman hunian. Di Kelurahan Serang perekonomian masyarakat berkembang pada perdagangan dan jasa. Baik industri kecil seperti industri rumahan, rumah kontrakan, warung-warung yang berderet di sepanjang jalan. Selain warung-warung penyedia kebutuhan baik sandang maupun pangan, berkembang pula kegiatan informal, pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan utama dan ada pula tempat perbelanjaan minimarket di beberapa titik samping jalan-jalan Kelurahan Serang.

Gambar 4.7
Salah satu Pusat Perbelanjaan di Kelurahan Serang



Sumber : RPLP Kelurahan Serang, 2016

Sektor perekonomian yang berbasis perdagangan dan jasa tersebut dirasa mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Kelurahan Serang . walaupun masih ada kesenjangan perekonomian di Kelurahan Serang, khususnya di kawasan yang terindikasi kumuh Kampung Tirtalaya RW 24 ditandai dengan masih minimnya sarana prasarana infrastruktur penunjang.

Dalam sektor sosial, Pluralisme adalah ciri dari masyarakat Kelurahan Serang. Warga asli Sunda Jawa Serang dengan warga pendatang dari berbagai suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang telah membaaur menjadi satu. Setiap permasalahan di kampung, diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Ketua RT atau RW masing-masing. Beberapa yang dianggap tokoh masyarakat dan agama menjadi narasumber di setiap kegiatan musyawarah. Sedangkan dalam kegiatan seni dan budaya yang berkembang adalah marawis, *hadroh*, karawitan dan campur sari serta qosidahan. Kegiatan seni qosidahan

perkembangannya cukup baik di RW 02. Kelompok sosial kemasyarakatan yang ada yaitu kelompok pengajian PKK, dan Posyandu. Selain Kelurahan sebagai lembaga formal pemerintahan, terdapat pula Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk dalam rangka wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang salah satunya yakni dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Selain dalam rangka perbaikan lingkungan fisik, BKM juga merupakan wadah untuk perbaikan kondisi lingkungan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat.

BKM atau badan Keswadayaan Masyarakat yang dahulunya disebut LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), merupakan sebuah lembaga kepemimpinan kolektif dan berperan sebagai representasi warga dengan proses pemilihan langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencaloan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. Kekuasaan atau kewenangannya dan legitimasinya bersumber dari masyarakat setempat. Di kelurahan Serang terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat yang bernama BKM Singandaru, yang beralamatkan di Jl. Empat Lima No.27 Kelurahan Serang (Samping Kantor Kelurahan Serang).

BKM Singandaru dibentuk melalui Rembug Pembentukan BKM pada tanggal 15 Januari 2013 yang dihadiri oleh 76 orang. Dalam rembug tersebut dibahas dan disepakati Visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar BKM dan anggota BKM. Visi dan Misi BKM Singandaru adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kelurahan Serang yang Maju, Sejahtera, Mandiri dan Madani dengan Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan melalui perbaikan, penanggulangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat miskin perkotaan”,

Sedangkan Misinya adalah :

“Terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dalam kondisi yang tertib , aman dan damai sehingga terciptanya lingkungan yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan”.

Dalam rembug tersebut juga terpilih anggota Pimpinan Kolektif BKM dan Koordinator BKM melalui voting tertutup oleh para anggota BKM terpilih secara periodik (bergantian), karena setiap anggota BKM memiliki peluang yang sama sebagai Koordinator BKM. Saat ini Koordinator BKM dipegang oleh H. Tata Winata, berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan dan di sahkan/dicatatkan di Notaris H. M Islamsyah Arifin,SH No.157 pada tanggal 16 Januari 2013.

Dalam kepengurusannya selain anggota pimpinan kolektif, terdapat pula Unit-unit Pengelola diantaranya : Pengelola Keuangan, Pengelola Lingkungan dan Pengelola Sosial. Hal tersebut sesuai berdasarkan SK BKM No 02/SK/BKM/2013 tentang Pengukuhan Sekretaris, Unit Pelaksana Lapangan (UPL), Unit Pelaksana Lingkungan (UPK) dan Unit Pelaksana Sosial (UPS). Berdasarkan hasil rapat musyawarah warga, susunan pengurus

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Singandaru Tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Daftar susunan Pengurus BKM Singandaru Tahun 2016

No	Nama	Pekerjaan	Posisi
1.	H. Tata Winata	Pensiunan PNS	Pimpinan Kolektif Koordinator BKM
2.	H. Husni	Pensiunan PNS	Pimpinan Kolektif BKM
3.	Jakaria	Pegawai Krakatau Steel	Pimpinan Kolektif BKM
4.	Hasani	Wiraswasta	Pimpinan Kolektif BKM
5.	Azril Alam	Pensiunan PNS	Pimpinan Kolektif BKM
6.	Syaeful Bakhri	Wiraswasta	Pimpinan Kolektif BKM
7.	Ridwan	Wiraswasta	Pimpinan Kolektif BKM
8.	Suherman	<i>Security</i>	Pimpinan Kolektif BKM
9.	Abdul Latief	Wiraswasta	Pimpinan Kolektif BKM
10.	Dedi Wahyudin	PNS	Sekretariat
11.	Yayat Sudrajat	Wiraswasta	Sekretariat
12.	H. Hikmat	Kontraktor	Unit Pengelola Lingkungan
13.	Suhaeli	Wiraswasta	Unit Pengelola Lingkungan
14.	Udin Fariki	Pensiunan	Unit Pengelola Lingkungan
15.	Encob Subriyah	Staf Kelurahan Serang	Unit Pengelola Keuangan
16.	Roni Syahroni	Wiraswasta	Unit Pengelola Keuangan
17.	Maria Ulfah	Staf Kelurahan Serang	Unit Pengelola Keuangan
18.	Moh Subchan	Dosen	Unit Pengelola Sosial
19.	Iri Mustari	Staf Kelurahan Serang	Unit Pengelola Sosial
20	Juli	Wiraswasta	Unit Pengelola Sosial

(Sumber : *Draft* Rembug Warga Kelurahan Serang Tahun 2016)

Pembentukan BKM Singandaru bertujuan agar: (1) Masyarakat mampu mengembalikan Nilai-nilai luhur kemanusiaan dan Prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat; (2) Masyarakat mampu untuk menggerakkan dan mengembangkan potensi yang ada sebagai proses pembelajaran untuk menggali persoalan sehingga dapat memahami

kebutuhannya dalam menangani masalah kumuh; (3) Masyarakat mampu menyusun rencana kegiatan kedepan didalam menanggulangi persoalan kumuh di lingkungan masing-masing.

Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Singandaru memiliki peran strategis dalam percepatan penanganan kumuh di Kelurahan Serang. Penanganan kumuh tersebut meliputi kegiatan Tridaya (aspek Sosial, aspek Ekonomi dan aspek Lingkungan) yang merupakan kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan meluasnya kumuh di Perkotaan dilakukan secara komprehensif, antara penanganan fisik/infrastruktur, pengembangan ekonomi (*Local economic development*) dan kegiatan sosial (aturan bersama, perubahan sikap dan perilaku, PHBS, dll).

Seiring dengan adanya Program KOTAKU, dilakukannya revitalisasi peran BKM Singandaru. Revitalisasi peran tersebut, berimbas pada keragaman tugas BKM saat ini. Tugas tersebut meliputi; (1) menyusun baseline kumuh, Profil Kumuh dan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP); (2) membuat rencana tindak (*action plan*); (3) menjalankan *chanelling* rencana penganggaran dengan Pemda; (4) membangun infrastruktur untuk pengelolaan dan penanganan kumuh baru di sekitar lingkungannya serta memonitor evaluasi pelaksanaannya. Maka diharapkan BKM Singandaru dapat berfungsi secara optimal guna mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan penanganan kumuh di wilayah Kelurahan Serang.

4.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang

Program KOTAKU adalah suatu program partisipatif yang mempunyai tujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga masyarakat mampu hidup secara sehat. Dengan kondisi yang sehat maka yang diharapkan selanjutnya adalah masyarakat kelurahan Serang mampu menjaga kebersihan lingkungan dan sekitar sehingga tidak ada lagi *slum area* di kelurahan. Apabila kondisi lingkungan sudah tertata dengan baik dan maksimal maka diharapkan masyarakat mampu menjaga kondisi yang sudah ada tersebut. Dengan kondisi lingkungan yang sehat dan tertata diharapkan kondisi kesehatan masyarakat meningkat, dengan demikian diasumsikan masyarakat yang sehat akan mampu bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat disebut sebagai manusia yang BERDAYA. Manusia yang berdaya akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan berguna bagi manusia yang lain. Apabila lingkungan sudah sesuai dengan standar kebutuhan hidup masyarakat sehat di Kelurahan tersebut maka akan tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik dan masyarakat dapat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan secara mandiri dan disebutlah mereka sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bermoral, berjati diri, dan mandiri.

Berkaitan dengan konsep-konsep dasar pembangunan Kelurahan Serang yang berbasis masyarakat, masyarakat sadar betul akan arti pentingnya peran serta masyarakat dalam peran serta pembangunan, atas dasar tersebut konsep

dasar pembangunan tidak terlepas dengan visi dan misi Kelurahan menuju Kelurahan yang diinginkan. Visi kelurahan Serang adalah :

“MENJADIKAN LINGKUNGAN KELURAHAN YANG SEHAT, BERSIH DAN RAPIH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK”.

Sedangkan Misi Kelurahan Serang adalah :

1. Meningkatkan Lingkungan yang Bersih dan rapih berskala Kota
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan Permukiman
3. Meningkatkan Kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan pasrtisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat

KOTAKU pada prinsipnya merupakan kegiatan yang bersifat partisipatif. Untuk itu landasan dan proses perencanaan yang dijalankan berorientasi pada masyarakat. Walaupun data dan informasi yang dibutuhkan perlu dimulai dari lembaga formal / pemerintah karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah tetapi proses dan produk perencanaan harus betul-betul dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Terdapat 4 (empat) tahapan dalam KOTAKU di Kelurahan Serang, yaitu :

1. Persiapan
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan, dan
4. Keberlanjutan

Tahapan tersebut dapat berulang secara dalam kurun waktu tertentu mengikuti tahapan kegiatan perencanaan pembangunan regular. Secara detail tahapan kegiatan di tingkat kelurahan/desa dalam gambar 4. berikut:

1. Persiapan

Pada tahapan ini beberapa kegiatan akan dilakukan, yaitu sosialisasi awal di tingkat kelurahan/desa, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), serta pembangunan kelembagaan perencanaan partisipatif tingkat desa/kelurahan.

2. Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman layak huni di tingkat kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang, sesuai dengan visi dan misi pembangunan permukiman tingkat kelurahan/desa untuk mencapai 0 ha permukiman kumuh yang dituangkan dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Dokumen RPLP Kumuh atau perencanaan yang setara, merupakan rencana makro Kelurahan/Desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/Desa yang berbatasan. Perencanaan disajikan pada peta dengan skala ketelitian 1:5000.

Dokumen RTPLP, merupakan bagian dari perencanaan RPLP yang fokus pada perencanaan kawasan prioritas kumuh yang terpilih untuk ditangani pada tahap pertama secara komprehensif. Hasil perencanaan disajikan pada peta dengan skala ketelitian 1:1000 atau pada lokasi tertentu dapat disajikan pada peta dengan skala ketelitian 1:500 atau 1:100 sesuai kebutuhan. Sedangkan dokumen Aturan bersama memuat aturan-

aturan kesepakatan bersama ditingkat komunitas. Aturan tersebut diikuti secara konsisten untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan layak huni. Dokumen perencanaan tingkat Desa/kelurahan disusun selaras/sinkron dengan dokumen perencanaan RP2KPKP tingkat Kabupaten/Kota. Proses sinkronisasi tersebut terselenggara melalui media forum konsultasi, secara berkala dan sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingan perencanaan kelurahan /desa dan kabupaten/kota. Forum konsultasi ini tidak dibatasi hanya konsultasi persoalan permukiman saja tetapi dapat diperluas melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi pembangunan kota.

Tujuan perencanaan ini adalah untuk menyelesaikan semua persoalan kumuh yang muncul sebagai indikator/gejala dan akar penyebab permukiman kumuh dari berbagai aspek (pelayanan prasarana, sarana dan utilitas, sosial-budaya, ekonomi, lahan dan legal) serta merumuskan program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi permukiman kelurahan/desa.

Selama tahap Perencanaan Partisipatif, Lurah/kades dan BKM/LKM, dibantu TIPP, melakukan penggalangan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas data, analisis, dan rencana. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, TIPP didampingi Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan dan mendapatkan bimbingan teknis secara berkala dari Pokja PKP.

a. Membangun Visi Permukiman dan Refleksi Perkara Kritis (RPK)

Membangun visi permukiman merupakan kegiatan merumuskan cita-cita masyarakat terhadap kondisi permukiman layak huni dan berkelanjutan yang akan dicapai pada masa mendatang dengan tujuan agar perencanaan masyarakat lebih terarah sesuai dengan visi yang ingin dicapai. Hal ini bertujuan agar perencanaan yang dibuat oleh masyarakat lebih terarah dan masyarakat dapat menyusun strategi untuk mengurangi perbedaan/jarak antara kondisi saat ini dengan visi yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil visi Permukiman, kemudian dilaksanakan Refleksi Perkara Kritis (RPK) dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan permukiman saat ini serta menemukannya potensi dan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan untuk pencapaian visi permukiman. Disamping itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan terhadap kondisi permukiman di wilayahnya, bahwa masyarakat mampu memberikan solusi dan perbaikan terhadap kondisi permukiman yang dapat yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap anggota masyarakat mampu berkontribusi (baik tenaga, waktu, pikiran, uang bagi kelompok lain untuk

berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) secara bersama-sama melakukan penataan permukiman

b. Kegiatan Pemetaan Swadaya

Pemetaan Swadaya adalah proses pengumpulan data, identifikasi dan kajian kendala serta potensi yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap kondisi riil wilayah permukiman. Kegiatan pemetaan swadaya difokuskan pada kegiatan konsolidasi data base (*baseline*) dan kajian data dan informasi persoalan, potensi, kendala pengembangan sosial ekonomi dan lingkungan serta pengaruh kebijakan pembangunan kota terhadap permukiman kumuh. Kegiatan Pemetaan Swadaya yang dilakukan, adalah :

1. Konsolidasi/Review Data Base (*baseline*) 100 0 100
2. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya
3. Perumusan Skenario Alternatif Konsep dan Penetapan Kawasan Prioritas
4. Penyusunan RPLP dan Penyusunan RTPLP
5. Penyusunan Anggaran Dan Pemasaran Program Penataan Permukiman
6. Perumusan Rencana Investasi, Aturan Bersama Dan Rencana Pengelolaan Kawasan

3. Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi ataupun infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel dimana setiap transaksi harus dapat dipertanggung jawabkan dan dicatatkan dalam pembukuan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah dokumen RPLP disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di RPLP serta merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber, diantaranya :

1. APBN/ Bantuan dana investasi
2. APBD
3. APB Kelurahan
4. Swasta
5. Swadaya dll.

Pelaksanaan tingkat kelurahan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur, antara lain sebagai berikut :

- a) Kegiatan investasi infrastruktur skala lingkungan
- b) Kegiatan ekonomi terdiri dari :
 - (1) P2B (ekonomi rumah tangga dan ekonomi local);
 - (2) Kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat
 - (3) Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan dapat terdiri Kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya:
 - a. Pelatihan/on the job training kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat;
 - b. Sosialisasi terus menerus;
 - c. Pelatihan /on the job training vocational; dll.
- c) Pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat
- d) Pelaksanaan aturan bersama
- e) Pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
- f) Kegiatan pemasaran program permukiman

- g) Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi Permukiman.

4. Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di mana di dalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
- b. Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kolaborasi secara menerus

Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan di atas, di Kelurahan Serang pada bulan Mei 2017 telah menyelesaikan tahapan perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan adanya produk perencanaan Kelurahan Serang sebagai Pedoman Pembangunan Kelurahan yakni Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), yang mana produk perencanaan tersebut digunakan dalam jangka waktu sampai 5 tahun yang akan datang yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. RPLP disebut sebagai produk perencanaannya masyarakat, dimana dalam penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam penggunaannya, RPLP ini dapat digunakan baik sebagai pedoman pembangunan Kelurahan Serang maupun sebagai proposal yang digunakan untuk mendapat dana swadaya, baik dari Pemda, swasta maupun

masyarakat atau dalam hal ini disebut *channeling*. Namun kiranya diperlakukan pembaharuan per tahun agar produk tidak usang dan karena sifat perubahan masyarakat yang dinamis. Dan saat ini, setelah RPLP telah disusun, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yakni tahapan penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) sesuai rencana desain kawasan yang diprakarsai oleh Pemda. DED merupakan gambar kerja secara mendetail dengan skala (perbandingan). Di dalam DED salah satunya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Indikasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam sektor ekonomi dan sosial serta pencengahan dan peningkatan kualitas lingkungan terdapat dalam Lampiran.

4.1.3 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Model Partisipasi *CLEAR* menurut Pratchett, Stoker dan Lowndes dalam Karianga (2011:233). Dalam Teori ini mengidentifikasi bahwa ada 5 (Lima) Indikator/ faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi, yaitu : (1) ***Can Do*** (*have a resources and knowledge to participate*) ; (2) ***Like To*** (*have a sense of attachment that reinforces participation*); (3) ***Enable To*** (*are provided with the opportunity for participation*); (4) ***Asked To*** (*are mobilized through public agencies and civic channels*); (5) ***Responded To*** (*see evidence that their*

views have been considered). Model ini dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk mengetahui bagaimana analisis perencanaan partisipatif di Kelurahan Serang dalam program KOTAKU dan menjawab permasalahan yang ada pada Analisis Perencanaan Partisipatif dengan Menggunakan Model *CLEAR* di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang) ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian penulis kode-kode, yaitu :

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan;
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban;
3. Kode I_{1,2} , Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang;
4. Kode I_{1,2} , Ketua RT I Lingkungan Tirtalaya Kelurahan Serang;
5. Kode I_{1,3} , Ketua RT II Lingkungan Tirtalaya Kelurahan Serang;

6. Kode I_{1.4} , Anggota Unit Pelaksana Keuangan BKM Singandaru Kelurahan Serang
7. Kode I_{1.5} , Anggota TIPP Kelurahan Serang
8. Kode I_{1.6} , Senior faskel Tim 6 Kelurahan Serang
9. Kode I_{2.1} , Warga Masyarakat Kelurahan Serang RW 24
10. Kode I_{2.2} , Kasi Ekbang Kelurahan Serang

Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban- jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.

4.1.4 Daftar Informan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Perencanaan Partisipatif dengan Menggunakan Model *CLEAR* di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang), penentuannya berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui tujuan dari penelitian serta apa yang akan peneliti teliti (menggunakan Teknik *Purposive*), sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih jelas mengetahui situasi fokus penelitian.

Sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui proses perencanaan partisipatif dalam program KOTAKU di Kelurahan Serang. Key informan dalam penelitian ini meliputi : (1) Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang; (2) Ketua RT 1 dan 2 Lingkungan Tirtalaya Kelurahan Serang selaku Penerima Manfaat Program KOTAKU; (3) Warga Masyarakat; (4) Anggota TIPP sekaligus sebagai Ketua Forum RW Kelurahan Serang; (5) Senior Fasilitator Kelurahan (Tim 6 Pendamping Kelurahan Serang). Sedangkan untuk *secondary informan* yakni Anggota Koordinator Kota Serang selaku Tim Teknis Tingkat Kota dan Kabid Ekonomi Pembangunan Kelurahan Serang (Staf Kelurahan). Adapun Daftar informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Daftar Informan

No	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan/ Pekerjaan	Keterangan
1.	I _{1.1}	Bapak H. Tata Winata	Pimpinan Kolektif Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
2.	I _{1.2} -I _{1.3}	Bapak Edi Santosa dan bapak Hasani	Ketua RT I dan II Lingkungan Tirtalaya Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
3.	I _{1.4}	Ibu Maria	Anggota Unit Pelaksana Keuangan BKM Singandaru Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>

4.	I _{1,5}	Bapak Nana Triana	Koordinator TIPP Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
5.	I _{1,6}	Bapak Moh. Nana Supriatna	Senior faskel Tim 6 Kelurahan Serang	<i>Key Informan</i>
6.	I _{2,1}	Ibu Yana	Warga Masyarakat Kelurahan Serang RW 24	<i>Secondary Informan</i>
7.	I _{2,2}	Bapak Nanang Suryana	Kasi Ekbang Kelurahan Serang	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti, 2017

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini berisi hasil analisis peneliti berdasarkan data-data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan Teori yang peneliti gunakan yaitu teori Model Partisipasi *CLEAR* menurut Pratchett, Stoker dan Lowndes dalam Karianga (2011:233), dimana terdapat lima dimensi atau indikator yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi, yaitu :

1. **Indikator *Can Do (have the resources and knowledge to participate)***, berhubungan dengan bagaimana sumberdaya diperlukan untuk membuat argumen mereka (masyarakat). Sehingga mereka harus dimobilisasi dan diorganisir. Dengan cara pembangunan kapasitas, pelatihan dan dukungan relawan, pendampingan dll.
2. **Indikator *Like To (have a sense of attachment that reinforces participation)***, berhubungan dengan timbulnya rasa menjadi bagian dari sesuatu sehingga mereka (masyarakat) ingin berpartisipasi. Serta diperlukan sebuah pengenalan/identifikasi dengan badan publik yang

terkait. Dilakukan dengan cara pembaruan sipil, pengembangan masyarakat, persatuan masyarakat dan lain-lain.

3. **Indikator *Enable (To are provided with the opportunity for participation)***, berhubungan dengan diaktifkannya partisipasi masyarakat oleh badan-badan publik (infrastruktur jaringan sipil dan organisasi) untuk melakukannya.. Dengan cara berinvestasi dalam jaringan infrastruktur dan masyarakat sipil serta memperbaiki saluran komunikasi secara bersama
4. **Indikator *Asked To (are mobilized through public agencies and civic channels)***, berhubungan dengan permintaan langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi, seperti diminta pendapat mereka melalui mobilisasi yang dilakukan oleh badan-badan publik dan jaringan masyarakat.
5. **Indikator *Responded To (see evidence that their views have been considered)***, berhubungan dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat jika pendapat mereka didengarkan (walaupun tidak selalu setuju) dan dapat dilihat respon atau tanggapan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan.

Dalam Model *CLEAR* yang digunakan, menunjukkan faktor mana dari kelima faktor tersebut yang diterapkan kemudian faktor mana yang belum mendapat cukup perhatian dan bagaimana hubungan antara kelima faktor tersebut dapat ditingkatkan dalam mengembangkan respon yang lebih strategis atas tantangan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal ini adalah dalam

perencanaan suatu program yakni KOTAKU. Dari ke lima indikator dalam Model Partisipasi *CLEAR* yakni *Can Do*, *Like To*, *Enable To*, *Asked To*, dan *Responded To* peneliti pilih, karena Model Partisipasi *CLEAR* dianggap cocok digunakan sebagai indikator dalam analisis perencanaan Partisipatif di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Serang).

4.2.1 Indikator *Can Do* (have the resources and knowledge to participate)

Can Do merujuk pada argumen mengenai status sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap partisipasi. Seseorang yang memiliki keterampilan yang sesuai dan sumber daya adalah mereka yang lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi. Keterampilan dan sumber daya yang dimiliki seseorang memang lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi, seperti kemampuan berorganisasi. Hal ini pun terjadi dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang. Walaupun tidak diatur tentang syarat yang harus dipenuhi dalam keterlibatannya, namun keterampilan atau kemampuan tersebut kiranya dimiliki oleh masyarakat agar dapat menunjang keberhasilan program tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Moh Nana selaku Senior Faskel Tim 6 Kelurahan Serang berikut:

“Begini , jadi namanya berkontribusi itu kan pasti ada ya namanya syarat artinya kemampuan mereka dalam kontribusi yang diberikan. Kalau secara pengalaman organisasi, kalau ga tau apa-apa kan ya bingung nanti mau ngapain. Artinya disini partisipasi dalam hal keikutsertaan dalam

kelembagaan ya. Tidak menutup kemungkinan juga dalam TIPP juga begitu. Suatu keharusan untuk memiliki keahlian atau keterampilan untuk menunjang keberhasilan program....” (Bapak Moh Nana , 9 Mei 2017 di *basecamp* Faskel Tim 6)

Keterampilan dan sumber daya lebih sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pekerja yang status sosial ekonominya juga tinggi. Dalam hasil wawancara dan dokumentasi yang didapat oleh peneliti, di Kelurahan Serang dalam hal pendidikan dan sosial ekonomi masih menjadi permasalahan yang butuh perhatian khusus. Mendominasinya tamatan Sekolah Dasar (SD) mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Serang masih dalam standar yang rendah walaupun sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia.¹ Sedangkan dalam kondisi sosial ekonomi, masih banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai buruh² dan Usaha ekonomi Kecil yang dijalankan masyarakat belum optimal dikarenakan banyaknya pengusaha yang tidak memiliki perijinan usaha sehingga modal susah didapat dan pangsa pasar yang sempit. Selain itu disebabkan oleh *Skill* Sumber daya Manusia (SDM) yang masih kurang, terbatasnya peralatan yang tersedia, masih kurangnya kesadaran akan penggunaan bahan-bahan kimiawi serta masih banyaknya limbah-limbah yang belum dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menunjang perekonomian masyarakat sehingga dibuat rencana usaha ekonomi produktif di Kelurahan Serang untuk Tahun 2017-2021, baik untuk kawasan Kelurahan

¹ Dilihat dalam Tabel 4.4 dan Tabel 4.5

² Dapat dilihat dalam Tabel 4.6

Serang secara keseluruhan maupun kawasan prioritas penanganan kumuh, Kampung Tirtalaya RW 24.³ Data mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersedia dapat dilihat dalam Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Serang Tahun 2016

No.	Nama Pemilik Usaha	Jenis Usaha	Alamat
1.	Abdul Hakim	Sapu Lidi, Celengan	RT 004/RW 003
2.	Mutiah	Dendeng Daging	RT 002/RW 004
3.	Hj. Mariam	Sate Bandeng	RT 004/RW 002
4.	Aminah	Kue Kering	RT 003/RW 023
5.	Kadiyah	Simpring	RT 003/RW 023
6.	Asiah	Bakso kering ikan	RT 003/RW 004
7.	Jemiah	Keripik singkong	RT 003/RW 004
8.	Roisah	Kue sistik	RT 003/RW 004
9.	Siti	Dendeng Daging	RT 001/RW 003
10.	Nur	Kue basah	RT 003/RW 008
11.	Hambali	Kue kering	RT 002/RW 008
12.	Lusi	Hantaran nikah	RT 003/RW 004
13.	Aan	Kue basah dan kering	RT 003/RW 009
14	Endang Prihatin	Kue kering	RT 003/RW 008

Sumber : Profil Kelurahan Serang 2016

Pernyataan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak H.

Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut:

“Sosial ekonomi masyarakat disini itu banyaknya pekerja buruh ya, masih belum optimal UMKM kecil yang berjalan di Kelurahan Serang. Nah itu tuh yang jadi PR. Kita bangun masyarakatnya khususnya yang menengah kebawah agar perekonomiannya meningkat dengan usaha ekonomi kreatif yang lagi dicanangkan. Kalau masalah perekonomiannya ya gitu banyak yang ada ijin usaha jadi modal sama pasar susah ya, *Skill* SDM sama peralatan juga masih minim. Ya banyak lah yang perlu dibenahi, ada itu di draft rencana usaha ekonomi kreatif ya. Ya salah satunya di prioritas kumuh RW 24”(H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

³ Dapat dilihat dalam lampiran

Akan tetapi, tidak satupun ketrampilan dan sumber daya harus berasal dari orang yang memiliki status sosial dan ekonominya tinggi. Hal tersebut juga dimungkinkan untuk umum, relawan ataupun komunitas untuk menembus keterbatasan status sosial ekonomi yang dimiliki untuk berpartisipasi. Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Serang. Dalam hasil wawancara yang didapat, penggalangan relawan yang dilakukan dalam tahap persiapan program KOTAKU, membuka kesempatan kepada masyarakat dengan atau tanpa keahlian atau kemampuan yang dimiliki. Yang terpenting adalah rasa loyalitas, kepedulian akan lingkungannya serta kemauan untuk terlibat . Walaupun faktanya di Kelurahan Serang kesadaran masyarakatnya masih minim untuk terlibat dalam program KOTAKU. Hal di atas diungkapkan oleh Bapak H. Tata selaku Koodinator Pimkol BKM Singandaru Kelurahan Serang dan Bapak Moh. Nana selaku Senior Fasilitator Kelurahan (Faskel) Tim 6 Kelurahan Serang berikut:

“...Misalnya organisasi kemasyarakatan kaya BKM ini, ya dibutuhkan kepercayaan juga dari masyarakat, loyalitas, terus aja gitu berkontribusi intinya mah masyarakat tahu bagaimana kita pernah ikut kegiatan kemasyarakatan jadi kita beradaptasi gitu sama lingkungan...”(H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Moh. Nana selaku Senior Fasilitator Kelurahan (Faskel) Tim 6 Kelurahan Serang berikut:

“....Sedangkan di Kelurahan Serang ini sendiri kondisi masyarakat yang terlibat belum cukup baik ya, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.” (Bapak Moh Nana , 9 Mei 2017 di *basecamp* Faskel Tim 6)

Penggalangan relawan yang telah dilakukan di Kelurahan Serang nyatanya tidak mendorong dukungan relawan yang optimal. Dikarenakan tidak dilakukannya upaya peningkatan kemampuan yang ditujukan bahwa masyarakat juga diberi dukungan untuk meningkatkan ketrampilan dan sumber daya yang dibutuhkan mereka untuk terlibat, dalam hal ini yakni kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat. Sedangkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat menjadi salah satu strategi pelaksanaan program KOTAKU.⁴ Sehingga banyaknya relawan yang kurang faham akan mekanisme program KOTAKU dan keahlian dalam penataan kawasan permukiman yang belum memadai. Akibatnya mereka tidak bisa berkontribusi secara maksimal. Misalnya dalam kegiatan pemetaan swadaya, tidak adanya Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya (Pokja PS) di Kelurahan Serang, sehingga kebanyakan tugas dan peran diambil alih oleh Pendamping Teknis di lapangan (baik Faskel maupun Konsultan Teknik). Selain itu kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer di Kantor BKM Singandaru menyebabkan penyimpanan file atau berkas yang tidak tersusun rapi dan sistematis, sehingga banyak data yang *kececer* dan hilang tanpa ada *softcopy* yang tersedia. Dan hal tersebut juga mempengaruhi optimalisasi

⁴ Dapat dilihat dalam Lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KOTAKU tingkat Desa/Kelurahan

daya dukungan aparat atau relawan terkait keberhasilan program. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Moh Nana selaku Senior faskel Tim 6 Kelurahan Serang dan didukung oleh pernyataan bapak Bapak H. Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut :

“Misalnya dalam hal pemetaan swadaya. Itu kan hakikatnya mereka gitu ya (masyarakat) yang lebih harus mendominasi perannya. Tidak adanya Pokja PS ya, jadinya kebanyakan malah tim pendamping atau konsultan tekniknya yang banyak *action* di lapangan. Sedangkan mereka bersifat membantu sebisa mereka.”(Bapak Moh Nana , 9 Mei 2017 di *basecamp* Faskel Tim 6)

Pernyataan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak H.

Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut:

“Belum dilakukan kalau masalah penguatan kapasitas kelembagaan. Kalau pengembangan kelembagaan sudah. Penguatan kapasitas kelembagaan itu persoalannya terbentur banyak kendala ya jadi masih dalam rencana... ya . kalau Pokja pemetaan swadaya belum ada ya disini.. kalau kendala itu di kita kurang fasilitas komputer. Jadi pas cari data gini ribet ketumpuk-tumpuk kadang ilang kan. Jadi perlu lah itu komputer buat *nyimpen* data (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat dilihat beberapa masalah atau hambatan dalam indikator *Can Do* yang diterapkan, seperti seperti belum dilakukannya pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, sarana penunjang yang belum memadai, dalam hal pendidikan dan sosial ekonomi masih menjadi permasalahan yang butuh perhatian khusus yang ditangani dengan dibuatnya rencana usaha ekonomi kreatif.

4.2.2 Indikator *Like To (have a sense of attachment that reinforces participation)*

Like To bersandar pada gagasan bahwa orang-orang menjadi bagian dari sesuatu yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi. Apabila seseorang merasa menjadi bagian dari sesuatu maka mereka akan mau terlibat. Tetapi jika ia merasa dikecualikan atau dengan perasaan tidak diterima, maka ia dapat memutuskan untuk tidak terlibat atau tidak berpartisipasi. Rasa kepercayaan, koneksi dan jaringan yang dapat terhubung menjadi modal sosial untuk dapat berkerjasama secara efektif. Rasa kemasyarakatan dapat menjadi motivator yang kuat untuk berpartisipasi. Namun, mengingat banyaknya keragaman dalam masyarakat dan terdapatnya komunitas-komunitas apabila seseorang merasa tidak memiliki identitas dan memiliki perasaan menjadi orang luar dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi.

Perasaan menjadi bagian dari masyarakat ataupun perasaan menjadi bagian terhadap pelaksanaan program, dalam hal Program KOTAKU juga diperlukan selain kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki juga harus diikuti dengan perasaan bahwa mereka terlibat karena memiliki perasaan menjadi bagian dalam kemasyarakatan ataupun Program KOTAKU. Merasa menjadi bagian dari Program KOTAKU dapat dilihat bagaimana mereka yang memutuskan untuk terlibat menganggap penting Program KOTAKU dan apa yang melatar belakangi mereka untuk terlibat. Sehingga dapat terlihat apa yang sebenarnya masyarakat harapkan dalam keterlibatan di Program KOTAKU. Semua informan menganggap Program KOTAKU merupakan

program penting bagi masyarakat karena memberi manfaat diantaranya dengan penanganan kawasan kumuh yang tepat, maka masyarakat akan mandiri baik secara sosial maupun ekonomi serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah pudar seperti gotong royong. Demi terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dan tercapainya masyarakat yang Madani yakni masyarakat yang bermoral, berjati diri dan mandiri. Seperti apa yang dikatakan oleh H. Tata Koordinator Pimkol BKM Singandaru berikut:

“Penting, kan ini program buat masyarakat, berarti ntar manfaatnya bisa dinikmati ya buat masyarakat. Jadi gini intinya, kan setahu saya itu program KOTAKU buat menangani kumuh, dimulai dari masyarakatnya. kalau lingkungan sudah sesuai gitu ya dengan standar kebutuhan hidup sehat maka akan tercipta tuh tatanan kehidupan yang lebih baik dan masyarakat bisa melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan secara mandiri dan disebutlah mereka sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bermoral, berjati diri, dan mandiri, itu tujuan sebenarnya kalau berbicara menangani kumuh ya disini” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Dan hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Moh Nana Faskel Tim 6 Pendamping Kelurahan Serang yang menganggap keberadaan program KOTAKU penting bagi masyarakat:

“Pada dasarnya setiap program yang diperuntukkan bagi masyarakat itu penting ya keberadaannya. Kaya Program KOTAKU ini, kenapa penting, karena kan berbicara kumuh itu tidak hanya lingkungannya saja yang dibenahi tapi juga bagaimana setelahnya masyarakat menjaga keberlanjutannya. Jadi peran masyarakatpun ada disana. Nah kaya kita ini tim fasilitator kelurahan bukan hanya mendampingi, tapi lebih kepada mendorong masyarakat guna menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan seperti gotong royong ya, jadi Program KOTAKU ini bukan hanya fokus kepada pembangunan infrastrukturnya saja tapi membangun rasa kemandirian masyarakat guna kumuh ini bisa diatasi dan kedepannya

tidak ada lagi kumuh, maka menurut saya penting adanya program ini di masyarakat” (Bapak Moh Nana , 9 Mei 2017 di *basecamp* Faskel Tim 6)

Latar belakang dari semua informan yang terlibat dalam Program KOTAKU bermacam- macam. Ada yang merasa dirinya terpenggil karena jiwa sosial yang dimiliki atau rasa kemasyarakatan, adanya tanggung jawab atas jabatan yang diemban dan adanya koneksi atau jaringan dengan lembaga terkait yang menjadi latar belakang mengikuti program KOTAKU. Salah satu yang merasa terpenggil mengikuti program karena adanya koneksi dengan lembaga terkait sehingga direkomendasikan untuk ikut serta adalah Ibu Maria selaku anggota Unit Pelaksana Keuangan (UPK) BKM Singandaru Kelurahan Serang sekaligus menjabat sebagai pegawai di Kantor Kelurahan Serang, berikut :

“Saya ikut serta dalam program KOTAKU ini karena diminta ikut ya selain juga karena saya kerja ya di staf Kelurahan, disamping pekerjaan maka menurut saya tidak ada salahnya ikut. Menyangkut kesejahteraan masyarakat juga kan. Ya selagi saya tidak sibuk saya akan berkontribusi penuh...”(Ibu Maria, 18 Mei 2017 di Kantor Kelurahan Serang)

Lain halnya dengan Bapak Edi Santoso Ketua RT 1 RW 24 yang sebelumnya dia sudah terlibat dalam kegiatan Program sebelumnya di masyarakat, namun keterlibatannya dalam program KOTAKU karena dirujuk temannya yang kebetulan salah satu pengurus BKM Singandaru di Kelurahan Serang. berikut pernyataannya:

“Saya itu ya teh, sebelumnya sudah terlibat kalau ada kegiatan di masyarakat sini, saya menjabat ketua RT juga bukan baru-baru ini aja kan, jadi ya karena untuk masyarakat gitu ya, jadi saya ikutin apa aja

kegiatannya yang penting positif. Saya taunya program ini pas ada kumpul ya di Kelurahan. Nah pas ada struktur BKM yang baru saya diajak buat ikut, ya saya mah mau ya asal saya bisa berkontribusi gitu. Buat program KOTAKU ini kan katanya buat nanganin kumuh, kebetulan di RT saya itu masuk tuh untuk wilayah kumuh di Kelurahan Serang. jadi itu buat saya semakin ingin ya ikut serta” (Bapak Edi Santoso, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

Berdasarkan pernyataan tersebut jaringan, koneksi, rasa kemasyarakatan yang timbul menyebabkan dorongan masyarakat untuk terlibat dalam program KOTAKU. Namun kiranya bagi yang tidak memiliki hal-hal di atas maka mereka tidak memiliki dorongan untuk terlibat. Rasa kemasyarakatan dapat dipupuk dengan cara kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya terkait usaha peningkatan kesehatan lingkungan. Kegiatan yang sudah berlangsung pada bulan Mei 2016 tersebut menjadi salah satu upaya diluar program KOTAKU untuk memupuk rasa kebersamaan dan rasa kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Serang. Selain itu untuk memperoleh solusi menangani permasalahan utama di Kelurahan Serang yakni permasalahan pengelolaan sampah. Sepeerti yang diungkapkan oleh Ibu Maria selaku anggota Unit Pelaksana Keuangan (UPK) BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut :

“....Waktu Bintek Kader Lingkungan BLHD Kelurahan Serang itu kalau ga salah ya tanggal 26 Mei iya 2016. Itu mengenai pengelolaan sampah rumah tangga melalui Bank sampah. Ya karena kan disini itu permasalahan lingkungan yang *urgent* ya untuk segera ditangani ya masalah sampah. Itu di jalan-jalan mbak sampingnya ada tumpukan sampah .ya intinya pengelolaannya lah harus dilakukan oleh masyarakat ya biar bersih gitu lingkungannya. Biar rasa kemasyarakatannya juga ada.. Cuma karena ga berlanjut ya jadi ya kelar acara ga ada perubahan juga. Masalahnya ada di merekanya mbak, ya ga ada rasa percaya bisa berhasil terus di lain sisi mereka juga

belum ada kesadaran buat hidup sehat, jadinya belum efektif acara waktu itu.” (Ibu Maria, 18 Mei 2017 di Kantor Kelurahan Serang)

Namun upaya di atas dinilai belum berhasil dikarenakan masyarakat yang ikut serta tidak melakukan lebih lanjut di lingkungannya masing-masing. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dan belum adanya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat membuat upaya tersebut tidak efektif. Seperti halnya yang terjadi dalam perencanaan program KOTAKU. Adanya kecenderungan rasa takut akan tidak berjalannya program seperti yang diharapkan, sehingga ketidakpercayaan akan program tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi terkait program KOTAKU. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi Santoso selaku Ketua RT 1 RW 24 Kampung Tirtalaya Kelurahan Serang berikut:

“.....tapi jujur untuk pelaksanaannya saya belum begitu ngerti. Apa karena belum jalan ya pembangunannya. Makanya saya belum sosialisasiin ke masyarakat takut kalau ini ga jadi dari pemerintah” (Bapak Edi Santoso, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

Hal tersebut juga terjadi di RT 2 RW 24 Kampung Tirtalaya. Kedua RT tersebut masuk ke dalam kawasan prioritas kumuh dan perlu penanganan segera. Namun yang terjadi, kepercayaan tersebut tidak lantas timbul di masyarakat dikarenakan informasi yang tidak sampai. Padahal kepercayaan merupakan salah satu modal sosial untuk bekerjasama secara efektif. Seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Hasani selaku Ketua RT RW 24 Kelurahan Serang yang terindikasi kumuh berikut:

“.....Tapi sejujurnya saya masih ragu takut ga turun aja itu bantuan programnya . jadi masyarakat belum tahu program. Tahunya ada pembangunan tapi belum tahu namanya KOTAKU...” (Bapak Hasani, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kepercayaan masyarakat dikarenakan ada rasa dikecualikan atau perasaan tidak diterima sehingga mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Perasaan tidak diterima tersebut salah satunya disebabkan oleh keanekaragaman sosial di dalam masyarakat. Keanekaragaman perbedaan baik budaya, agama, suku dan sebagainya terkadang dapat menghalangi seseorang untuk berpartisipasi. Banyak yang beranggapan seseorang yang berada diluar di suatu komunitas atau kelompok yang didominasi oleh orang yang memiliki banyak kesamaan menjadi kendala bagi mereka yang merasa berbeda untuk berpartisipasi. Dalam hasil wawancara dan data yang telah diperoleh, hasil temuan mengenai keterlibatan masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang tidak dipengaruhi oleh keragaman agama dan sosial. Dalam sektor sosial, Pluralisme adalah ciri dari masyarakat Kelurahan Serang. Warga asli Sunda Jawa Serang dengan warga pendatang dari berbagai suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang telah membaur menjadi satu. Setiap permasalahan di kampung, diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Ketua RT atau RW masing-masing. Beberapa yang dianggap tokoh masyarakat dan agama menjadi

narasumber di setiap kegiatan musyawarah. Jadi tidak terkotak-kotak. Begitupun di kelembagaan kemasyarakatan BKM. Seperti yang diungkap oleh H. Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut :

“Ya alhamdulillah sih ya, selama saya menjabat ga ada yang namanya ada masalah soal perbedaan suku, ras agama atau apapun. Ya akrab aja kaya keluarga, baik pengurus BKM maupun KSM nya. Itu untuk kepengurusan periode pertama saya kalau untuk sekarang kan karena orang-orangnya baru jadi ya saya harap berjalan lah kaya dulu pada akrab ya, tapi saya kira sih ga ada nantinya masalah terkait perbedaan, karena mau di program apapun mau siapapun yang jadi pengurus, kita satu visi misi di BKM tuh” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam keanekaragaman budaya dan sosial di kelurahan Serang tidak mempengaruhi keterlibatan mereka dalam program KOTAKU. Hal tersebut juga berlaku pada keseragaman entitas antara perempuan dan laki-laki di Kepengurusan BKM, terutama banyaknya jumlah laki-laki, tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi.⁵ Sampai saat ini keinginan masyarakat secara umum (yang didalamnya terdapat kelompok rentan, miskin, wanita, anak, dan pemuda) untuk berpartisipasi, direspon baik dalam perencanaan program KOTAKU. Selain bertujuan menangani masalah kumuh dengan membangun infrastruktur fisik, Program KOTAKU berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang terindikasi kumuh. Masyarakat dituntut dapat ikut berpartisipasi karena permasalahan akan kumuh dirasakan masyarakat

⁵ Dapat dilihat dalam Tabel 4.8 Daftar anggota BKM Singandaru Tahun 2016

secara bersama. Maka dalam hal penanganannya , baik perempuan maupun laki-laki berperan sama penting untuk mencapai kehidupan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan ibu Maria anggota UPK BKM Singandaru berikut:

“Kalau menurut saya ,entah perempuan apa laki-laki ya tetep dilibatin disini. Di kepengurusan BKM misalnya, saya diikutsertakan didalamnya meskipun masih dalam tahap perencanaan ya, jadi kan belum kelihatan sebenarnya peran saya dimananya untuk pelaksanaan. Sama saja kaya perempuan pada umumnya ya di Kelurahan Serang memiliki kesempatan yang sama, meskipun banyak ya hambatan mereka partisipasinya masih minim karena tahulah kalau ibu-ibu itu banyak urusannya. Yang saya tahu banyak ko rencana-rencana pelatihan buat ibu-ibu juga, kaya pelatihan tata boga dll di Program KOTAKU ini, selain pelatihan buat kelembagaan ya, nah saya berharapnya dengan adanya program ini semakin banyak ya yang ikut serta agar juga masyarakat naik gitu derajat perekonomiannya juga”(Ibu Maria, 18 Mei 2017 di Kantor Kelurahan Serang)

Sehingga keseragaman entitas tidak berpengaruh kepada partisipasi masyarakat di dalam perencanaan Program KOTAKU di kelurahan Serang. Namun keterbatasan waktu menjadi faktor penghambat partisipasi wanita maupun laki-laki dalam partisipasi yang diberikan. Sependapat dengan hal tersebut, berikut pernyataan dari Bapak Nana Triatna selaku Koordinator TIPP Kelurahan Serang:

“.....Bukan karena beda agama ya suku atau apa , tinggal kemauan gitu. Mau ikut apa ga sama waktu. Soalnya banyak yang ga bisa dateng pas kumpul atau rapat karena kesibukan” (Bapak Nana Triatna , 10 Mei 2017 di Kantor BKM Singandaru Serang)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat dilihat beberapa masalah atau hambatan dalam indikator *Like To* yang diterapkan, seperti

kiranya bagi yang tidak memiliki koneksi dan jaringan maka mereka tidak memiliki dorongan untuk terlibat, serta upaya pemupukan kemasyarakatan dan solusi pengelolaan sampah dinilai belum berhasil dikarenakan masyarakat yang ikut serta tidak melakukan lebih lanjut di lingkungannya masing-masing. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dan belum adanya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat membuat upaya tersebut tidak efektif. Selain itu adanya kecenderungan rasa takut akan tidak berjalannya program seperti yang diharapkan, sehingga ketidakpercayaan akan program tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi terkait program KOTAKU.

4.2.3 Indikator *Enable (To are provided with the opportunity for participation)*

Enabled To merupakan keterbukaan akses dengan kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi. Pada saat seseorang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kelompok, organisasi ataupun kegiatan. Kemudian apakah seseorang itu dimungkinkan oleh kelompok, organisasi ataupun kegiatan tersebut untuk dapat berpartisipasi dan terlibat di dalamnya. Kemampuan dan keinginan tersebut haruslah mendapat umpan balik dari kelompok, organisasi atau kegiatan yang ingin diikuti.

Secara umum Program KOTAKU sudah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk terlibat, baik dalam tahap persiapan

sampai pada tahap keberlanjutan. Tidak adanya pengecualian masyarakat dalam golongan miskin, wanita, kelompok rentan dalam keterlibatannya di Program KOTAKU. Kelompok marginal di atas keikutsertaannya wajib kan diikutsertakan ke dalam program. Namun di Kelurahan Serang seringkali terjadi partisipasi yang kurang dari golongan *marginal* tersebut dikarenakan didasarkan keinginan individu itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh H. Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut:

“Semua, tanpa terkecuali boleh ikut. Karena kita ga mau ya mengkotak-kotakkan gitu. Kita himbau mereka semua buat ikut serta. Mau atau tidak mau kan urusan mereka ya .yang pasti kita sudah melakukan upaya sosialisasi kepada mereka tapi memang untuk kelompok marginal itu jarang yang ikut serta karena mereka sendiri ya yang ikut atau tidaknya. Tapi kita sudah himbau.” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Tidak adanya pengecualian tersebut, merupakan bentuk keterbukaan akses dimana dalam perencanaan yang dilakukan membuka kesempatan kepada siapa saja masyarakat di lokasi penanganan untuk ikut serta. Karena menurut ketentuan pelaksanaan Program KOTAKU di tingkat Kelurahan, pelibatan masyarakat lokasi sasaran sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan/pengelolaan dan pemeliharaan.⁶ Dalam tahap perencanaan yang dilakukan, adanya sosialisasi awal, Rembuk Kesiapan Warga atau disingkat RKM serta penggalangan relawan merupakan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait

⁶ Dalam Lampiran Juknis Program KOTAKU tingkat Kelurahan

program KOTAKU di Kelurahan Serang. hasil wawancara didapat menunjukkan bahwa sudah dilakukannya proses sosialisasi awal dan RKM di Kelurahan Serang guna membangun kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula penggalangan relawan dan agen sosialisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Tata selaku Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut:

“Sudah dilakukan, prosesnya kan ga hanya sosialisasi ya. Ada juga Rembuk Kesiapan Warga. Itu dilakukan untuk membangun kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan program KOTAKU. Hasilnya kita siarkan juga ke mereka...” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Namun sosialisasi awal yang sudah dilakukan mendapat kendala dari masyarakat itu sendiri, seperti yang terjadi di RW 24 RT 1 dan 2. Dimana masing-masing Ketua RT yang hadir dalam sosialisasi awal tidak mensosialisasikan kembali ke masyarakatnya, sehingga pada akhirnya sosialisasi tidak merata dan hal tersebut menjadi penghambat ketika kendala-kendala tersebut ditemukan di lapangan, seperti masyarakat tidak mengetahui keberadaan Program KOTAKU dan tidak bisa membedakan program KOTAKU dengan program sebelumnya yakni Program KOTAKU serta akan berdampak pada penjaringan relawan yang tidak merata di seluruh wilayah di Kelurahan Serang. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Hasani Ketua RT 2 Lingkungan Tirtalaya Kelurahan Serang berikut:

“...Apa karena belum jalan ya pembangunannya. Makanya saya belum sosialisasiin ke masyarakat takut kalau ini ga jadi dari pemerintah” (Bapak Edi Santoso, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

Hal di atas dibenarkan oleh Ibu Yana, selaku masyarakat di RT 2 RW 24

Kelurahan Serang berikut:

“Saya ga tahu teh, ada sosialisasi program apa itu tadi KOTAKU ya, setahu saya itu dulu kalau pembangunan sarana kaya jalan gitu PNPM. Kalau ini saya ga tahu. Ga ada pemberitahuan juga kalau ada program lagi disini”(Ibu Yana, 17 Mei 2017 di rumah ibu Yana)

Informasi tersebut juga tidak sampai kepada Kasie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Serang, dikarenakan baru dalam tugasnya di Kelurahan Serang maka iapun tidak sama sekali mengetahui perkembangan Program KOTAKU di Kelurahan Serang. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nanang Suryana,S.Pd, M.tpd selaku Kasie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Serang berikut:

““Saya disini baru ya, mutasi dari Kelurahan lain, jadi belum tahu apa-apa perkembangan soal Program KOTAKU ini. Ya setahu saya yang mengerti banget ya BKM ya, Pak haji”(Bapak Nanang Suryana, 17 Mei 2017 di Kantor Kelurahan Serang)

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwasanya sosialisasi awal dan Rembuk Kesiapan Warga serta Penggalangan relawan telah dilakukan. Akan tetapi masih adanya kendala penyampaian informasi baik informasi yang tertahan seperti di RW 24 yang notabenenya kawasan prioritas kumuh sampai pada aparat Kelurahan yang merupakan *stakeholder* namun tidak mengetahui perkembangan program KOTAKU diwilayahnya. Dalam

penyampaian informasi sebetulnya di Kelurahan Serang sudah menggunakan media elektronik seperti *Handphone* dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Bapak H.Tata selaku Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut:

“...Jadi ya digunakanlah media informasi kaya *handphone* buat sms atau telfon. Kalau untuk menggunakan media sosial gitu, saya sendiri aja belum pakai hp canggih. Setau saya belum ada penggunaan seperti itu” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Ditambahkan oleh Bapak Hasani selaku Ketua RT 2 RW 24 Kampung Tirtalaya Kelurahan Serang berikut:

“Kalau dikita itu ini teh, kumpulan di rumah RT atau RW gitu. Ya entah pengajian atau kumpulan rutin ya. Jadi dari situ sih kita bahas soal masalah di kampung kita” (Bapak Hasani, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

Media yang disebutkan di atas disadari bahwa belum efektif digunakan, dikarenakan terbatasnya masyarakat yang akan diberi informasi. Sistem perwakilan menyebabkan antusiasme masyarakat untuk ikut serta berkurang. Selain itu, untuk kumpul bersama atau rapat bersama masih adanya halangan masyarakat untuk hadir. Sehingga respon masyarakat masih minim. Penggunaan media papan informasipun belum dilakukan secara efektif, tidak di *update* nya informasi menyebabkan papan yang tidak *up to date* tersebut tidak menarik massa untuk sekedar melihat maupun mencari tahu keberadaan program KOTAKU. Ide kreatif pembuatan media massa berupa *Fotonovella* atau katalog masyarakat terkait Program KOTAKU yang rencananya memuat

4 edisi tidak bisa terealisasi dengan baik.⁷ Banyaknya kendala yang ada, baik prosedur pembuatan sampai dana pembuatan membuat rencana tersebut hanya rencana yang tidak ada realisasinya. Sedangkan belum digunakannya media sosial sebagai wadah informasi menyebabkan akses informasi yang terhambat untuk disebarluaskan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Tata selaku Koordinator BKM Singandaru Kelurahan Serang berikut:

“Di awal program itu ada rencana pembuatan media informasi ya buat masyarakat, kita namakan kegiatan paket penguatan media warga yang isinya itu Pembuatan *Fotonovella* memuat 4 edisi , namun lagi-lagi tidak bisa terbit ya. Padahal sudah ada itu tim redaksinya dari teman-teman relawan tinggal jalannya aja. Namanya kendala kan pasti ada saja. Entah dana, dukungan dan lain-lain. Jadi ya digunakanlah media informasi kaya *handphone* buat sms atau telfon. Kalau untuk menggunakan media sosial gitu, saya sendiri aja belum pakai hp canggih. Setau saya belum ada penggunaan seperti itu” “(H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat dilihat beberapa masalah atau hambatan dalam indikator *Enabled To* yang diterapkan, seperti sosialisasi awal dan Rembuk Kesiapan Warga serta Penggalangan relawan telah dilakukan. Akan tetapi masih adanya kendala penyampaian informasi baik informasi yang tertahan seperti di RW 24 yang notabenenya kawasan prioritas kumuh sampai pada aparat Kelurahan yang merupakan *stakeholder* namun tidak mengetahui perkembangan program KOTAKU diwilayahnya. Serta penggunaan media yang belum efektif dalam penyebaran informasi Program KOTAKU.

⁷ Proposal Kegiatan Penguatan Media Masyarakat (*Fotonovella*) dalam Lampiran

4.2.4 Indikator *Asked To (are mobilized through public agencies and civic channels)*

Asked To beranggapan bahwa orang-orang cenderung menjadi terlibat secara teratur ketika mereka diminta untuk terlibat. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi seringkali bergantung pada apakah mereka didekati atau tidak dan bagaimana mereka didekati. Berbagai pilihan untuk keterlibatan partisipasi adalah penting karena beberapa orang lebih nyaman dengan beberapa bentuk keterlibatan seperti rapat umum, sementara yang lain lebih suka terlibat melalui diskusi *online*. Beberapa orang berpartisipasi untuk berbicara mengenai pengalaman dari masyarakatnya atau lingkungannya sementara yang lain ingin terlibat berdasarkan pengetahuan mereka tentang layanan tertentu sebagai pengguna. Partisipasi dapat dimobilisasi dengan menggunakan insentif (misal *honorarium*), melalui pembentukan rasa kewajiban atau dengan menawarkan *bargaining*/pertukaran.

Program KOTAKU telah dijelaskan sebelumnya, membuka kesempatan seluas- luasnya dan membuka akses bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi. Namun, untuk lebih mengefektifkan berjalannya program, Program KOTAKU membangun strategi dengan mencari tokoh kunci yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk terlibat. Pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa kebanyakan pengurus yang mengikuti Program KOTAKU, baik itu BKM ataupun TIPP adalah orang-orang yang memang pernah menjabat dalam organisasi kemasyarakatan seperti Ketua RW, Ketua RT, Staf Kelurahan,

Forum RW dan lain sebagainya. Program KOTAKU melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut agar keterlibatannya dapat mempengaruhi masyarakat yang telah menaruh kepercayaan bagi orang-orang yang sudah lama terjun di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menyerap partisipasi sebanyak-banyaknya. Hal tersebut berlaku di Kelurahan Serang seperti yang diungkapkan oleh Bapak Moh. Nana Senior Faskel Tim 6 pendamping Kelurahan Serang berikut:

“iya, kita cari tokoh kunci yang nantinya kan mereka dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Tokoh kunci ini kan nantinya mengajak masyarakat dan setahu saya kaya RT,RW,Staf Kelurahan maupun yang pernah terlibat ya dalam kegiatan masyarakat pastinya masyarakat lebih percaya kepada mereka ketimbang orang baru” (Bapak Moh Nana , 9 Mei 2017 di *basecamp* Faskel Tim 6)

Pendekatan ini pula yang diakui beberapa pengurus BKM maupun RT yang terlibat Beberapa dari mereka memang diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan Program KOTAKU.

“Saya itu ya teh, sebelumnya sudah terlibat kalau ada kegiatan di masyarakat sini, saya menjabat ketua RT juga bukan baru-baru ini aja kan, jadi ya karena untuk masyarakat gitu ya, jadi saya ikutin apa aja kegiatannya yang penting positif. Saya taunya program ini pas ada kumpul ya di Kelurahan. Nah pas ada struktur BKM yang baru saya diajak buat ikut, ya saya mah mau ya asal saya bisa berkontribusi gitu” (Bapak Hasani, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

“Di kepengurusan BKM misalnya, saya diikutsertakan didalamnya meskipun masih dalam tahap perencanaan ya, jadi kan belum kelihatan sebenarnya peran saya dimananya untuk pelaksanaan”(Ibu Maria, 18 Mei 2017 di Kantor Kelurahan Serang)

Tetapi bukan berarti Program KOTAKU hanya melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh kunci saja. Masyarakat luas dilibatkan dan diikutsertakan,

namun hanya yang aktif mengikuti rapat-rapat dan pertemuan masyarakat yang mengetahui Program KOTAKU sehingga keikutsertaannya didorong oleh kepedulian. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru berikut:

“.....ya kita buka kesempatan yang besar ya buat siapapun yang mau ikut dan peduli dengan lingkungannya, kaya kepengurusan BKM sekarang ini kan orang-orangnya baru. Artinya saya doang yang dari kepengurusan periode kemarin. Nah ada beberapa yang baru ikut kegiatan kemasyarakatan kaya BKM, ya kita rangkul. Artinya meteka ikut saja kan sudah nunjukin rasa peduli mereka itu yang terpenting jadi perlu didekati itu untuk partisipasinya” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Permintaan pelibatan masyarakat dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Serang melalui sistem perwakilan. Dimana keseluruhan masyarakat tanpa terkecuali, dengan digerakkannya badan-badan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Singandaru, Tim Inti Perencanaan Partisipatif maupun RT RW yang terkait. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru berikut:

“Kami BKM sebagai wadahnya masyarakat, pihak Kelurahan dan juga aparatur sipil Kelurahan ya. Baik RW maupun RT. Soalnya mereka kan kepanjangan dari Kelurahan di lini paling bawah yag langsung bersinggungan dengan masyarakat. Jadi kalau RW dan RT ini menurut saya yang paling efektif ya memobilisasi partisipasi masyarakat selain itu kalau di program ada TIPP yang anggotanya juga berasal dari segala lapisan masyarakat ya salah satunya RW dan RT kita di Kelurahan Serang. Nah di kita itu sifatnya kan relawan tidak ada gaji, sukarela gitu, kalau dari saya pribadi kan karena sudah lama ya berkecimpung di kemasyarakatan ya akan terus terlibat...” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Mobilisasi yang dilakukan oleh badan-badan tersebut dinilai efektif karena lini yang paling dasar untuk mengetahui dan bersinggungan langsung di lingkungan terkait. Namun masih adanya permasalahan yang terjadi sehingga masih banyaknya masyarakat khususnya di wilayah prioritas kumuh Kelurahan Serang, tidak mengetahui program yang sedang dicanangkan. Hal tersebut disebabkan komunikasi berjenjang yang mana dilakukan dari mulut ke mulut, hal ini riskan dikarenakan apabila informasi terhenti di salah satu pihak maka informasi tersebut tidak akan sampai pada masyarakat secara luas. Dan begitu pula yang terjadi di masyarakat, tidak adanya usaha untuk mengetahui adanya program pembangunan yang akan dijalankan mengingat kondisi lingkungannya. Sehingga diperlukan kerjasama agar timbal balik dapat dilakukan guna suksesnya program penataan kawasan permukiman di wilayah Kelurahan Serang, khususnya wilayah prioritas kumuh. Permasalahan seperti di atas seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasani selaku Ketua RT 2 RW 24 Lingkungan Tirtalaya yang terindikasi kumuh:

“Iya belum teh. Kita belum ngasih tau ini ada program bantuan dari pemerintah. Kalau sudah fix ada dan turun gitu dananya atau bantuannya kita langsung bilang ke mereka”.” (Bapak Hasani, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

Kendala-kendala seperti yang diungkapkan di atas dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Namun di lain sisi terdapat cara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Serang dalam program KOTAKU. Seperti tersedianya berbagai pilihan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program KOTAKU. Baik dalam penggunaan media maupun

bahan masukan atau materi yang dibahas dalam forum pertemuan. Dalam penggunaan media, seperti yang sudah dijelaskan di poin awal, diskusi *online* belum dipergunakan dalam forum diskusi yang diadakan dalam kegiatan program KOTAKU. Masih digunakannya model diskusi lama, dengan pertemuan tatap muka atau rapat bersama. Setiap alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan dimasing-masing penggunaannya. Namun perlu kiranya dipertimbangkan agar partisipasi masyarakat dapat terakomodir secara baik dan dapat berjalan seoptimal mungkin. Sedangkan dalam hal materi, dalam forum yang diadakan setiap materi sudah ditentukan oleh pelaksana kegiatan agar tidak menyimpang dari kegiatan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nana Triatna selaku Koordinator TIPP Kelurahan Serang berikut:

“Kalau kumpul formal gitu biasanya materi diskusi nya atau yang mau dibahasnya sudah ditentukan”.(Bapak Nana, 10 Mei 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Partisipasi masyarakat dapat dimobilisasi dengan berbagai cara salah satunya adalah *honorium*. Namun dikarenakan ini program bersama, pelaku dan penikmat manfaat adalah masyarakat maka tidak adanya *honorium* atau kompensasi yang diberikan dalam Program KOTAKU, dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat. BKM dituntut bekerja secara sukarela untuk mengakomodir masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Dalam wawancara yang dilakukan, di BKM Singandaru Kelurahan Serang, perangkat pengurus BKM yang menjadi informan menyatakan sukarela mengikuti program KOTAKU dan tidak merasa dipaksa untuk ikut. Kalaupun pada awal keterlibatannya ditunjuk atau diminta, tetapi semua informan menyatakan selama Program

KOTAKU memberikan manfaat bagi masyarakat banyak mereka bersedia terlibat meskipun tidak dibayar. Salah satunya seperti yang di katakana oleh Bapak H.Tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru berikut:

“..di kita itu sifatnya kan relawan tidak ada gaji, sukarela gitu, kalau dari saya pribadi kan karena sudah lama ya berkecimpung di kemasyarakatan ya akan terus terlibat. Intinya bermanfaat lah buat lingkungan sekitar walaupun tanpa gaji atau insentif seperti moto BKM Singandaru ya, Amanah dan Ikhlas.” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Di Kelurahan Serang beberapa pengurus memang rata-rata adalah orang yang sudah lama bergerak dalam kegiatan di masyarakat dan berkerja di bidang sosial, sehingga mereka tidak mempermasalahkan tidak adanya kompensasi selama biaya operasional mereka juga tetap dibiayai oleh penyedia program. Sikap sukarela yang ditunjukkan di Kelurahan Serang diharapkan murni niat tulus tanpa membawa bendera kepentingan atau kepentingan-kepentingan politik di dalamnya seperti contoh salah satu pengurus nantinya adalah calon anggota legislatif ataupun sebagainya dan sengaja berpartisipasi dalam Program KOTAKU dalam rangka mencari simpatisan. Karena dengan mottonya tersebut di harpak BKm Singandaru dapat amanah dalam menjalankan perannya sebagai wadahnya masyarakat Kelurahan Serang.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat dilihat beberapa masalah atau hambatan dalam indikator *Asked To* yang diterapkan, seperti masih banyaknya masyarakat khususnya di wilayah prioritas kumuh Kelurahan Serang, tidak mengetahui program yang sedang dicanangkan. Hal

tersebut disebabkan komunikasi berjenjang yang mana dilakukan dari mulut ke mulut, hal ini riskan dikarenakan apabila informasi terhenti di salah satu pihak maka informasi tersebut tidak akan sampai pada masyarakat secara luas. Dan begitu pula yang terjadi di masyarakat, tidak adanya usaha untuk mengetahui adanya program pembangunan yang akan dijalankan mengingat kondisi lingkungannya. Sehingga diperlukan kerjasama agar timbal balik dapat dilakukan guna suksesnya program penataan kawasan permukiman di wilayah Kelurahan Serang, khususnya wilayah prioritas kumuh. Serta masih digunakannya model diskusi lama, dengan pertemuan tatap muka atau rapat bersama. Setiap alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan dimasing-masing penggunaannya. Namun perlu kiranya dipertimbangkan agar partisipasi masyarakat dapat terakomodir secara baik dan dapat berjalan seoptimal mungkin.

4.2.5 Indikator *Responded To* (see evidence that their views have been considered)

Responded To beranggapan bahwa orang-orang akan berpartisipasi secara berkelanjutan apabila mereka percaya bahwa keterlibatan mereka membuat sesuatu yang berbeda dan mencapai manfaat positif. Selain itu bagi orang-orang yang memutuskan untuk berpartisipasi mereka harus percaya bahwa mereka akan didengarkan dan tidak selalu setuju dengan suatu keputusan paling tidak pandangan-pandangan dari mereka telah diperhitungkan. Bagaimana para pemegang otoritas menimbang gagasan-

gagasan atau pesan dari berbagai konsultasi sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan. Bagaimana perbedaan gagasan atau pendapat dari berbagai peserta yang terlebih dahulu di prioritaskan. Daya tanggap (*Responsiveness*) adalah tentang memastikan *feedback* yang mungkin tidak selamanya positif. Masyarakat harus belajar untuk hidup dalam kekecewaan. Kepastian respon tergantung pada peran dari kualitas wakil terpilih dan pimpinan, musyawarah dan akuntabilitas untuk strategi pemberdayaan yang efektif.

Pelaksanaan Program KOTAKU, faktor *responded to* lebih tepat dianalisis untuk masyarakat di RW 24 RT 1 dan 2 sebagai penerima manfaat dan sebagai objek sasaran Program KOTAKU, dimana keberadaan mereka serta pendapat mereka harus di respon. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa respon masyarakat di RW 24 tidak seperti yang diharapkan, karena pada saat pengenalan program, tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan sosialisasi lanjutan tidak dilakukan oleh aparata RT setempat.

Mengingat bahwa bantuan Program KOTAKU ini diperuntukkan bagi kawasan yang terindikasi kumuh, khususnya kawasan prioritas yang terindikasi kumuh, maka semua wilayah mendapat bantuan dari pemerintah namun dalam proses pelaksanaan diutamakan kawasan yang masuk ke dalam kawasan prioritas terlebih dahulu. Sehingga dilakukanlah pengambilan keputusan yang tepat diantara beberapa pilihan gagasan yang terdapat dalam musyawarah bersama. Dasar pengambilan keputusan yakni daerah yang paling

urgent untuk segera ditangani dan masuk kedalam 7+1 indikator kumuh. Dan berikut seperti yang kemukakan oleh Bapak H.Tata selaku Koordinator BKM Singandaru:

“Kalau dasar pertimbangan itu kita memilih mana yang paling diprioritaskan ya artinya gini, mana yang paling *urgent* harus segera ditangani. Itu biasanya dasar yang dipilih. Ga karena misal dia dekat dengan pemimpin musyawarah dia doang yang didengarkan .Tidak begitu. nanti kawasan yang menjadi prioritas penanganan tadi disetujui tuh sama yang hadir untuk bagaimana dirumuskan solusi menanganinya bersama-sama” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Dari hasil wawancara yang didapat usulan untuk kawasan kumuh yang masuk dalam musyawarah tidak sertamerta diterima dan ditetapkan. Setelah musyawarah bersama mendapatkan hasil pemetaan kawasan kumuh sementara dari masyarakat, maka dilakukanlah kegiatan pemetaan swadaya dimana untuk menghasilkan peta-peta rencana penanganan. Namun, dala tahapan ini terjadi kendala yakni tidak adanya Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya (Pokja PS) dikarenakan kurangnya SDM yang ahli sehingga beban pekerjaan di bebankan kepada Tim Pendamping Teknis (Faskel) dan Konsultan Teknik yang terdapat di Kelurahan Serang. masyarakat hanya bisa membantu sebisanya. Seperti pengukuran dan lain-lain. Selebihnya diserahkan kepada Faskel maupun Konsultan Teknik seperti yang diungkapkan oleh H. Tata selaku Koordinator BKM Singandaru berikut:

“...Pas setelah dapet hasilnya itu. Kita cek ke lapangan lagi. Tapi karena kurang SDM yang ahli ya pemetaan swadaya ini belum terlalu baik dilakukan maksudya gini, peran masyarakat itu masih minim disitu. Membantu sebisanya aja kaya ngukur gitu” (H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Moh Nana selaku Senior Faskel Tim 6 Kelurahan Serang berikut:

“Ya ada prioritas kawasan yang harus egera ditangani itu dasar pastinya setelahnya hasil musyawarah warga kita bawa ke lapangan guna cek. Dilakukan Pemetaan Swadaya. Berhubung belum adanya POKja PS ya kita-kita yang mengerjakan”(Bapak Moh Nana , 9 Mei 2017 di *basecamp* Faskel Tim 6)

Memupuk rasa kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Serang. salah satunya adalah dengan dengan menjalin gotong royong, rasa memiliki serta komitmen yang ditumbuhkan dengan cara silaturahmi dan berkomunikasi dengan lancar. Sehingga rasa percaya tersebut akan timbul. Silaturahmi yang dimaksud yakni musyawarah tersebut. *Feedback* yang didapat atas keterlibatan masyarakat di Kelurahan Serang dalam Program KOTAKU yakni manfaat yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya program tersebut yakni hidup sehat dengan sarana prasarana yang ada serta peningkatan ekonomi di wilayah Kelurahan Serang, selain itu dapat mengenali kondisi lingkungannya serta terbangunnya aturan bersama yang disepakati untuk bersama-sama membiasakan diri berperilaku hidup sehat. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Hasani selaku Ketua RT 2 RW 24 Kelurahan Serang berikut:

“Yang kita dapat ya kalau menurut saya kita bisa lebih kenal daerah tempat tinggal kita sendiri. Tahu mana yang perlu dibenahi ya, soalnya kaya jalan misal gitu. Kita kan ngukur-ngukur kita lihat mana yang butuh banget di perbaiki. Ada aturan bersama yang disepakati dan juga kalau udah berhasil ini dilakuin. Manfaatnya kan kita nikmati bareng-bareng”(Bapak Hasani, 8 Mei 2017 di rumah Bapak Hasani)

Sehingga rasa percaya akan manfaat atau *Feedback* yang didapat oleh masyarakat dilakukan guna menjangkau partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu upaya yang dilakukan agar keikutsertaan masyarakat tetap terjaga atau berlanjut dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang yakni dengan adanya sosialisasi dan Rembuk Kesiapan Warga yang dilakukan. Nantinya akan dihasilkan visi yang dirumuskan dan disepakati bersama serta dilakukannya Refleksi Perkara Kritis yang bertujuan agar menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap masalah kumuh di wilayahnya. Sehingga komitmen, kekompakan dan kepedulian serta jalinan silaturahmi tetap terjaga sampai pada keberlanjutan program. Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. tata selaku Koordinator Pimkol BKM Singandaru berikut:

“Komitmen. Itu yang dari awal kita upayakan ya bersama-sama. bagaimana program ini berjalan bukan hanya pas diawal adanya program saja tapi nanti juga setelah pembangunan infrastruktur tetap dirawat ya sarana prasarana yang ada serta masyarakat itu sadar tentang menerapkan hidup sehat di lingkungannya. Karena suksesnya program kita yang ciptakan dan hasilnya kita yang nikmati bersama-sama.”(H. Tata, 17 April 2017 di Kantor BKM Singandaru)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat dilihat beberapa masalah atau hambatan dalam indikator *Responded To* yang diterapkan, seperti respon masyarakat di RW 24 tidak seperti yang diharapkan, karena pada saat pengenalan program, tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan sosialisasi lanjutan tidak dilakukan oleh aparata RT setempat. Serta tidak adanya Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya (Pokja PS) dikarenakan kurangnya SDM yang ahli sehingga beban pekerjaan di

bebankan kepada Tim Pendamping Teknis (Faskel) dan Konsultan Teknik yang terdapat di Kelurahan Serang. masyarakat hanya bisa membantu sebisanya.

4.3 Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian ini berisi hasil analisis peneliti berdasarkan data-data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan Teori. Program KOTAKU ialah Program yang bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten dan di tingkat Kelurahan/Desa. Salah satu pendekatan kegiatan yang dilakukan yakni kegiatan Tridaya. Dimana Tridaya merupakan kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan meluasnya kumuh meliputi aspek fisik/Lingkungan (penanganan fisik/infrastruktur), aspek Sosial (aturan bersama, perubahan sikap dan perilaku, PHBS, dll), aspek fisik/Lingkungan (penanganan fisik/infrastruktur) serta aspek pengembangan ekonomi (*Local economic development*). Rencana penanganan tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yakni RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) Kelurahan. Hal tersebut dilakukan guna terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat di permukiman kumuh, dengan penataan yang layak huni dan berkelanjutan melalui

peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat Desa/Kelurahan.⁸ Dilakukan secara kolaboratif dengan salah satu prinsipnya berorientasi pada pembangunan manusia dan aktifitas di Lingkungan tersebut. Sehingga *Platform* kolaborasi tersebut dilakukan oleh masyarakat Kelurahan beserta pihak perencana yang terkait di Kelurahan, yang didalamnya terdapat Perencanaan Partisipatif yang diartikan sebagai suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan /permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan program/ kegiatan. Masing-masing Kelurahan memiliki visi misi penataan permukiman kumuh. Dengan Visi dan misi tersebut, diharapkan dapat mendorong keberhasilan program KOTAKU di wilayah tersebut. Begitu pula di Kelurahan Serang. Permasalahan kumuh yang ada mengharuskan dilakukannya upaya penanganan yang tepat. Melalui Visi Misi penataan permukiman kumuh Kelurahan Serang. Atas dasar tersebut konsep dasar pembangunan Kelurahan Serang tidak terlepas dengan visi dan misi Kelurahan menuju Kelurahan yang diinginkan.

Visi kelurahan Serang adalah “MENJADIKAN LINGKUNGAN KELURAHAN YANG SEHAT, BERSIH DAN RAPIH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK”

Sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan Lingkungan yang Bersih dan rapih berskala Kota

⁸ Tujuan penyelenggaraan Program KOTAKU tingkat Kelurahan (dalam draft Juklak Program KOTAKU Tingkat Kelurahan)

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan Permukiman
3. Meningkatkan Kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Model Partisipasi CLEAR menurut Pratchett, Stoker dan Lowndes dalam Karianga (2011:233).

Dalam Teori ini mengidentifikasi bahwa ada 5 (Lima) Indikator/ faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi, yaitu :

(1) *Can Do (have a resources and knowledge to participate)* ; (2) *Like To (have a sense of attachment that reinforces participation)*; (3) *Enable To (are provided with the opportunity for participation)*; (4) *Asked To (are mobilized through public agencies and civic channels)*; (5) *Responded To (see evidence that their views have been considered)*. Berikut ini peneliti akan membahas lebih lanjut terkait analisis hasil penelitian.

Pertama, *Can Do* merujuk pada argumen mengenai status sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap partisipasi. Seseorang yang memiliki keterampilan yang sesuai dan sumber daya adalah mereka yang lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi. Keterampilan dan sumber daya yang dimiliki seseorang memang lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi, seperti kemampuan berorganisasi. Hal ini pun terjadi dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang. Walaupun tidak diatur tentang syarat yang harus dipenuhi dalam keterlibatannya, namun keterampilan atau kemampuan tersebut kiranya dimiliki oleh masyarakat agar dapat menunjang keberhasilan program tersebut.

Keterampilan dan sumber daya lebih sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pekerja yang status sosial ekonominya juga tinggi. Kondisi sosial ekonomi dan pendidikan di Kelurahan Serang masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi ekonomi sosial yang rendah di masyarakat Kelurahan Serang ditandai minimnya kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan. Dapat terlihat permasalahan lingkungan yang terjadi di Kelurahan Serang berupa banjir di beberapa titik, sampah yang menumpuk membuat kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat, sistem sanitasi yang buruk dan tidak adanya sarana prasarana lingkungan yang memadai.⁹ Sehingga menimbulkan kesan kumuh, khususnya masyarakat di RW 24 Kampung Tirtalaya sebagai kawasan prioritas kumuh di Kelurahan Serang dalam program KOTAKU Tahun 2016. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kondisi sosial ekonomi masih rendah yakni masih terbatasnya UMKM-UMKM yang tersedia di Kelurahan Serang dan belum optimal usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat. Sehingga masih banyak yang bekerja sebagai buruh¹⁰. Dengan adanya UMKM, diharapkan dapat mendorong laju perekonomian masyarakat. Namun kenyataannya, masih sedikit UMKM yang tersedia.¹¹ Ditambah keberadaannya yang belum merata, maka hal tersebut berdampak pada laju perekonomian yang lambat. Usaha ekonomi Kecil yang dijalankan masyarakat belum optimal dikarenakan banyaknya pengusaha yang tidak memiliki perijinan usaha sehingga modal susah didapat dan pangsa pasar

⁹ Dalam Pembahasan gambaran umum Kelurahan Serang halaman 124

¹⁰ Dalam tabel 4.6

¹¹ Dalam tabel 4.9

yang sempit. Selain itu disebabkan oleh *Skill* Sumber daya Manusia (SDM) yang masih kurang, terbatasnya peralatan yang tersedia, masih kurangnya kesadaran akan penggunaan bahan-bahan kimiawi serta masih banyaknya limbah-limbah yang belum dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan adanya program KOTAKU dibuatlah rencana usaha ekonomi kreatif di Kelurahan Serang untuk Tahun 2017-2021.

Kondisi sosial ekonomi bertalian erat dengan faktor pendidikan. Jenjang pendidikan memungkinkan sosial ekonomi yang tinggi pula dan juga sebaliknya. Masyarakat Kelurahan Serang memiliki jenjang pendidikan yang rendah dengan mendominasinya presentase lulusan Sekolah Dasar yakni 44,75 %. Sehingga berdampak pada sosial ekonomi di Kelurahan Serang. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka dalam menilai suatu fenomena dimana pemahaman tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Dapat ditarik garis besarnya bahwa dengan pendidikan yang rendah maka partisipasinya pun akan rendah. Partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan permukiman, baik kuantitas maupun kualitas SDM nya berkaitan dengan faktor pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Serang. Peran serta masyarakat disini adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.¹² Dengan kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia maka berdampak pada peran masyarakat dalam pelaksanaan program

¹² PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

KOTAKU yang belum optimal. Peran masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan Program KOTAKU diawali dengan keikutsertaan didalam sosialisasi awal dan Rembuk Kesiapan Warga. Sosialisasi awal dan RKM dilakukan guna pengenalan program KOTAKU serta membangun kepedulian masyarakat untuk ikut serta menyukseskan program KOTAKU. Dilakukan dari angkat rumput (lini paling bawah) sampai ke Kelurahan. Selain itu, dilakukannya penjaringan relawan. Dimana disini masyarakat dapat berpartisipasi menjadi relawan Program KOTAKU tingkat Kelurahan Serang. Hal tersebut sudah dilakukan di Kelurahan Serang. Hasil dari kegiatan tersebut di informasikan kembali ke masyarakat agar informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Penggalangan relawan yang telah dilakukan di Kelurahan Serang nyatanya tidak mendorong dukungan relawan yang optimal. Karena kondisi SDM yang masih rendah baik kuantitas maupun kualitas, walaupun sudah dibuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta, faktanya di Kelurahan Serang kesadaran masyarakatnya masih minim untuk terlibat dalam program KOTAKU. Sedangkan upaya peningkatan kemampuan yang ditujukan bahwa masyarakat juga diberi dukungan untuk meningkatkan ketrampilan dan sumber daya yang dibutuhkan mereka untuk terlibat tidak dilakukan, dalam hal ini yakni kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat. Yang meliputi kegiatan Pelatihan BKM, Lurah, Relawan, Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif, *On The Job Training*, Pelatihan Operasional & Pemeliharaan, Pelatihan Komputer dan lain-lain. Sedangkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat

menjadi salah satu strategi pelaksanaan program KOTAKU yang menganut konsep partisipatif. Maka mengenai pendidikan kepada masyarakat, sangat penting dan diperlukan adanya komponen pendidikan dalam setiap bentuk perencanaan pembangunan partisipatif.¹³ Dampak dengan tidak adanya pengembangan kemampuan tersebut, banyak relawan yang kurang faham akan mekanisme program KOTAKU dan tidak memiliki keahlian dalam penataan kawasan permukiman yang memadai. Akibatnya mereka tidak bisa berkontribusi secara optimal. Misalnya dalam kegiatan pemetaan swadaya, tidak adanya Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya (Pokja PS) di Kelurahan Serang, sehingga kebanyakan tugas dan peran diambil alih oleh Pendamping Teknis di lapangan (baik Faskel maupun Konsultan Teknik). Selain itu kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer di Kantor BKM Singandaru menyebabkan penyimpanan file atau berkas yang tidak tersusun rapi dan sistematis, sehingga banyak data yang *kececer* dan hilang tanpa ada *softcopy* yang tersedia. Dan hal tersebut juga mempengaruhi optimalisasi daya dukung aparat atau relawan terkait keberhasilan program.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti melihat bahwa permasalahan yang terjadi di Kelurahan Serang seperti pendidikan dan sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara kualitas SDM maupun kuantitas atau jumlah masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan program KOTAKU. Kelemahan atau permasalahan tersebut tidak diatasi dengan pengembangan kapasitas masyarakat maupun kelembagaan

¹³ Conyers (1994)

dikarenakan kendala-kendala yang ada. Walaupun ketidakmampuan tersebut tidak berlaku bagi relawan yang memiliki rasa loyalitas, jiwa sosial, kepedulian akan lingkungan serta kemauan untuk ikut serta, namun semestinya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan, karena sangatlah penting agar mereka memiliki kesiapan untuk ikut serta dalam proses perencanaan program KOTAKU. Dimana menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif dalam program KOTAKU membutuhkan prakondisi kesiapan masyarakat yang memadai. Dengan tidak dilakukannya pengembangan kapasitas tersebut, berdampak pada kontribusi masyarakat yang berpartisipasi belum cukup maksimal, dikarenakan banyak yang belum faham tentang mekanisme Program KOTAKU. Selain itu kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer di Kantor BKM Singandaru menyebabkan penyimpanan file atau berkas yang tidak tersusun rapi dan sistematis, sehingga banyak data yang *kececer* dan hilang tanpa ada *softcopy* yang tersedia. Dan hal tersebut juga mempengaruhi optimalisasi daya dukungan aparat atau relawan terkait keberhasilan program. Faktor *Can Do* yang disampaikan sebagai upaya peningkatan kemampuan yang ditujukan bahwa masyarakat juga diberi dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan mereka untuk terlibat, tidak dijalankan dalam program KOTAKU di Kelurahan Serang.

Kedua, Like To bersandar pada gagasan bahwa orang-orang menjadi bagian dari sesuatu yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi. Apabila seseorang merasa menjadi bagian dari sesuatu maka mereka akan

mau terlibat. Tetapi jika ia merasa dikesualikan atau dengan perasaan tidak diterima, maka ia dapat memutuskan untuk tidak terlibat atau tidak berpartisipasi. Rasa kepercayaan, koneksi dan jaringan yang dapat terhubung menjadi modal sosial untuk dapat bekerjasama secara efektif. Rasa kemasyarakatan dapat menjadi motivator yang kuat untuk berpartisipasi. Namun, mengingat banyaknya keragaman dalam masyarakat dan terdapatnya komunitas-komunitas apabila seseorang merasa tidak memiliki identitas dan memiliki perasaan menjadi orang luar dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi.

Perasaan menjadi bagian dari masyarakat ataupun perasaan menjadi bagian terhadap pelaksanaan program, dalam hal Program KOTAKU juga diperlukan selain kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki juga harus diikuti dengan perasaan bahwa mereka terlibat karena memiliki perasaan menjadi bagian dalam kemasyarakatan ataupun Program KOTAKU. Merasa menjadi bagian dari Program KOTAKU dapat dilihat bagaimana mereka yang memutuskan untuk terlibat menganggap penting Program KOTAKU dan apa yang melatar belakangi mereka untuk terlibat. Sehingga dapat terlihat apa yang sebenarnya masyarakat harapkan dalam keterlibatan di Program KOTAKU. Semua informan menganggap Program KOTAKU merupakan program penting bagi masyarakat karena memberi manfaat diantaranya dengan penanganan kawasan kumuh yang tepat, maka masyarakat akan mandiri baik secara sosial maupun ekonomi serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah pudar seperti gotong royong. Demi terwujudnya

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan serta tercapainya masyarakat yang Madani yakni masyarakat yang bermoral, berjati diri dan mandiri.

Latar belakang dari semua informan yang terlibat dalam Program KOTAKU bermacam-macam. Ada yang merasa dirinya terdorong karena jiwa sosial yang dimiliki atau rasa kemasyarakatan, adanya tanggung jawab atas jabatan yang diemban dan adanya koneksi atau jaringan dengan lembaga terkait yang menjadi latar belakang mengikuti program KOTAKU. Berdasarkan pernyataan tersebut jaringan, koneksi, rasa kemasyarakatan yang timbul menyebabkan dorongan masyarakat untuk terlibat dalam program KOTAKU. Namun kiranya bagi yang tidak memiliki hal-hal di atas maka mereka tidak memiliki dorongan untuk terlibat. Rasa kemasyarakatan dapat dipupuk dengan cara kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya terkait usaha peningkatan kesehatan lingkungan. Kegiatan yang sudah berlangsung pada bulan Mei 2016 tersebut menjadi salah satu upaya di luar program KOTAKU untuk memupuk rasa kebersamaan dan rasa kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Serang. Selain itu untuk memperoleh solusi menangani permasalahan utama di Kelurahan Serang yakni permasalahan pengelolaan sampah.

Namun upaya di atas dinilai belum berhasil dikarenakan masyarakat yang ikut serta tidak melakukan lebih lanjut di lingkungannya masing-masing. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dan belum adanya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat membuat upaya tersebut tidak efektif.

Seperti halnya yang terjadi dalam perencanaan program KOTAKU. Adanya kecenderungan rasa takut akan tidak berjalannya program seperti yang diharapkan, sehingga ketidakpercayaan akan program tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi terkait program KOTAKU.

Hal tersebut juga terjadi di RT 2 RW 24 Kampung Tirtalaya. Kedua RT tersebut masuk ke dalam kawasan prioritas kumuh dan perlu penanganan segera. Namun yang terjadi, kepercayaan tersebut tidak lantas timbul di masyarakat dikarenakan informasi yang tidak sampai. Kepercayaan merupakan salah satu modal sosial untuk bekerjasama secara efektif. Permasalahan di RW 24 bukan karena rasa kemasyarakatan namun lebih kepada ketidakpercayaan akan program dikarenakan informasi yang tidak kunjung diterima. Kenyataannya pada bulan Mei Tahun 2017, masyarakat bergotong royong membangun jembatan dan melakukan pemugaran secara swadaya di RW 24.

Gambar 4.8
Kegiatan Swadaya masyarakat pembangunan Jembatan dan pemugaran makam di Lingkungan Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang Tahun 2017



Sumber : Peneliti, 2017

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bahwasanya permasalahan bukan terletak di masyarakatnya namun berada pada informasi yang tidak sampai sehingga mereka merasa tidak menjadi bagian dalam program KOTAKU di Kelurahan Serang.

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kepercayaan masyarakat dikarenakan ada rasa dikecualikan atau perasaan tidak diterima sehingga mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Perasaan tidak diterima tersebut salah satunya disebabkan oleh keanekaragaman sosial di dalam masyarakat. Keanekaragaman perbedaan baik budaya, agama, suku dan sebagainya terkadang dapat menghalangi seseorang untuk berpartisipasi. Banyak yang beranggapan seseorang yang berada diluar di suatu komunitas atau kelompok yang didominasi oleh orang yang memiliki banyak kesamaan menjadi kendala bagi mereka yang merasa berbeda untuk berpartisipasi. Dalam hasil wawancara dan data yang telah

diperoleh, hasil temuan mengenai keterlibatan masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang tidak dipengaruhi oleh keragaman agama dan sosial. Dalam sektor sosial, Pluralisme adalah ciri dari masyarakat Kelurahan Serang. Warga asli Sunda Jawa Serang dengan warga pendatang dari berbagai suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang telah membaaur menjadi satu. Setiap permasalahan di kampung, diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Ketua RT atau RW masing-masing. Beberapa yang dianggap tokoh masyarakat dan agama menjadi narasumber di setiap kegiatan musyawarah. Jadi tidak terkotak-kotak. Begitupun di kelembagaan kemasyarakatan BKM.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa jaringan koneksi merupakan salah satu jalan masyarakat untuk terlibat dalam program KOTAKU. Namun kiranya bagi yang tidak memiliki hal-hal di atas maka mereka tidak memiliki dorongan untuk terlibat. Permasalahan di RW 24 (kawasan prioritas kumuh Kelurahan Serang) bukan karena rasa kemasyarakatan atau kemauan terlibat namun lebih kepada ketidakpercayaan akan program dikarenakan informasi yang tidak kunjung diterima, Sedangkan dalam keanekaragaman budaya dan sosial di kelurahan Serang tidak mempengaruhi keterlibatan mereka dalam program KOTAKU. Hal tersebut juga berlaku pada keseragaman entitas antara perempuan dan laki-laki di Kepengurusan BKM, terutama banyaknya jumlah laki-laki, tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi. Sampai saat ini keinginan masyarakat secara umum (yang didalamnya terdapat kelompok rentan,

miskin, wanita, anak, dan pemuda) untuk berpartisipasi, direspon baik dalam perencanaan program KOTAKU. Selain bertujuan menangani masalah kumuh dengan membangun infrastruktur fisik, Program KOTAKU berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang terindikasi kumuh. Masyarakat dituntut dapat ikut berpartisipasi karena permasalahan akan kumuh dirasakan masyarakat secara bersama. Maka dalam hal penanganannya, baik perempuan maupun laki-laki berperan sama penting untuk mencapai kehidupan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Sehingga keseragaman entitas tidak berpengaruh kepada partisipasi masyarakat di dalam perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang. Namun keterbatasan waktu menjadi faktor penghambat partisipasi wanita maupun laki-laki dalam partisipasi yang diberikan.

Ketiga, Enabled To merupakan keterbukaan akses dengan kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi. Pada saat seseorang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kelompok, organisasi ataupun kegiatan. Kemudian apakah seseorang itu dimungkinkan oleh kelompok, organisasi ataupun kegiatan tersebut untuk dapat berpartisipasi dan terlibat di dalamnya. Kemampuan dan keinginan tersebut haruslah mendapat umpan balik dari kelompok, organisasi atau kegiatan yang ingin diikuti.

Secara umum Program KOTAKU sudah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk terlibat, baik dalam tahap persiapan sampai pada tahap keberlanjutan. Tidak adanya pengecualian masyarakat

dalam golongan miskin, wanita, kelompok rentan dalam keterlibatannya di Program KOTAKU. Kelompok marginal di atas keikutsertaannya wajib kan diikutsertakan ke dalam program. Namun di Kelurahan Serang seringkali terjadi partisipasi yang kurang dari golongan *marginal* tersebut dikarenakan didasarkan keinginan individu itu sendiri. Tidak adanya pengecualian tersebut, merupakan bentuk keterbukaan akses dimana dalam perencanaan yang dilakukan membuka kesempatan kepada siapa saja masyarakat di lokasi penanganan untuk ikut serta. Karena menurut ketentuan pelaksanaan Program KOTAKU di tingkat Kelurahan, pelibatan masyarakat lokasi sasaran sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan/pengelolaan dan pemeliharaan. Dalam tahap perencanaan yang dilakukan, adanya sosialisasi awal, Rembuk Kesiapan Warga atau disingkat RKM serta penggalangan relawan merupakan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program KOTAKU di Kelurahan Serang. hasil wawancara didapat menunjukkan bahwa sudah dilakukannya proses sosialisasi awal dan RKM di Kelurahan Serang guna membangun kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula penggalangan relawan dan agen sosialisasi.

Namun sosialisasi awal yang sudah dilakukan mendapat kendala dari masyarakat itu sendiri, seperti yang terjadi di RW 24 RT 1 dan 2. Dimana masing-masing Ketua RT yang hadir dalam sosialisasi awal tidak mensosialisasikan kembali ke masyarakatnya, sedangkan alasan yang

disampaikan oleh aparat mobilisator (Rukun Tetangga) tersebut bersifat *subjektif*, sehingga pada akhirnya sosialisasi tidak merata dan hal tersebut menjadi penghambat ketika kendala-kendala tersebut ditemukan di lapangan, seperti masyarakat tidak mengetahui keberadaan Program KOTAKU dan tidak bisa membedakan program KOTAKU dengan program sebelumnya yakni Program PNPM-MP, rentan akan tindak manipulatif karena perencanaan yang dilakukan tidak melibatkan seluruh masyarakat setempat, serta berdampak pada penjangkaran relawan yang tidak merata di seluruh wilayah di Kelurahan Serang. Informasi tersebut juga tidak sampai kepada Kasie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Serang, dikarenakan baru dalam tugasnya di Kelurahan Serang maka iapun tidak sama sekali mengetahui perkembangan Program KOTAKU di Kelurahan Serang.

Padahal apabila dilihat dalam PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, dalam pasal 2 poin a dan b menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak: (a) berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, (b) Mengetahui secara ternuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan”

Sehingga dengan tidak adanya penerimaan informasi oleh masyarakat tentang rencana penataan kawasan lingkungan, Program KOTAKU, maka pasal di atas tidak terpenuhi. Karena bagaimana masyarakat secara luas akan terlibat apabila mereka tidak tahu tentang ada atau tidaknya, jadi atau

tidaknya program ini berjalan. Sehingga, walaupun sosialisasi awal dan Rembuk Kesiapan Warga serta Penggalangan relawan telah dilakukan. Akan tetapi masih adanya kendala penyampaian informasi baik informasi yang tertahan seperti di RW 24 yang notabeneanya kawasan prioritas kumuh sampai pada aparat Kelurahan yang merupakan *stakeholder* namun tidak mengetahui perkembangan program KOTAKU diwilayahnya. Dalam penyampaian informasi sebetulnya di Kelurahan Serang sudah menggunakan media elektronik seperti *Handphone* dan pendekatan langsung kepada masyarakat.

Media yang disebutkan di atas disadari bahwa belum efektif digunakan, dikarenakan terbatasnya masyarakat yang akan diberi informasi. Sistem perwakilan menyebabkan antusiasme masyarakat untuk ikut serta berkurang. Selain itu, untuk kumpul bersama atau rapat bersama masih adanya halangan masyarakat untuk hadir. Sehingga respon masyarakat masih minim. Penggunaan media papan informasipun belum dilakukan secara efektif, tidak di *update* nya informasi menyebabkan papan yang tidak *up to date* tersebut tidak menarik massa untuk sekedar melihat maupun mencari tahu keberadaan program KOTAKU. Ide kreatif pembuatan media massa berupa *Fotonovella* atau katalog masyarakat terkait Program KOTAKU yang rencananya memuat 4 edisi tidak bisa terealisasi dengan baik. Banyaknya kendala yang ada, baik prosedur pembuatan sampai dana pembuatan membuat rencana tersebut hanya rencana yang tidak ada realisasinya. Sedangkan belum digunakannya media sosial sebagai wadah informasi menyebabkan akses informasi yang terhambat untuk disebarluaskan.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat dilihat beberapa masalah atau hambatan dalam indikator *Enabled To* yang diterapkan, seperti sosialisasi awal dan Rembuk Kesiapan Warga serta Penggalangan relawan telah dilakukan. Akan tetapi masih adanya kendala penyampaian informasi baik informasi yang tertahan seperti di RW 24 yang notabenenya kawasan prioritas kumuh sampai pada aparat Kelurahan yang merupakan *stakeholder* namun tidak mengetahui perkembangan program KOTAKU diwilayahnya. Serta penggunaan media yang belum efektif dalam penyebaran informasi Program KOTAKU.

Keempat, Asked To beranggapan bahwa orang-orang cenderung menjadi terlibat secara teratur ketika mereka diminta untuk terlibat. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi seringkali bergantung pada apakah mereka didekati atau tidak dan bagaimana mereka didekati. Berbagai pilihan untuk keterlibatan partisipasi adalah penting karena beberapa orang lebih nyaman dengan beberapa bentuk keterlibatan seperti rapat umum, sementara yang lain lebih suka terlibat melalui diskusi *online*. Beberapa orang berpartisipasi untuk berbicara mengenai pengalaman dari masyarakatnya atau lingkungannya sementara yang lain ingin terlibat berdasarkan pengetahuan mereka tentang layanan tertentu sebagai pengguna. Partisipasi dapat dimobilisasi dengan menggunakan insentif (misal *honorarium*), melalui pembentukan rasa kewajiban atau dengan menawarkan *bargaining*/pertukaran.

Program KOTAKU telah dijelaskan sebelumnya, membuka kesempatan seluas- luasnya dan membuka akses bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi.

Namun, untuk lebih mengefektifkan berjalannya program, Program KOTAKU membangun strategi dengan mencari tokoh kunci yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk terlibat. Pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa kebanyakan pengurus yang mengikuti Program KOTAKU, baik itu BKM ataupun TIPP adalah orang-orang yang memang pernah menjabat dalam organisasi kemasyarakatan seperti Ketua RW, Ketua RT, Staf Kelurahan, Forum RW dan lain sebagainya. Program KOTAKU melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut agar keterlibatannya dapat mempengaruhi masyarakat yang telah menaruh kepercayaan bagi orang-orang yang sudah lama terjun di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menyerap partisipasi sebanyak-banyaknya. Tetapi bukan berarti Program KOTAKU hanya melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh kunci saja. Masyarakat luas dilibatkan dan diikutsertakan, namun hanya yang aktif mengikuti rapat-rapat dan pertemuan masyarakat yang mengetahui Program KOTAKU sehingga keikutsertaannya didorong oleh kepedulian. Permintaan pelibatan masyarakat dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Serang melalui sistem perwakilan. Dimana keseluruhan masyarakat tanpa terkecuali, dengan digerakkannya badan-badan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Singandaru, Tim Inti Perencanaan Partisipatif maupun RT RW yang terkait.

Mobilisasi yang dilakukan oleh badan-badan tersebut dinilai efektif karena lini yang paling dasar untuk mengetahui dan bersinggungan langsung di lingkungan terkait. Namun masih adanya permasalahan yang terjadi

sehingga masih banyaknya masyarakat khususnya di wilayah prioritas kumuh Kelurahan Serang, tidak mengetahui program yang sedang dicanangkan. Hal tersebut disebabkan komunikasi berjenjang yang mana dilakukan dari mulut ke mulut, hal ini riskan dikarenakan apabila informasi terhenti di salah satu pihak maka informasi tersebut tidak akan sampai pada masyarakat secara luas. Dan begitu pula yang terjadi di masyarakat, tidak adanya usaha untuk mengetahui adanya program pembangunan yang akan dijalankan mengingat kondisi lingkungannya. Sehingga diperlukan kerjasama agar timbal balik dapat dilakukan guna suksesnya program penataan kawasan permukiman di wilayah Kelurahan Serang, khususnya wilayah prioritas kumuh. Kendala-kendala seperti yang diungkapkan di atas dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Namun di lain sisi terdapat cara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Serang dalam program KOTAKU. Seperti tersedianya berbagai pilihan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program KOTAKU. Baik dalam penggunaan media maupun bahan masukan atau materi yang dibahas dalam forum pertemuan. Dalam penggunaan media, seperti yang sudah dijelaskan di poin awal, diskusi *online* belum dipergunakan dalam forum diskusi yang diadakan dalam kegiatan program KOTAKU. Masih digunakannya model diskusi lama, dengan pertemuan tatap muka atau rapat bersama. Setiap alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan dimasing-masing penggunaannya. Namun perlu kiranya dipertimbangkan agar partisipasi masyarakat dapat terakomodir secara baik dan dapat berjalan seoptimal mungkin. Sedangkan dalam hal materi, dalam forum yang diadakan

setiap materi sudah ditentukan oleh pelaksana kegiatan agar tidak menyimpang dari kegiatan.

Cara lain untuk menarik partisipasi masyarakat salah satunya adalah *honorium*. Namun dikarenakan ini program bersama, pelaku dan penikmat manfaat adalah masyarakat maka tidak adanya *honorium* atau kompensasi yang diberikan dalam Program KOTAKU, dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat. BKM dituntut bekerja secara sukarela untuk mengakomodir masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Dalam wawancara yang dilakukan, di BKM Singandaru Kelurahan Serang, perangkat pengurus BKM yang menjadi informan menyatakan sukarela mengikuti program KOTAKU dan tidak merasa dipaksa untuk ikut. Kalaupun pada awal keterlibatannya ditunjuk atau diminta, tetapi semua informan menyatakan selama Program KOTAKU memberikan manfaat bagi masyarakat banyak mereka bersedia terlibat meskipun tidak dibayar.

Di Kelurahan Serang beberapa pengurus memang rata-rata adalah orang yang sudah lama bergerak dalam kegiatan di masyarakat dan berkerja di bidang sosial, sehingga mereka tidak mempermasalahkan tidak adanya kompensasi selama biaya operasional mereka juga tetap dibiayai oleh penyedia program. Sikap sukarela yang ditunjukkan di Kelurahan Serang diharapkan murni niat tulus tanpa membawa bendera kepartaian atau kepentingan-kepentingan politik di dalamnya seperti contoh salah satu pengurus nantinya adalah calon anggota legislatif ataupun sebagainya dan sengaja berpartisipasi dalam Program KOTAKU dalam rangka mencari

simpatisan. Karena dengan mottonya tersebut diharap BKM Singandaru dapat amanah dalam menjalankan perannya sebagai wadahnya masyarakat kelurahan Serang.

Kelima, Responded To beranggapan bahwa orang-orang akan berpartisipasi secara berkelanjutan apabila mereka percaya bahwa keterlibatan mereka membuat sesuatu yang berbeda dan mencapai manfaat positif. Selain itu bagi orang-orang yang memutuskan untuk berpartisipasi mereka harus percaya bahwa mereka akan didengarkan dan tidak selalu setuju dengan suatu keputusan paling tidak pandangan-pandangan dari mereka telah diperhitungkan. Bagaimana para pemegang otoritas menimbang gagasan-gagasan atau pesan dari berbagai konsultasi sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan. Bagaimana perbedaan gagasan atau pendapat dari berbagai peserta yang terlebih dahulu di prioritaskan. Daya tanggap (*Responsiveness*) adalah tentang memastikan *feedback* yang mungkin tidak selamanya positif. Dalam Pelaksanaan Program KOTAKU, faktor *responded to* lebih tepat dianalisis untuk masyarakat di RW 24 RT 1 dan 2 sebagai penerima manfaat dan sebagai objek sasaran Program KOTAKU, dimana keberadaan mereka serta pendapat mereka harus direspon. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa respon masyarakat di RW 24 tidak seperti yang diharapkan, karena pada saat pengenalan program, tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan sosialisasi lanjutan tidak dilakukan oleh aparat RT setempat.

Mengingat bahwa bantuan Program KOTAKU ini diperuntukkan bagi kawasan yang terindikasi kumuh, khususnya kawasan prioritas yang terindikasi kumuh, maka semua wilayah kumuh mendapat bantuan dari pemerintah namun dalam proses pelaksanaan diutamakan kawasan yang masuk ke dalam kawasan prioritas terlebih dahulu yang mana dituangkan secara rinci dalam indikasi kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan Kelurahan Serang Tahun 2017-2021.¹⁴ Sehingga dilakukanlah pengambilan keputusan yang tepat diantara beberapa pilihan gagasan yang terdapat dalam musyawarah bersama. Dasar pengambilan keputusan yakni daerah yang paling *urgent* untuk segera ditangani dan masuk kedalam 7+1 indikator kumuh. Selanjutnya, usulan untuk kawasan kumuh yang masuk dalam musyawarah tidak sertamerta diterima dan ditetapkan. Setelah musyawarah bersama mendapatkan hasil pemetaan kawasan kumuh sementara dari masyarakat, maka dilakukanlah kegiatan pemetaan swadaya dimana untuk menghasilkan peta-peta rencana penanganan di Kelurahan Serang.¹⁵ Pemetaan swadaya ini merupakan kegiatan pengumpulan dan melengkapi kekurangan data, identifikasi dan kajian kendala serta potensi yang dilakukan oleh TIPP bersama warga masyarakat terhadap kondisi *riil/eksisting* kawasan permukiman di wilayah kelurahan/desa. Namun, dalam tahapan ini terjadi kendala yakni tidak adanya Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya (Pokja PS) dikarenakan kurangnya SDM yang ahli sehingga beban pekerjaan di bebankan kepada Tim Pendamping Teknis (Faskel) dan

¹⁴ Rincian kegiatan sosial, ekonomi, lingkungan Kelurahan Serang dalam Lampiran

¹⁵ Dapat dilihat dalam Lampiran

Konsultan Teknik yang terdapat di Kelurahan Serang. Masyarakat hanya bisa membantu sebisanya. Seperti pengukuran dan lain-lain. Selebihnya diserahkan kepada Faskel maupun Konsultan Teknik. Lain hal dengan rasa kemasyarakatan. Memupuk rasa kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Serang. salah satunya adalah dengan dengan menjalin gotong royong, rasa memiliki serta komitmen yang ditumbuhkan dengan cara silaturahmi dan berkomunikasi dengan lancar. Sehingga rasa percaya tersebut akan timbul. Silaturahmi yang dimaksud yakni musyawarah tersebut. *Feedback* yang didapat atas keterlibatan masyarakat di Kelurahan Serang dalam Program KOTAKU yakni manfaat yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya program tersebut yakni hidup sehat dengan sarana prasarana yang ada serta peningkatan ekonomi di wilayah Kelurahan Serang, selain itu dapat mengenali kondisi lingkungannya serta terbangunnya aturan bersama yang disepakati untuk bersama-sama membiasakan diri berperilaku hidup sehat.

Sehingga rasa percaya akan manfaat atau *Feedback* yang didapat oleh masyarakat dilakukan guna menjaring partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu upaya yang dilakukan agar keikutsertaan masyarakat tetap terjaga atau berlanjut dalam Program KOTAKU di Kelurahan Serang yakni dengan adanya sosialisasi dan Rembuk Kesiapan Warga yang dilakukan. Nantinya akan dihasilkan visi yang dirumuskan dan disepakati bersama serta dilakukannya Refleksi Perkara Kritis yang bertujuan agar menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap masalah

kumuh di wilayahnya. Sehingga komitmen, kekompakan dan kepedulian serta jalinan silaturahmi tetap terjaga sampai pada keberlanjutan program.

Dari paparan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif yang dilakukan dalam program KOTAKU di Kelurahan Serang masih bersifat manipulatif. Dikatakan manipulatif, secara garis besarnya masyarakat tidak mengetahui program. Sehingga hasil perencanaanpun ditengarahi hasil pemikiran kelompok kepentingan yang memiliki akses didalam program tersebut, bukan berdasar hasil bersama atau kebutuhan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Visi penataan lingkungan tidak tercapai, terkait pemberdayaan masyarakat. Menurut Pretty, J., ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal (tingkat partisipasi), yaitu (Karianga, 2011: 223).:

1. **Partisipasi Pasif dan Manipulatif**, ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitaan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.
2. **Partisipasi Informatif**, disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.
3. **Partisipasi komunikatif**, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada

peluang untuk mengajukan pandangan masyarakat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti.

4. **Partisipasi insentif**, masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukakn. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
5. **Partisipasi fungsional**, masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat bergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
6. **Partisipasi interaktif**, masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. **Partisipasi mandiri (*self mobilization*)**, masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan, yang terpenting masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan.

Partisipasi yang terjadi di Kelurahan Serang dalam Program KOTAKU tidak masuk ke dalam satupun *point* di atas. Dalam tingkatan pertama, Partisipasi yang pasif dan manipulatif masih adanya pemebritahuan kepada masyarakat. Sedangkan disini yang terjadi masyarakat tidak mengetahuinya.

Dalam tingkatan informatif, masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar proyek, namun hanya sebatas masyarakat yang mewakili atau keterwakilan masyarakat yang memiliki akses (aparatur). Sehingga tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat. Selain itu, dengan paparan diatas dan tidak terpenuhinya indikator *CLEAR* dapat disimpulkan perencanaan partisipatif di Kelurahan Serang dalam Program KOTAKU tidak berjalan dengan baik dan bersifat manipulatif. Ringkasan temuan lapangan dapat dilihat dalam Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Pembahasan

No.	Indikator	Temuan Lapangan
1.	<i>Can Do</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi di Kelurahan Serang khususnya daerah prioritas kumuh. 2. Masih ditemukannya masalah lingkungan dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam hal tersebut. 3. Masih rendahnya kualitas SDM di Kelurahan Serang. 4. Sosialisasi awal dan Rembuk Kesiapan Masyarakat diantaranya penggalangan relawan sudah dilakukan dalam proses perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang. 5. Upaya peningkatan kemampuan kapasitas kelembagaan dan masyarakat belum dilakukan.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Belum adanya pembentukan Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya. 7. Permasalahan lainnya masih kurangnya sarana prasarana penunjang kelembagaan masyarakat.
2.	<i>Like To</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program KOTAKU penting dilakukan di Kelurahan Serang 2. Latar belakang mengikuti program didasarkan rasa kemasyarakatan, jabatan, koneksi jaringan. 3. Adanya alasan subjektif oleh aparat lini masyarakat sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi tentang program KOTAKU. 4. Adanya kecenderungan masyarakat tidak percaya akan adanya program KOTAKU. 5. Keragaman sosial tidak menghambat masyarakat untuk berpartisipasi, permasalahan terletak pada akses informasi yang hanya didapat oleh masyarakat yang memiliki koneksi.
3.	<i>Enable To</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi lanjutan kepada masyarakat kumuh tidak dilakukan dengan alasan subjektif. 2. Masyarakat tidak bisa membedakan program KOTAKU dengan program sebelumnya yakni PNPM-MP. 3. Hasil perencanaan rentan terhadap manipulatif. 4. Penggalangan relawan tidak merata. 5. Tidak adanya informasi yang diterima oleh masyarakat kumuh.

		<p>6. Penggunaan media massa yang belum efektif dikarenakan hanya sebatas sms dan telfon sedangkan rencana pembuatan <i>fotonovella</i> sejenis majalah Kelurahan belum dilakukan.</p>
4.	<i>Asked To</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan program KOTAKU. 2. Mobilisasi massa belum berjalan dengan baik. 3. Adanya informasi yang berjenjang sehingga menghambat informasi yang sampai kepada masyarakat. 4. Tidak adanya insentif atau honorium kepada masyarakat yang berpartisipasi, hanya didasarkan pada kesukarelaan dan kepedulian akan lingkungan.
5.	<i>Responded To</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon yang belum baik diberikan oleh masyarakat prioritas penangan kumuh di Kelurahan Serang, yakni RW 24 Kp. Tirtalaya. 2. Keputusan diambil berdasarkan urgenitas kawasan dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. 3. Kurangnya SDM ahli sehingga dalam penentuan deliniasi kumuh dilakukan oleh tim teknis lapangan sedangkan masyarakat bersifat pasif.

Sumber : Peneliti 2017

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai Perencanaan Partisipatif di Kota Serang Provinsi Banten (Studi Kasus Program KOTAKU di Kelurahan Serang) belum berjalan dengan baik dan bersifat manipulatif. Selain itu permasalahan secara spesifik yang terjadi sehingga kelima faktor tidak terpenuhi, berikut penjelasannya:

Pertama, belum dilakukannya pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat. Sehingga masyarakat belum faham akan bagaimana pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Serang dan minimnya keahlian yang dimiliki masyarakat sehingga peran masyarakat masih kecil atau minim sedangkan pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Serang masih rendah. Berikutnya sarana penunjang yang belum memadai di BKM sebagai wadah masyarakat seperti peralatan komputer. Sehingga data masih *kececer* dan draft penyimpanannya tidak sistematis, apabila sedang mencari data perlu memakan waktu.

Kedua, kiranya bagi yang tidak memiliki koneksi dan jaringan maka mereka tidak memiliki dorongan untuk terlibat, serta upaya pemupukan kemasyarakatan dan solusi pengelolaan sampah dinilai belum berhasil dikarenakan masyarakat yang ikut serta tidak melakukan lebih lanjut di lingkungannya masing-masing. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dan belum adanya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat membuat upaya tersebut tidak efektif. Selain itu adanya kecenderungan rasa takut akan tidak berjalannya program seperti yang diharapkan, sehingga karena ketidakpercayaan tersebut, aparat khususnya disini Rukun Tetangga (RT) tidak mensosialisasikan kepada masyarakat akan program tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi terkait program KOTAKU.

Ketiga, masih adanya kendala penyampaian informasi baik informasi yang tertahan seperti di RW 24 yang *notabenenya* kawasan prioritas kumuh sampai pada aparat Kelurahan yang merupakan *stakeholder* namun tidak mengetahui perkembangan program KOTAKU di wilayahnya. Serta penggunaan media yang belum efektif dalam penyebaran informasi Program KOTAKU.

Keempat, masih banyaknya masyarakat khususnya di wilayah prioritas kumuh Kelurahan Serang, tidak mengetahui program yang sedang dicanangkan. Hal tersebut disebabkan komunikasi berjenjang yang mana dilakukan dari mulut ke mulut atau sistem keterwakilan, hal ini riskan dikarenakan apabila informasi terhenti di salah satu pihak maka informasi

tersebut tidak akan sampai pada masyarakat secara luas. Ketidaksampaian informasi tersebut riskan akan manipulasi dan kepentingan dikarenakan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Akan berdampak pada penjarangan relawan dan juga pengetahuan masyarakat yang minim akan Program KOTAKU. Dan begitu pula yang terjadi di masyarakat, tidak adanya usaha untuk mengetahui adanya program pembangunan yang akan dijalankan mengingat kondisi lingkungannya. Sehingga diperlukan kerjasama agar timbal balik dapat dilakukan guna suksesnya program penataan kawasan permukiman di wilayah Kelurahan Serang, khususnya wilayah prioritas kumuh. Serta masih digunakannya model diskusi lama, dengan pertemuan tatap muka atau rapat bersama. Setiap alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan di masing-masing penggunaannya. Namun perlu kiranya dipertimbangkan agar partisipasi masyarakat dapat terakomodir secara baik dan dapat berjalan seoptimal mungkin.

Kelima, respon masyarakat di RW 24 tidak seperti yang diharapkan, karena pada saat pengenalan program, tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan sosialisasi lanjutan tidak dilakukan oleh aparat RT setempat. Serta tidak adanya Kelompok Kerja Pemetaan Swadaya (Pokja PS) dikarenakan kurangnya SDM yang ahli sehingga beban pekerjaan di bebankan kepada Tim Pendamping Teknis (Faskel) dan Konsultan Teknik yang terdapat di Kelurahan Serang. masyarakat hanya bisa membantu sebisanya. Partisipasi masyarakat belum terserap sepenuhnya dikarenakan terbatasnya kemampuan ketersediaan waktu yang dimiliki penduduk Kelurahan

Serang sebagai pekerja buruh selain itu banyaknya perumahan di Kelurahan Serang menyebabkan kesibukan masyarakat beragam maka berpengaruh kepada partisipasi yang diberikan. Dalam hal ketersediaan akses informasi, masyarakat tidak disosialisasikan secara penuh oleh pihak RT sehingga masih banyak masyarakat tidak tahu akan program dan berdampak pada kelangsungan program KOTAKU khususnya di wilayah RW 24. Dan penyebab lain ialah kesadaran akan menjaga lingkungan yang masih rendah di Kelurahan Serang sehingga masih banyaknya kondisi kumuh yang ada.

5.2 Saran

1. Segera dilakukan pengembangan kapasitas masyarakat agar keterlibatan masyarakat meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mereka mampu berkontribusi secara penuh. Serta dibuatah rencana penancangan penambahan fasilitas penunjang di BKM agar dukungan yang diberikan BKM selaku wadah masyarakat dapat berjalan optimal
2. Lebih menggiatkan upaya penyebaran informasi bukan hanya dari satu orang ke orang lain, namun bagaimana turun ke lapangan secara langsung baik dilakukan oleh BKM maupun TIPP agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan program bersama dan merubah bersama-sama penyadaran lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian khusus
3. Menggunakan media sosial untuk penggunaan yang lebih efektif serta penggunaan papan media informasi yang di *up to date* agar masyarakat mengetahui secara langsung. Baik masyarakat pengguna media sosial maupun masyarakat yang berkunjung ke Kantor Kelurahan.

4. Perlu dipertimbangkan alternatif-alternatif bentuk diskusi agar partisipasi masyarakat dapat terakomodir secara baik dan dapat berjalan seoptimal mungkin. Seperti bentuk diskusi *online* tanpa harus bertatap muka namun informasi dan diskusi dapat berjalan dengan baik.
5. Perlu dilakukan upaya pendekatan kepada masyarakat serta menjalin komunikasi secara terus menerus agar permasalahan yang terjadi dapat diatasi bersama-sama serta ketertinggalan akan informasi dapat teratasi. Selain itu, kepercayaan masyarakat harus segera didapat kembali agar baik dalam pelaksanaan program maupun dalam keberlanjutan program dapat berjalan sebagaimana mestinya (Sesuai petunjuk yang berlaku).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abe, Alexander ,2002, *Perencanaan daerah partisipatif*, pondok edukasi,Solo

Arsyad, Lincon. 2004, *Ekonomi Pembangunan*,, BPSTIE YKPN, Yogyakarta.

Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.

Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Bryant, Coralie dan White, Louise G, 1989, *Managing Development in Third World*, Westview Press, Boulder, Colorado.

Creswell, Jhon.W, 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Conyers, Diana, 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. cetakan ketiga,Gajah Mada University Press

Farazmand, Ali, 2004, *Sound Governance: policy and administrative innovations*, United State of America: Praeger Publishers.

Fuad & Nugroho, 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: FISIP Untirta Press

Hasibuan, Malayu, S.P.Drs. 1993. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. CV. Haju Masagung. Jakarta

Irawan, Prasetya. 2005. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka

Ishomuddin, 2001, *Diskursus Politik dan Pembangunan*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

- Islamy, M Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. PT. Bina Aksara. Bandung
- Karianga, Hendra, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan (Perspektif Hukum dan Demokrasi)*, PT. Alumni, Bandung.
- Korten, David dan Syahrir, 1998, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mintzberg, Henry, 1998, *The Rise and Fall of Strategy Planning*, The Free Press, New York.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Penerbit PT. Remaja Rosdyakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 1985, *Peran Administrasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sastropoetro, R.A., Santoso, 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, PT.Alumni, Bandung.
- Siagian, SP. (1983). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta
- ,2003. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati et al. 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Soekartawi, 1990, *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Kemiskinan : Teori, Fakta dan Kebijakan*, Impac, Jakarta.

- Suprajogo, Tjahjo, 2003, *Makna Otonomi Daerah bagi Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Widya Praja, Volume XXIX Nomor 2, Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- Susanto, Hery, 2003, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, PT. Dyatama Milenia, Jakarta.
- Sutopo, HB, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Surakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahroni. 2002. *Pengertian Dasar dan Generik Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*, German Technical Cooperation (GTC), Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya, AR. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan penerapan*. Cetakan ke tujuh belas. LP3ES .Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1994 *,Perencanaan Pembangunan*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- ,1996 *,Perencanaan Pembangunan*, Edisi ke -19, PT Gunung Agung, Jakarta.
- ,2002, *Reformasi Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani*, LAN-RI Jakarta.
- Usman, Sunyoto. (1993). *Pengaruh dan Jaringan Interaksi Elite Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*. Gajah Mada University Press , Jogjakarta.

Dokumen :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2016 Direktorat Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Draft Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan berkelanjutan (Bappenas 2016)

Kecamatan Serang dalam Angka 2016

Gambaran Umum Program Kotaku Kolaborasi dalam Upaya Percepatan Penanganan Kumuh

Kota Serang dalam Angka 2016

Luasan Deliniasi Kumuh Kota Serang

Panduan Penyusunan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)

Pedoman Teknis Program KOTAKU

Profil Delineasi Kota Serang

Profil Tahun 2015 PNPM-Mp dan P2KKP 100 0 100 KOTA SERANG

Rencana Penataan Permukiman (RPLP) Kelurahan Serang Tahun 2016

Statistik Kota Serang 2016

Sumber Lain :

Banteng, Beby. S.D. 2015. *Analisis Keberhasilan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh di Kota Gorontalo*, Jurnal, Pusat kajian dan Pengembangan Wilayah, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo.

Isnadi. 2007. *Proses Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen*, Tesis, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.

Noegroho, Noegi. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan : Study Kasus Kegiatan PLP2K-BK di Kota Medan dan Kota Payakumbuh*, Jurnal, Architecture Department, Faculty of Engineering, Binus University.

Purnamasari, Irma. 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*, Tesis, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.

Septiany, Irma. 2012, *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model Clear di Kelurahan kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi*, Skripsi, Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok.

Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yulianti. 2006. *Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang*, Tesis, Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Banten diakses pada 12 April 2017 pukul 09.31 WIB

<http://www.kabar6.com/banten/serang/14403-400-hektare-wilayah-kota-di-banten-kumuh> diakses pada tanggal 8 Oktober 2017 pukul 15.39 WIB

- Juara 2 Cabang Olahraga Bola Voli Putri dalam piala Walikota Jakarta Barat Tahun 2011
- Delegasi Kontingen UNTIRTA Cabang Olahraga Bola Voli Putri dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Banten Tahun 2014
- Juara 2 Cabang Olahraga Futsal Putri dalam Pekan Olahraga dan Seni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untirta Tahun 2016